Sedane
Lembaga Informasi Perburuhan Sedane

Jl. Dewi Sartika 52 F Bogor Jawa Barat 16121
Telp./Fax : 0251-8344473
perburuhan.sedane@gmail.com

sedane

Kliping Berita Perburuhan dari media massa nasional dan media massa lokal

Mogok Nasional 3 Oktober 2012 dan Persiapannya

Kantor Muhaimin Diserbu 50.000 Buruh

Penulis : Luthfie Febrianto | Kamis, 27 September 2012 | 15:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekitar 50.000 buruh yang berasal dari berbagai serikat buruh di Indonesia, antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Serikat Pekerja Indonesia, kembali berdemonstrasi di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mereka menuntut penghapusan sistem kerja *outsourcing* (tenaga luar) dan upah murah.

Para buruh mempertanyakan fungsi pejabat negara yang diam saja ketika hak-hak buruh ditindas oleh sistem tenaga luar dan upah murah. Massa demonstran yang berasal dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bekasi, dan Karawang, meminta Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk jangan lari dari tanggung jawab. Muhaimin diminta turun menemui demonstran untuk membela kepentingan buruh.

"Kami menuntut pemerintah untuk memberikan upah yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari para buruh. Selain itu kami juga menuntut pemerintah menghapuskan *outsourcing* karena dianggap menyengsarakan kehidupan para buruh," ujar koordinator aksi, Baris Silitonga, Kamis (27/9/2012).

Aksi ini dijaga sekitar 450 personel polisi. Mereka merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Brimob, Satuan Lalu Lintas Polri, dan Polres Metro Jakarta Selatan.

Editor :
Ana Shofiana Syatiri

Demo Buruh, Hindari Ruas Jalan Berikut Ini!

Penulis : Sabrina Asril | Kamis, 27 September 2012 | 10:58 WIB

AKARTA, KOMPAS.com - Elemen buruh se-Jabodetabek akan melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis (27/9/2012) ini. Sejumlah ruas jalan diperkirakan akan mengalami kemacetan. Oleh karena itu, warga Ibu Kota diimbau untuk menghindari ruas jalan yang diprediksi akan dilalui para buruh.

Wakil Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyono di Jakarta, mengatakan, pengendara diimbau mengindari ruas Jalan HR Rasuna Said arah Utara. Tepatnya di depan Kantor Kementerian Kesehatan dan Kedutaan Besar Belanda.

"Selain itu, Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Gatot Subroto arah Timur, Gedung Baharkam Mabes Polri di Jalan Trunojoyo arah Timur," ujar Wahyono dalam pesan singkatnya Kamis.

Ia menyarankan kepada masyarakat untuk menggunakan jalan alternatif menuju atau dari ruas jalan tersebut. Aparat kepolisian juga telah menyiapkan pengalihan arus pada ruas jalan tersebut ketika terjadi peningkatan jumlah massa pengunjuk rasa.

Berikut ini pengalihan arus yang disiapkan aparat kepolisian:

1. Jalur menuju Kantor Kemenkes dari arah Selatan ke Utara, tepatnya dari perempatan lampu merah Kuningan menggunakan jalur cepat atau Jalan Gilimanuk - Mega Kuningan, sedangkan dari Utara ke Selatan atau perempatan Cokro menuju perempatan Kuningan seperti biasa.

2. Jalur di depan Kantor Kemenakertrans arah Barat ke Timur Jalan Gatot Subroto dari perempatan Kuningan belok kanan menuju Jalan Rasuna Said - Kapten Tendean - Tegal Parang. Perempatan Kuningan belok Kiri menuju Jalan Rasuna Said - Casablanca - Jalan Ratu Harhari. Sedangkan dari arah Selatan ke Utara di perempatan Kuningan diluruskan menuju Rasuna Said - Kapten Tendean - Tegal Parang, serta perempatan Kuningan belak kanan seperti biasa.

"Jalur depan Baharkam Polri ada pengaturan arus lalulintas seperti biasa," ujar Wahyono.

Elemen buruh yang akan berunjuk rasa adalah Majelis Pekerja Buruh (MPBI). Mereka menuntut pemerintah menghapus seluruh jasa tenaga kerja tanpa pandang "bulu" dan tidak hanya menghentikan pengajuan izin *outsourching* baru. Selain itu, buruh mendesak pemerintah memberlakukan upah buruh sesuai dengan standar kriteria hidup layak di seluruh Indonesia.

Unjuk Rasa Buruh, Hindari Jalur Kemenkes dan Kemnakertrans

Penulis : Ratih Prahesti Sudarsono | Kamis, 27 September 2012 | 10:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Polda Metro Jaya mengimbau pengguna jalan agar menghindari ruas jalan menuju Kementerian Kesehatan di Jalan Rasuna Said, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Gatot Subroto, Kamis (27/9/2012). Hal itu terkait unjuk rasa buruh yang akan mendatangi tempat-tempat tersebut. Pengendara diminta menggunakan rute alternatif menuju ruas jalan tersebut.

Jika terjadi peningkatan konsentrasi massa di Kementerian Kesehatan, maka Direkrorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mengalihkan arus lalu lintas arah selatan ke utara dari traffic lihgt Kuningan. Pengendara hendaknya menggunakan jalur cepat atau Jalan Gilimanuk - Mega Kuningan. Adapun dari arah sebaliknya, dari traffic light Cokroaminoto ke traffic light Kuningan, tetap seperti biasa.

Jika terjadi konsentrasi massa di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, arah barat ke timur, Jalan Gatot Subroto, dari traffic light Kuningan belok kanan ke Jalan Rasuna Said - Jalan Kapten Tendean - fly over Tegal Parang. Dari traffic light Kuningan belok kiri ke Jalan Rasuna Said - Jalan Casablanca, Jalan Latuharhari.

Adapun arus lalu lintas dari arah selatan ke utara, Jalan Rasuna Said, dari traffic light Kuningan diluruskan ke Jalan Rasuna Said - Jalan Kapten Tendean - fly over Tegal Pasang. Sementara yang dari traffic light Kuningan belok kanan seperti biasa.

Editor :
Nasru Alam Aziz

Outsourcing Tak Dihapus, 10 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional

Kamis, 27 September 2012 | 12:34

Pada 3 Oktober mendatang sebanyak 2,8 juta buruh akan mengadakan mogok masal dan menutup sentra-sentra industri

Serikat buruh ancam akan melakukan mogok nasional dengan melibatkan 10 juta buruh jika sistem outsourcing tidak juga dihapuskan pada awal Oktober mendatang.

"Kami menuntut sistem outsourcing dihapuskan per 15 Oktober ini," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, di sela demonstrasi buruh di depan Kementerian Kesehatan, hari ini.

Dia mengatakan, pada 3 Oktober mendatang sebanyak 2,8 juta buruh akan mengadakan mogok masal dan menutup sentra-sentra industri.

Buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing dan upah murah serta menolak partisipasi buruh untuk membayar iuran jaminan kesehatan sebesar dua persen seperti yang diusulkan pemerintah.

Jika tuntutan penghapusan outsourcing tidak diindahkan, dan pemerintah tidak bisa memberikan jaminan per 1 januari 2014 semua warga negara mendapat jaminan kesehatan, maka sebanyak 10 juta buruh di 28 provinsi akan mengadakan mogok masal selama tujuh hari berturut-turut dan menutup 12 pintu tol di awal November.

Iqbal mengatakan aksi mogok masal tersebut diperkirakan akan melumpuhkan kegiatan industri nasional.

Iqbal mengatakan para buruh juga meminta pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah termasuk siapapun yang berpenghasilan sama dengan atau kurang dari Upah Minimum Terkecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mudhofir mengatakan pihaknya telah menyebar surat pemberitahuan kepada kaum buruh di 14 provinsi mengenai rencana mogok nasional tanggal 3 Oktober mendatang.

Mudhofir mengataka, yang akan mogok bukan hanya buruh di sentra industri tetapi juga di lokasi lain.

"Tuntutan kami adalah harga mati dan kami akan berdemonstrasi di semua tempat termasuk di DPRD, kantor walikota dan bupati," tegasnya.

2,8 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional 3 Oktober

Penulis : Luthfie Febrianto | Kamis, 27 September 2012 | 16:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Para Buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional pada 3 Oktober 2012 apabila tuntutan penghapusan sistem kerja *outsourcing*, menolak upah murah, dan pelaksanaan jaminan kesehatan tidak dikabulkan.

"Kami akan melakukan mogok bekerja yang Insya Allah akan kita lakukan pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2012, kalau tidak ada tanggapan dari pemerintah," kata Koordinator Aksi dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Baris Silitonga, saat aksi demo di kantor Kemenakertrans di Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Menurut Baris, tuntutan menghapus sistem *outsourcing* yang selama ini diberlakukan, karena tidak sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, mereka tidak ingin ada lagi buruh yang bekerja dengan sistem *outsourcing* di sektor nonformal, formal, manufaktur ataupun non manufaktur.

"Sebenarnya, Menteri (Menakertrans Muhaimin Iskandar) sudah mengeluarkan moratorium mengenai *outsourcing*. Namun hal itu justru mengecewakan kami karena hanya melarang perusahaan *outsourcing* yang baru, sedangkan yang sudah lama dan menyalahi aturan tetap diperbolehkan," sesalnya.

Mengenai upah murah, Baris meminta Menakertrans untuk memberi upah yang layak sesuai dengan kehidupan sehari-hari para buruh. Selain itu, pemerintah juga dituntut memberlakukan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Menurut undang-undang, 1 Januari 2014 seluruh warga negara Indonesia berhak menerima jaminan kesehatan, bukan pada tahun 2019 seperti yang disampaikan Presiden dalam nota APBN pada 16 Agustus lalu," kata Baris.

Baris menyebut aksi buruh di depan kantor Kemenakertrans Kamis (27/9/2012) ini merupakan aksi pemanasan sebelum aksi mogok nasional yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2012. Rencananya sekitar 2,8 juta buruh dari seluruh Indonesia akan melakukan mogok jika tidak ada respon dari pemerintah

BPK: Pengelolaan Data Jamsostek dan Askes Harus Diperbaiki

Kamis, 27 September 2012 | 15:44

BPK menilai, saat ini kedua institusi tersebut masih harus dibenahi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindentifikasi kesiapan proses pengalihan PT Jamsostek dan PT Askes bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan beroperasi pada 1 Januari 2014 dan 2015 mendatang.

BPK menilai, saat ini pengelolaan data kedua institusi tersebut harus dibenahi.

BPJS kesehatan merupakan hasil transformasi dari PT Askes (Persero) yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Adapun BPJS ketenagakerjaan merupakan hasil transformasi PT Jamsostek (Persero) yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja.

"Banyak isu penting, seperti administrasi dan pengelolaan data peserta, proses pengalihan aset, pegawai ke BPJS," ujar anggota VII BPK, Bahrullah Akbar, di Jakarta, hari ini.

Dalam segi administrasi dan pengelolaan data peserta, BPK akan melihat kesiapan BPJS melayani peserta yang jumlahnya jauh lebih banyak serta bagaimana keandalan sistem, infrastruktur TI dalam mutasi data.

Sedangkan proses pengalihan aset, dia menjelaskan, BPK akan menutup laporan keuangan PT Askes dan PT Jamsostek per 31 Desember 2013. Selain itu, BPK juga akan memisahkan aset dan liabilitas program PT Jamsostek dalam rangka penyerahan aset program Jaminan Kesehatan (JPK) ke BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, akan ada penggabungan program asuransi tunjangan hari tua (THT) PT Taspen dan PT ASABRI pada PTJamsostek. "Termasuk pengelolaan dana BPJS, investasi dan maksimalisasi bagi peserta," ujar dia

Dari hasil pemeriksaan BPK, Bahrullah menjelaskan, Jamsostek belum efektif dalam mengelola data peserta jaminan sosial tenaga kerja. Contohnya, data peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) tidak lengkap. Hal itu mencakup registrasi kepesertaan dan sistem informasi belum efektif.

"Kami juga menemukan bahwa PT Jamsostek tidak efektif memberikan perlindungan dengan membayarkan manfaat JHT kepada 1 juta peserta tenaga kerja usia pensiun dengan total saldo JHT sebesar Rp1,8 triliun," ujar dia

Terkait pemeriksaan laporan keuangan Bahrullah berpendapat, masih terdapat permasalahan dalam distribusi manfaat peserta. Contohnya, pembentukan program jaminan hari tua (JHT) PT Jamsostek sebesar Rp7,2 triliun tidak sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2004.

Sedangkan data kepesertaan PT Askes, menurut dia, belum handal dan belum dapat dijadikan dasar penagihan. Begitu halnya dengan penerimaan premi, masih belum optimal menyusul masih banyaknya pemda yang tidak taat ketentuan.

"Kami berharap setelah melakukan identifikasi ini, transformasi PT Jamsostek dan PT Askes akan lebih baik lagi sehingga tidak ada kelemahan, jadi ketika mulai berlaku tahun 2014 dan 2015 sudah benar benar baik," ujar dia
Penulis: ID/ Ridho Syukra/ Whisnu Bagus

Soal BPJS, Pemerintah Janji Bahas Tuntutan Buruh

Jumat, 28 September 2012 | 06:01

Akan membawa tuntutan buruh kepada Menteri Kesehatan dan delapan menteri terkait untuk dirumuskan di tingkat kelompok kerja.

Tuntutan buruh agar Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden untuk mendukung Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) segera diselesaikan dan dibawa kepada delapan menteri terkait.

"Hasil pertemuan kami dengan pejabat Kementerian Kesehatan, para dirjen dan direktur setuju dengan pandangan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia," kata Presiden KAJS, Said Iqbal, di Kementerian Kesehatan, Jakarta, hari ini.

Dia mengatakan, pemerintah berjanji akan membawa tuntutan buruh kepada Menteri Kesehatan dan delapan menteri terkait untuk dirumuskan di tingkat kelompok kerja pembuatan Rancangan Paraturan Presiden dan RPP tentang pelaksanaan BPJS Kesehatan.

Para demonstran yang diperkirakan mencapai 10.000 orang menuntut agar pemerintah menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat tanpa terkecuali pada 2014, dan bukan 2019.

Selain itu, para demonstran juga menuntut agar pemerintah membatalkan usulan yang menyatakan iuran jaminan kesehatan dibayar oleh pemberi kerja sebanyak tiga persen dari gaji, dan dua persen dipotong dari upah buruh.

Iqbal mengatakan, para buruh menuntut agar skema pembayaran tetap seperti sekarang, yakni iuran jaminan kesehatan dibayarkan oleh pemberi kerja sepenuhnya.

Sebelumnya Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, buruh harus tetap membayar iuran karena sesuai semangat Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) iuran harus ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.

Buruh mengatakan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi maka pada 3 Oktober akan ada aksi mogok nasional yang diikuti 2,8 juta orang buruh di sentra-sentra industri seluruh Indonesia.

Pemerintah Lambat Implementasikan UU BPJS

Jumat, 28 September 2012 | 06:02

Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, maka Kementerian Kesehatan tidak boleh lagi menyelenggarakan program Jamkesmas.

Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengkritisi pemerintah yang bergerak sangat lambat melaksanakan amanat UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Padahal hal itu adalah amanat konstitusi yang kemudian diturunkan dengan lahirnya UU SJSN dan UU BPJS.

Kedua UU tersebut meminta agar pemerintah sebagai penyelenggara negara, memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali.

"Maraknya kasus-kasus rakyat ditolak dari rumah sakit, menggambarkan betapa sistem kesehatan yang dijalankan oleh SBY tidak mematuhi apa yang seharusnya terjadi," kata Rieke di Jakarta, hari ini.

Pemerintahan SBY-Boediono justru selalu berkutat dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), yang menurut Rieke adalah "produk gagal".

"Hadirnya SJSN sejatinya mengoreksi kelemahan yang ada pada sistem sebelumnya, terutama jaminan kesehatan," tutur Politisi PDI Perjuangan itu.

Padahal, pada Januari 2014, UU BPJS jelas mengamanatkan Jaminan Kesehatan harus diterima oleh seluruh rakyat. Berdasarkan perintah UU BPJS, seluruh aturan turunan harus tuntas maksimal setelah UU tersebut diundangkan, artinya kurang lebih satu bulan lagi.

"Namun, hingga saat ini belum ada satu pun yang tuntas. Di sisi lain pemerintah justru telah menargetkan anggaran sebesar Rp25 triliun bagi Penerima Bantuan Iuran, padahal data penduduk saja belum ada yang akurat, hanya perkiraan," tuturnya.

Dia menjelaskan, sesuai amanat Konstitusi dan UU BPJS pasal 60 ayat (2), sejak beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, maka Kementerian Kesehatan tidak boleh lagi menyelenggarakan program Jamkesmas.

Yang seharusnya dijalankan adalah Jaminan Kesehatan untuk seluruh rakyat sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Uniknya, Pemerintah baru akan berencana melakukan uji coba pada 2014. Hal ini berarti, tenggat yang dipatok oleh UU justru tak dihormati.

Apabila memiliki niat yang baik, kata dia, pemerintah seharusnya menyelesaikan ujicoba pada 2013, sehingga pelaksanaan benar-benar terjadi di tahun berikutnya. "Uji coba *Universal coverage* harus dijalankan pada tahun 2013, bukan pada tahun 2014," kata Rieke.

Dia juga meminta pemerintah tidak main-main mengalokasikan dana untuk pelaksanaan SJSN melalui BPJS, dengan memastikan tambahan alokasi anggaran program kesehatan bagi rakyat tidak mampu.

"Hentikan dikotomi rakyat miskin yang dicover Jamkesmas dan Jamkesda. Seluruh anggaran kesehatan bagi rakyat miskin, yang kelak akan dikategorikan sebagai Penerima Bantuan Iuran, harus ditanggung APBN, tidak boleh dibebankan pada APBD," tegas Rieke.

Menurut dia, apabila pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran kesehatan, maka itu lebih untuk peningkatan pelayanan, memperbaiki infrastruktur kesehatan, dan tambahan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah.

Pengusaha Minta Pemerintah Atasi Mogok

Penulis : Hamzirwan | Senin, 1 Oktober 2012 | 21:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Amerika Serikat gencar mengundang investor asing menanamkan modal di Indonesia, pengusaha di dalam negeri malah resah menghadapi mogok buruh. Pengusaha tidak mempersoalkan rencana mogok sepanjang buruh tidak menyisir pabrik, memblokade jalur distribusi, dan mengintimidasi buruh yang memilih tetap bekerja.

Demikian disampaikan Koordinator Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Nasional (Forkan) Franky Sibarani dan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar, Senin (1/10/2012) di Jakarta. Forkan merupakan wadah komunikasi pengurus 22 asosiasi industri mulai pertekstilan, alas kaki, makanan dan minuman, sampai manufaktur.

Sampai sekarang pemerintah belum bersungguh-sungguh mengingatkan ke semua pihak yang akan mogok agar tidak memblokade jalan umum dan mengintimidasi orang yang bekerja. "Kami sangat khawatir, karena peristiwa 27 Januari 2012 sudah di depan mata dan kami tidak melihat ada langkah serius dari pemerintah mencegahnya agar jangan terulang," kata Franky.

Pengusaha menuntut pemerintah membenahi berbagai pekerjaan rumah yang berkait langsung dengan iklim investasi. Hal itu antara lain infrastruktur, jaminan energi, dan kebijakan anggaran yang tidak populis.

Mereka meminta pemerintah memastikan mogok buruh tidak sampai mengganggu proses produksi yang berkait langsung dengan ketepatan jadwal. Franky tidak melihat ada kesamaan promosi pemerintah terhadap investor di luar negeri dan realita iklim

investasi domestik berkait masalah keamanan investor untuk bisa bekerja dengan tenang sesuai aturan.

Sanny mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 menegaskan, kawasan industri adalah obyek vital yang tidak boleh ada blokade karena akan mengganggu arus lalu lintas logistik. Pengusaha di kawasan industri kini resah karena kerap pengepungan dan penyisiran pabrik, sampai pemaksaan pembuatan kesepakatan yang tidak sesuai norma ketenagakerjaan.

"Pada aksi 27 Januari 2012, kami sudah mengingatkan pemerintah agar menegakkan aturan dan jangan kalah kepada tekanan massa. Sekarang terbukti, mereka lebih memilih menggunakan aksi massa daripada berdialog," tutur Sanny.

Sedikitnya 500.000 buruh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), yang bergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) merencanakan mogok kerja di 21 kawasan industri pada Rabu (3/10/2012). Aksi ini mengusung tiga isu utama, yakni penetapan upah minimum sesuai angka kebutuhan hidup layak, penghapusan pekerja alih daya (*outsourcing*), dan iuran jaminan kesehatan.

15 Ribu Personel Polisi Jaga Aksi Buruh di Ibu Kota

Penulis : Lariza Oky Adisty | Senin, 1 Oktober 2012 | 19:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi mogok nasional ribuan buruh pada Rabu (3/10/12) mendatang telah siap diantisipasi oleh pihak kepolisian. Sekitar 15.000 personel diturunkan untuk mengamankan aksi tersebut di Ibu Kota Jakarta.

"Aksi mogok kerja terjadi di pabrik-pabrik tiap karyawan yang berpartisipasi, seperti di wilayah Jabodetabek dan Jababeka," terang Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar M Chairul Noor Alamsyah. saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin (1/10/12).

Menurutnya, tuntutan mereka masih sama, perihal pencabutan outsourcing serta penolakan upah murah. Lima belas personel keamanan yang dikerahkan, lima ribu di antaranya berasal dari TNI.

"Personel keamanan tersebar di seluruh wilayah, tidak ada pemusatan karena aksi dilakukan di tempat masing-masing. Untuk patroli, diserahkan ke polres masing-masing," imbuhnya.

Senada dengan Chairul, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menyatakan bahwa kepolisian akan mengamankan objek-objek vital seandainya aksi mogok buruh nanti meluas. Misalnya di Gedung DPR, Bandara Soekarno-Hatta, dan Istana Negara.

"Pihak kepolisian, termasuk juga dari Polda tidak akan underestimate dengan kemungkinan aksi mogok meluas ke tempat-tempat seperti jalan tol dan jalan umum,"

ujar Rikwanto.

"Karena itu secara teknis, plotting personel keamanan meliputi lokasi pemogokan, juga di pintu tol dan jalan umum agar aksi pemogokan ini tidak sampai mengganggu kegiatan masyarakat," tukas Rikwanto.

Selain pengerahan personel keamanan, pihak kepolisian juga mengadakan sejumlah tindakan antisipasi lain. Misalnya dengan pengalihan arus dan sweeping pengunjuk rasa jika berbuat anarkis.

Kepada para buruh, pihak kepolisian berharap aksi mereka tak mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat.

Aksi pemogokan buruh ini diprakarsai oleh Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) bergabung dengan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang akan dilakukan di Kawasan Industri & Lingkungan Sekitar Pabrik Pabrik di 12 Provinsi, 37 Kabupaten/Kota dan 745 perusahaan.

Adapun sasaran aksi mogok untuk Wilayah Polda Metro adalah:
1. Kawasan Industri Pulogadung Jaktim
2. KBN Cakung Jaktim & KBN Cilincing Jakut
3. Kawasan Industri Jatake Kota Tangerang
4. Kawasan Industri Kalisadi Tangerang
5. Kawasan Industri Manis Kota Tangerang
6. Kawasan Industri Jatiuwung Kota Tangerang
7. Kawasan Industri MM 2100 Kab Bekasi
8. Kawasan Industri Jababeka Kabupaten Bekasi
9. Kawasan Industri EJIB Kab Bekasi
10. Kawasan Industri Hyundai Kabupaten Bekasi
11. Kawasan Industri Delta Silikon Kabupaten Bekasi
12. Kawasan Industri Lipppo Kabupaten Bekasi
13. Kawasan Industri Gobel Kabupaten Bekasi

Diminta Tak Anarkis

Buruh: yang Anarkis Tuh Pemerintah

Penulis : Fabian Januarius Kuwado | Selasa, 2 Oktober 2012 | 20:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana mogok nasional yang dilakukan buruh pada Rabu (3/10/2012) besok, mengundang kekhawatiran banyak pihak. Warga khawatir demo menolak sistem *outsourcing* dan upah rendah di berbagai kawasan industri dan pusat kota itu akan berujung anarkis.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pun mengimbau aksi unjuk rasa para buruh tidak menyertakan aksi anarkis. Jika aksi para buruh berakhir rusuh, kondisi tersebut dapat berimbas negatif bagi stabilitas keamanan dan ekonomi.

"Saya imbau besok buruh tidak melakukan aksi-aksi yang membahayakan ekonomi kita. Semua tuntutan buruh sudah terakomodir dalam dialog sebelumnya," ujarnya kepada wartawan saat, melakukan sidak di Pasar Regional Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (2/10/2012).

Menurut menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, kementeriannya sudah melakukan pertemuan dengan buruh terus menerus. Ia pun turut berharap agar para buruh tidak melakukan aksi unjuk rasa dan mengedepankan dialog secara terbuka, baik terkait *outsourcing* maupun upah minimum.

Menanggapi pernyataan Muhaimin itu, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, pada dasarnya, buruh tidak pernah melakukan aksi anarkis. Justru, pemerintah lah yang melakukan aksi anarkis melalui berbagai kebijakan kontra buruh.

"Sebenarnya yang anarkis itu pemerintah karena melakukan kebijakan yang melanggar hak buruh. Hapus sistem kontrak dan tetapkan standar upah layak, selesai sudah masalahnya," tegas Nining, saat ditemui terpisah di sekretariatnya, Jl Cipinang Kebembem, Pulogadung, Jakarta Timur.

Rencananya, puluhan ribu buruh akan melakukan mogok nasional. Aksi tersebut akan dilakukan di kawasan industri Pulogadung dan Cakung, Marunda, Tanjung Priok, Penjaringan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat.

Sementara di Bundaran HI, Jakarta Pusat, dari catatan Humas Polda Metro Jaya, setidaknya sebanyak lima ribu masa akan bergerak di pusat kota. Tak hanya itu, tiga ribu buruh juga akan bergerak menuju DPRD Kota Depok untuk mengadakan unjuk rasa menuntut penghapusan *outsourcing* dan upah murah.

Esok, 3 Juta Buruh Siap Mogok!

Penulis : Aditya Revianur | Selasa, 2 Oktober 2012 | 19:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyampaikan sekitar 3 juta buruh di seluruh Indonesia siap melakukan aksi mogok massal di beberapa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu esok (3/10/2012). Massa akan berunjuk rasa menuntut upah yang layak berkeadilan sesuai dengan upah minimum provinsi, dan penghapusan sistem outsourcing.

"Aksi mogok nasional akan dilaksanakan Rabu esok dari jam sembilan pagi sampai enam sore. Kami akan melakukan mogok kerja atau stop produksi di delapun puluh kawasan atau sentra industri di dua puluh satu kabupaten," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal saat dihubungi, Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Iqbal merinci, di luar 80 kawasan industri, massa buruh akan melakukan aksi di kantor DPRD seluruh Indonesia yang antara lain mencakup DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua, Sulawesi Utara, Gorontalo dan lainnya. Ia menjelaskan, aksi

buruh yang terbesar dipusatkan di tujuh kawasan industri di Bekasi, khususnya Kawasan Ejip dengan massa 500 ribu orang.

"Masyarakat diimbau untuk menghindari lokasi-lokasi tempat aksi mogok massal buruh tersebut. MPBI memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia bila terganggu kenyamanannya dan terjebak macet," terangnya.

Ia menyatakan, untuk wilayah Jabodetabek, buruh beraksi di sekitar Pulogadung, Sunter, KBN Cakung, Tanjung Priok, Tol Bekasi Barat, Bekasi Timur, Cibitung, Tambun, Bantar Gebang, Cikarang, Karawang Barat, Karawang Timur, Jatake, Cikupa, Balaraja, Serpong, Jalan Raya Bogor, Simpang Depok, Citereup, Gunung Putri, dan Wanaherang.

Para pengguna jalan diimbau menghindari area tersebut untuk menghindari kemacetan.

Editor :
Hindra

'Getok Monas,' KASBI Aksi di Kawasan Industri

Penulis : Fabian Januarius Kuwado | Selasa, 2 Oktober 2012 | 16:20 WIB

AKARTA, KOMPAS.com - Ribuan buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), berencana melakukan aksi mogok nasional, Rabu, 3 Oktober 2012. Aksi yang bertajuk Gerakan Tiga Oktober-Mogok Umum Nasional atau 'Getok Monas', tidak melakukan aksi di pusat kota, namun di kawasan industri.

"Kami akan melakukan pemogokan umum nasional tanggal 3 Oktober 2012. Kemungkinan tidak di pusat kota, tapi di kawasan industri," ujar Nining Elitos, Ketua Umum KASBI kepada *Kompas.com* di kantornya, Selasa (2/10/2012) siang.

Aksi itu rencananya akan dilakukan di kawasan industri Pulogadung dan Cakung, Jakarta Timur ; Marunda, Tanjung Priok, Penjaringan, Jakarta Utara ; Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat. Nining melanjutkan, pemilihan lokasi aksi tersebut didasarkan pada skala masifnya aksi mogok para buruh.

Aksi tersebut, menurut Nining, masih dalam bentuk peringatan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan, agar meluas hingga di pusat kota. Dengan demikian aksi tersebut menjadi pendorong pemerintah agar mengakomodasi para buruh.

"Mogok nasional ini juga tidak datang begitu saja. Ada pelanggaran dari perusahaan, kami tetap menggunakan proses hukum kepada pengusaha nakal. Ini yang mengakumulasi kawan-kawan menyepakati 3 Oktober 2012," ujarnya.

Dalam aksi Getok Monas esok hari, para buruh akan menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan tenaga kerja *outsourcing*. Tak hanya itu, para buruh juga menuntut upah yang layak dan adil sesuai dengan upah minimum provinsi. Sementara, terkait penerapan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 65 Tahun 2003 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Nining mengatakan, pihaknya menolak

peraturan itu. Menurut dia, peraturan tersebut tetap hanya mengakomodasi kepentingan perusahaan dari pada buruh.

Tercatat Sekitar 23.000 Buruh yang Mogok Kerja

Penulis : Lariza Oky Adisty | Selasa, 2 Oktober 2012 | 15:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 23.000 buruh akan ikut serta dalam aksi mogok kerja, Rabu (3/10/12) besok. Rencananya, aksi pemogokan ini akan berlangsung dari pukul 08.00 hingga pukul 12.00 WIB di tempat kerja masing-masing. Dari 23 ribu buruh ini terbagi menjadi empat kelompok.

"Dari wilayah DKI Jakarta ada 5.000 massa, Tangerang 5.000 massa, Bekasi 10.000 massa dan Depok 3.000 massa. Semua memiliki titik kumpul masing-masing," terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Selasa (2/10/12) di Mapolda Metro Jaya.

Lima ribu massa di DKI Jakarta direncanakan akan bergerak menuju Bundaran HI dan Istana Presiden, sementara tiga ribu massa Depok akan bergerak menuju DPRD Kota Depok untuk mengadakan unjuk rasa menuntut penghapusan *outsourcing* dan upah murah.

Menurut Rikwanto, tindak unjuk rasa tersebut merupakan hal yang wajar. Menyampaikan pendapat di depan umum telah dilindungi undang-undang.

"Namun kita sama-sama koordinasi agar jangan sampai terjadi tindak anarkisme atau mengganggu aktivitas masyarakat," jelasnya.

Ia juga menegaskan adanya koordinasi antara pihak kepolisian dengan tiap-tiap koordinator lapangan di tiap wilayah.

"Para peserta mogok kerja sudah menyiapkan korlap yang berpakaian beda, nanti mereka yang akan mengatur agar peserta tetap bisa tertib di kawasan masing-masing. Nanti polisi akan berkoordinasi dengan para korlap ini," pungkasnya.

Adapun titik-titik kumpul peserta mogok kerja di DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok adalah:

-Kawasan Industri Kebun Cilincing.
-Kawasan Industri Pulogadung.
-Pos IX Pel. Tanjung Priok.
-PT Frisian Flag Tangerang.
-Kawasan Industri Jatake.
-Kawasan Industri Kalisade.
-Kawasan Industri Manis.
-Kawasan Industri Jatiuwung.
-Kawasan Industri Batuceper Bekasi.

-PT Daelim Jababeka.
-PT AHM MM 2100.
-PT Kalbe Farma Lippo.
-PT Sanyo Cibitung Depok.
-Perusahaan/pabrik Wilayah Sukmajaya, Jl Raya Bogor -Perusahaan/pabrik Wilayah Cimanggis Jl Raya Bogor.

Demo Buruh, Inilah Rute Alih Arus di Sekitar Jababeka!

Penulis : Sabrina Asril | Selasa, 2 Oktober 2012 | 14:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Elemen buruh akan melakukan aksi unjuk rasa menuntut penghilangan sistem *outsourcing* pada Rabu (3/10/2012). Sekitar 23.000 buruh akan melakukan mogok kerja dan berunjuk rasa di Jakarta, Bekasi, dan Depok.

Di Jakarta, konsentrasi massa akan ada di sekitar bundaran Hotel Indonesia dan Istana Presiden. Sementara di Depok, massa akan terkonsentrasi di gedung DPRD Kota Depok.

Titik paling banyak ada di Bekasi. Ada tujuh lokasi unjuk rasa, yakni Kawasan Industri MM 2100, Kawasan Industri Jababeka, Kawasan Industri Ejip, Kawasan Industri Hyundai, Kawasan Industri Delta Silikon, Kawasan Industri Cikarang, dan Kawasan Industri Gobel.

Di lokasi-lokasi itu diperkirakan akan terjadi kepadatan massa. Oleh karena itu, polisi menyiapkan rute alih arus di sekitar Jababeka.

Masyarakat diminta menghindari titik kumpul massa di gerbang tol Cikarang Barat dan EJIP. Berikut rute alih arus di sekitar Jababeka:

1. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke Cibitung Kawasan Jababeka I - Pertigaan Jababeka II - Bundaran Patung Kuda - Perempatan Pecenongan - Kawasan Jababeka II Blok FF - Jalan Inspeksi Kalimalang - Bundaran Pertamina Tegal Gede - Arah Cibitung via Jalan Inspeksi Kalimalang (atau bisa langsung mengambil alternatif melalui jalur pantura).

2. Untuk kendaraan yang akan mengarah tol via Pintu Tol Cikarang Pusat Kawasan Jababeka I - Pertigaan Jababeka II - Bundaran Patung Kuda - Perempatan Pecenongan - Kawasan Jababeka II Blok FF - Jalan Inspeksi Kalimalang - Tegal Danas - Delta Mas --Pintu Tol Cikarang Pusat

3. Untuk kendaraan yang akan mengarah Lippo Cikarang Kawasan Jababeka I - Pertigaan Pasir Gombong - Perempatan Jurong - Bundaran Jababeka Golf - Pertigaan Movieland - Jalan Cilemahabang - Jalan Inspeksi Kalimalang - Jembatan Cibatu - Bundaran Jalan Sriwikaya Lippo Cikarang.

Apindo Imbau Perusahaan Tetap Buka

Selasa, 2 Oktober 2012 | 14:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengimbau perusahaan untuk tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa pada 3 Oktober 2012 besok.. Hal ini dikemukakan jajaran petinggi Apindo terkait rencana aksi mogok buruh nasional Rabu (3/10/2012).

"Namun demikian keputusan akhirnya terkait kebijakan dimaksud diserahkan sepenuhya kembali kepada perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masing-masing," sebut Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita dalam siaran pers yang diterima *Kompas.com*, Selasa (2/10/2012).

Suryadi menyatakan, pihaknya juga mengimbau perusahaan untuk mengupayakan Lembaga Kerjasama (LKS) bipartit dengan serikat pekerja masing-masing, agar pekerja tidak turut serta dalam kegiatan mogok nasional. "Sehingga tidak mengganggu operasional perusahaan dan tetap menjaga untuk tetap kondusif," tambah dia.

Terkait pengamanan, ia menambahkan, kepolisian dalam hal ini Kapolri dan Wakapolda sudah menyetujui permintaan Apindo untuk melakukan pengamanan kepada perusahaan, untuk menghindari tindakan sweeping, penyanderaan maupun intimidasi.

Sebelumnya para buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional pada 3 Oktober 2012 apabila tuntutan penghapusan sistem kerja *outsourcing*, menolak upah murah, dan pelaksanaan jaminan kesehatan tidak dikabulkan.

Polri Imbau Unjuk Rasa Buruh Tak Ganggu Kepentingan Publik

Penulis : Ferry Santoso | Selasa, 2 Oktober 2012 | 14:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengimbau para buruh yang ingin berunjuk rasa tetap dapat menjaga ketertiban, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas. Unjuk rasa buruh besok diperkirakan akan terjadi di 12 propinsi, 37 kabupaten/kota, dan melibatkan 745 perusahaan.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar Agus Rianto di Jakarta, Selasa (2/10/2012). "Kita berharap para pengunjuk rasa mematuhi aturan, dan tidak boleh menganggu ketertiban umum," kata Agus.

Aparat kepolisian, khususnya di tingkat wilayah, lanjut Agus, siap memfasilitasi komunikasi antara buruh dan pihak perusahaan. Dengan demikian, unjuk rasa tersebut dapat terlaksana sesuai dengan keinginan bersama.

Editor :
Agus Mulyadi

Buruh Alih Daya

Mogok Kerja Besok Hanya Setengah Hari

Penulis : Ratih Prahesti Sudarsono | Selasa, 2 Oktober 2012 | 13:45 WIB

AKARTA, KOMPAS.com — Ribuan buruh yang akan mogok kerja pada Rabu (3/10/2012) besok direncanakan hanya setengah hari, yakni mulai dari pukul 08.00 sampai pukul 12.00 WIB atau sampai menjelang makan siang.

"Informasi yang kami terima, akan ada 23.000 buruh, dari ratusan ribu buruh di Jadetabek (Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi), yang akan melaksanakan mogok kerja, di tempat kerja masing-masing," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Selasa (2/10/2012) siang.

Ia menambahkan, setelah mogok kerja, buruh akan bekerja kembali.

Namun, lanjut Rikwanto, ada juga yang akan melanjutkan unjuk rasa di Jakarta, yakni di sekitar Bundaran HI, Istana Negara, dan Monas. Informasi yang diterima kepolisian, yang akan ke Jakarta itu 10.000 orang.

"Harapan kami, mereka melaksanakan haknya itu dengan tertib, dan tidak perlu sampai meninggalkan tempat mereka bekerja," imbau Rikwanto.

Editor :
Agus Mulyadi

AKSI MOGOK

Menakertrans: Mau Demo Apa Lagi?

Penulis : Fabian Januarius Kuwado | Selasa, 2 Oktober 2012 | 13:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menegaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan terkait dengan tuntutan buruh menghapus *outsourcing*. Hasilnya, perusahaan tidak boleh mempekerjakan buruh *outsourcing* pada proses produksi langsung.

"Berdasarkan dialog dengan serikat pekerja sudah mencapai kesimpulan. Semua pekerjaan *outsourcing* harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13. Jadi, kalau sudah sepakat, mau demo apa lagi," ujarnya dalam survei di Pasar Regional Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (2/10/2012).

Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut menambahkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 65 memperbolehkan sebuah perusahaan mempekerjakan pekerja kontrak atau *outsourcing* dalam lima bidang pekerjaan, yaitu *cleaning service,* keamanan, katering, transportasi, jasa migas, dan pertambangan.

Menurutnya, peraturan tersebut telah diputuskan berdasarkan pembicaraan dengan banyak pihak, mulai dari buruh, pemerintah, akademisi, dan pakar. Untuk itu, Muhaimin berharap kepada para buruh untuk lebih menggunakan pembicaraan terbuka ketimbang aksi demonstrasi.

"Kepada teman-teman seluruh serikat buruh untuk menggunakan pembicaraan terbuka, baik menyangkut *outsourcing* maupun upah minimum," lanjutnya.

Rencananya, tanggal 3 Oktober 2012 besok, sekitar dua juta buruh dari berbagai konfederasi akan melakukan aksi mogok nasional. Unjuk rasa tersebut rencananya dilakukan di masing-masing kawasan industri, misalnya Cakung dan Pulogadung. Para buruh menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan upah murah.

Editor :
Erlangga Djumena

Demo Massal Buruh Hari Ini, Ini Daftar Lokasinya

Jika menganggu fasilitas umum dan tutup jalan tol akan ditindak.
Rabu, 3 Oktober 2012, 06:33

VIVAnews - Ribuan buruh se-Jabodetabek akan melakukan aksi unjuk rasa dan mogok massal hari ini, Rabu 3 Oktober 2012.Kepolisian Daerah Metro Jaya mengimbau pengunjuk rasa melakukan aksi secara damai, tidak merusak dan tidak mengganggu fasilitas umum.

"Kami imbau mogok kerja tidak berkembang dan mengganggu aktivitas publik, seperti menutup akses tol dan lainnya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto kepada *VIVAnews*, Selasa malam 2 Oktober 2012.

Rikwanto menegaskan, bila dalam aksi demonstrasi nanti terjadi perusakan dan penutupan akses atau jalan tol, maka kepolisian tidak segan-segan mengambil tindakan tegas. "Kalau buruh tidak menghiraukan imbauan tersebut maka akan kami ambil tindakan tegas," katanya.

Sebanyak 15 ribu personel gabungan yang terdiri dari 10.000 polisi dan 5.000 anggota TNI siap diterjunkan untuk mengamankan beberapa titik aksi unjuk rasa.

Berikut sasaran aksi Mogok untuk Jakarta dan sekitarnya:

1. Kawasan Industri Pulogadung Jaktim
2. KBN Cakung Jaktim & KBN Cilincing Jakut
3. Kawasan Industri Jatake Kota Tangerang
4. Kawasan Industri Kalisadi Tangerang
5. Kawasan Industri Manis Kota Tangerang
6. Kawasan Industri Jatiuwung Kota Tangerang
7. Kawasan Industri MM 2100 Kab Bekasi
8. Kawasan Industri Jababeka Kab.Bekasi
9. Kawasan Industri EJIB Kab Bekasi
10. Kawasan Industri Hyundai Kab.Bekasi
11. Kawasan Industri Delta Silikon Kab.Bekasi
12. Kawasan Industri Lipppo Kab.Bekasi

13. Kawasan Industri Gobel Kab Bekasi

Aksi mogok massal tak hanya digelar di Jakarta dan sekitar, tapi juga di seluruh provinsi dan diikuti sekitar tiga juta buruh. Mogok kerja nasional ini menuntut penghapusan outsourcing dan tolak upah murah.

Traffic detour due to massive strike

The Jakarta Post, Jakarta | Jakarta | Wed, October 03 2012, 11:28 AM

The Jakarta Police have called on commuters to avoid main roads throughout the city and to find alternative routes on Wednesday due to massive strikes by labor unions.

Workers would march from the Hotel Indonesia traffic circle to the Presidential Palace circle from around 10 a.m. to 12.a.m. They plan to move on to the Health Ministry on Jl. Rasuna Said at 1 p.m. and continue to the Manpower and Transmigration Ministry Office on Jl.Gatot Subroto. The strike will end around 6 p.m.

Commuters should avoid:
Frisian Flag factory in Pasar Rebo
Gate 9 of Tanjung Priok port in North Jakarta
Health Ministry office, Jl Rasuna Said
Hotel Indonesia (HI) traffic circle, Jl. Thamrin
Jl South Medan Merdeka
M1 and P1 gates of the Soekarno-Hatta airport in Cengkareng
Manpower and Transmigration Ministry, Jl Gatot Subroto
PT Kawasan Berikat Nusantara factory in Cilincing, East Jakarta
Pulo Gadung Industrial district in East Jakarta
Roads heading to the Presidential Palace, Jl. North Medan Merdeka
The House of Representatives building, Jl Gatot Subroto

About 5,000 workers from the capital, 5,000 from Tangerang, 3,000 from Depok and 10,000 from Bekasi are expected to stage rallies to demand an increase in the minimum wage and the elimination of the outsourcing employment systems.

The strike is part of action by 2.8 million workers on 80 industrial estates nationwide.

The police said that if the number of protesters escalated around the Presidential Palace, HI traffic circle and the House building, there would be detours. Here are some alternative routes.
Presidential Palace:
a. From Jl. Hayam Wuruk in Harmoni:
1. Jl. S Pranoto to Jl. Cideng to Jl. Tanah Abang
2. Jl. Juanda to Jl. Veteran or Jl. Kathedral
b. From Jl. Thamrin:
1. Jl. Wahid Hasyim or Jl. Kebon Sirih to Jl. West Cideng to Jl. Suryo Pranoto

2. Jl. Kebon Sirih or Jl. South Medan Merdeka to JL. MR. Rais to Jl. East Medan Merdeka to Jl. Perwira
3. Jl. Budi Kemuliaan to Jl. East Tanah Abang to Jl. Abdul Muis
House of Representatives building:
a. From Semanggi:
1. Semanggi to Jl Gerbang Pemuda to Jl. Gelora to Jl. Gelora 1 or Jl. North Palmerah
b. From Jl. Sisinga Mangaraja or Jl. Sudirman:
1. Jl. Asia Afrika or Jl. Pintu 1 Senayan to Jl. Asia Afrika to Jl. Gelora to Jl. Gelora 1 or Jl. North Palmerah
c. From Jl. S. Parman:
1. Jl. Pejompongan to Jl. Penjernihan or Jl. Gelora 1
HI traffic circle:
a. From Jl. Sudirman
1. Jl. Teluk Betung to Jl. Kebon Kacang or Dukuh Atas to Jl. Kendal
b. From Jl. Sudirman
1. Dukuh Atas to Jl. Tanah Abang to Jl. Galunggung. (cor/aml)

Number of protesters less than expected

The Jakarta Post, Jakarta | Jakarta | Wed, October 03 2012, 6:50 PM

The number of protesters in Jakarta on Wednesday - the day dubbed ‘national labor protest day’ - turned out to be less than organizers expected.

Around 1,000 workers gathered in front of the Jakarta City Council office on Jl. Kebon Sirih, instead of congregating in front of the Presidential palace as previously planned.

They did not march on the main streets of the capital.

Field coordinator Mustopo said that the strike was not centered in one location. Only workers from Central Jakarta and West Jakarta went to the downtown Jakarta, while workers in North Jakarta and East Jakarta flocked to Pulogadung. “Workers in industrial districts like Bekasi, Tangerang and Depok staged protests in their working areas,” he said.

Some 5,000 workers from the capital, 5,000 from Tangerang, 3,000 from Depok and 10,000 from Bekasi were expected to stage rallies in various areas on Wednesday.

The Jakarta Police had prepared around 15,000 personnel to guard the city, especially at strategic sites such as in front of the Presidential Palace on Jl. North Medan Merdeka, the Hotel Indonesia traffic circle on Jl. Thamrin as well as the House of Representatives building on Jl. Gatot Subroto.

The police said that there was no plan to detour the traffic on Jakarta's protocol roads. (cor/aml)

More Than 2 Million Workers Strike in Indonesia

October 03, 2012

Jakarta globe. Indonesian unions say more than 2 million factory workers have gone on a one-day strike across the country to call for higher wages and protest the hiring of contract workers.

National police spokesman Col. Agus Rianto says hundreds of thousands of laborers from more than 700 companies at 80 industrial estates took to the streets in protest Wednesday.

Yoris Raweyai, chairman of the Confederation of Indonesian Workers' Union, says workers want the government to revise a law allowing companies to hire temporary workers on one-year contracts without benefits — a practice called "outsourcing" in Indonesia.

Indonesia's Constitutional Court ruled in January that the hiring practice is unconstitutional and violates workers' rights.

"The [protest's] agenda is to ask for the abolition of the outsourcing system in recruiting workers, [and demand a] pay hike and health security for all workers [by] 2014, instead of 2019 as planned by the government," Said Iqbal, chairman of the Indonesian Labor Assembly (MPBI) said.

About 23,000 workers planned to march in Jakarta on Wednesday afternoon, and some 15,000 police were expected to be deployed to safeguard the rally. In Jakarta, workers on strike conducted sweeps of factories throughout the metro area, pulling other workers to the protest lines. Most companies in greater Jakarta were forced to close on Wednesday.

More than 2,000 protestors rallied in front of the Jakarta Legislative Council (DPRD) in Kebon Sirih, as traffic ground to a halt in many Central and South Jakarta neighborhoods. Additional protests took place at the Hotel Indonesia traffic circle, at the National Monument (Monas) and outside the offices of the Ministry of Manpower and Transmigration and the Ministry of Health.

Other protests included demonstrations in Bogor, Depok, Tangerang, Cilegon, Karawang, Sukabumi, Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Batam, Medan and Makassar.

Protestors in Makassar likened contract work to modern-day slavery.

"[The] system causes big losses to the workers," said Andi Mallanti, of the South Sulawesi chapter of the Indonesian Workers Welfare Union (SBSI). "The workers are not known by the company, they work through a third party [and can] be fired without compensation."

In Batam, some 25,000 workers surrounded the Batam mayor's office in protest. In Bekasi, demonstrators caused police to close the toll road exit in West Cikarang.

"We're not robots that they can treat the way they like," Ralenti, one of the protesters, said. "Treat us like a humans, give us proper wages and health insurance."

In Depok, protestors caused gridlock along Jalan Raya Bogor. In Bandung, they sung Dangdut and Sundanese songs and danced during the demonstration.

The Indonesian Chamber of Commerce (KADIN) urged the government to stand with local business leaders, explaining that contract workers are necessary part of doing business in Indonesia.

"There are many big banks such as Bank Mandiri, BRI or Citibank that implement outsourcing but never had problem with it," Fahmi Idris, advisory board chairman of KADIN, said. "After the contract ends, the worker returns to the outsourcing company as permanent employee. They are misunderstanding the outsourcing practice and I think it is inappropriate to ban it."

Businesswoman Mooryati Soedibyo, also a member of the KADIN advisory board, said the government needed to listen to both sides.

"Let's create win-win solution," she said. "Business people should be given easy access in doing business, while workers' demands for welfare improvement should also be implemented."

Ratusan Buruh Tangerang Blokir Jalan Raya Serpong

Rabu, 03 Oktober 2012 | 09:59

Pemblokiran jalan raya Serpong oleh ratusan buruh Tangerang akibatkan kemacetan panjang dari arah Serpong menuju Kota Tangerang.

Ratusan buruh dari PT Surta Toto itu, berkumpul di depan pabrik sejak pukul 07.00 WIB hari ini dengan pengawalan ketat dari Polres Metro Tangerang.

Berkumpulnya para buruh yang sebagian besar menggunakan sepeda motor, membuat kemacetan dari arah Serpong menuju Kota Tangerang. Hampir seluruh bagian ruas jalan digunakan untuk memarkir kendaraan sebelum berangkat menuju pusat Kota Tangerang dan bersatu dengan buruh dari pabrik lainnya.

"Kami nanti akan bergabung dengan buruh lainnya dari berbagai aliansi dan menentukan satu tujuan dengan target penolakan upah murah dan penghapusan sistem kerja kontrak," kata Sukri, salah seorang buruh.

Dilaporkan, kemacetan lalu lintas juga terjadi di Jalan Raya Serang yang menghubungkan antara wilayah Tigaraksa dan Balaraja. Para buruh dari berbagai pabrik, berkumpul untuk

melakukan sweeping ke sejumlah kawasan industri.

"Kita sweeping dulu ke sejumlah kawasan lalu kita akan bergabung di satu tempat dengan buruh lainnya sebelum menggelar orasi," kata Koswari, koordinator buruh.

Akan ada 27 titik wilayah yang dijadikan sebagai lokasi berkumpulnya buruh yang mogok, yakni kawasan Kawasan Industri Balaraja, Kawasan Industri Olek, Kawasan Industri Cikupa Mas, Kawasan Industri Pasar Kemis, Kawasan Industri Manis, Kawasan Industri Milenium Tigaraksa, Kawasan Industri Jabalrud dan Kawasan Industri Bunder. Jati Uwung, Karawaci, Batu Ceper, Surya Darma, Cikupa, Tiga Raksa, Balaraja hingga di Ciputat.

Ketua Umum KSPSI Imam Sukarsa mengharapkan seluruh perusahaan untuk dapat menghapuskan sistem kerja kontrak. Pihaknya juga meminta Disnakertrans dapat membuat peraturan upah layak kepada kaum buruh.
Penulis: Antara/ Nadia Felicia

Truk Kontainer Tidak Mogok, Buruh Pecahkan Kaca

Rabu, 03 Oktober 2012 | 15:34

Unjuk rasa di di Pelabuhan Tanjung Priok berlangsung ricuh. Para pendemo memecahkan kaca depan truk kontainer.

Dua pengunjuk rasa dari Buruh Jakarta Bersatu (BJB) diamankan pihak kepolisian karena merusak dan memecahkan kaca depan sebuah truk di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ketua Umum Ketua Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI), Ilhamsyah, Rabu menyebutkan, pihaknya menyetop truk kontainer tersebut karena mereka sudah mengimbau agar truk kontainer untuk tidak beroperasi pada hari ini.

"Kita semua sudah menyuruh angkutan trailer untuk berhenti beroperasi kalau masih ada truk yang beroperasi maka mereka tidak mendengar ajakan kami. Makanya kami dan kawan-kawan menyuruh berhenti," terangnya.

Demonstrasi yang digelar ribuan buruh di depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok berlangsung ricuh. Ada pun pemicunya, saat para pendemo mulai merusak dengan memecahkan kaca depan truk kontainer. Akibat aksi itu, pihak kepolisian mengamankan dua orang yang diduga sebagai pelakunya.

Tak terima rekannya dibawa polisi, aksi buruh pun semakin menjadi-jadi memprotes rekan seprofesinya itu diamankan pihak berwajib. Tak hanya itu, para pendemo pun sempay melempari truk menggunakan batu dan botol air mineral, memecahkan kaca truk menggunakan bambu panjang saat truk tersebut melintasi para pendemo.

"Kalau seandainya kawan kita tidak dikembalikan ke sini, kita yang akan menjemput bersama-sama di Polres Metro Jakarta Utara," ujar Ilhamsyah Menurut Ilhamsyah, pihaknya memberikan waktu selama 20 menit kepada pihak kepolisian agar mengembalikan rekannya tersebut. Sebab bila tidak, pihaknya mengancam akan bertindak dengan mengerahkan jumlah massa lebih besar lagi.

"Kami tidak mau anarkis, tolong dibantu pak Kapolres," katanya. Diungkapkan Ilhamsyah, hari ini Buruh Jakarta Bersatu (BJB) yang terdiri dari 19 serikat buruh dan pekerja di Jakarta melakukan aksi serentak di setiap kawasan- kawasan industri di Indonesia.

"Hari ini para buruh bersatu menuntut pemerintah untuk menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing, menuntut diberikan upah layak buruh, memberikan layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Itu tuntutan nasional bagi kaum buruh. Jika pemerintah tidak mau mendengarkan ini, nantinya kami akan menggelar aksi yang lebih besar," katanya.

Kapolres Tanjung Priok AKBP Asep Syafrudin menuturkan, pihaknya mengerahkan sebanyak 360 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, dan Polres Tanjungpriok untuk mengamankan jalannya aksi buruh.

"Di depan pintu pelabuhan Tanjungpriok kita jaga supaya mereka tidak masuk. Mereka hanya orasi di depan pelabuhan. Aktivitas pelabuhan tetap berjalan, karena dari 9 pintu yang ada, hanya satu pintu ditutup untuk demo, dan 8 pintu lainnya masih aktif. Untuk masalah buruh yang ditangkap, mereka kini diamankan di Polres Metro Jakarta Utara," tandasnya.

Kadin: Perusahaan Besar Butuh Outsourcing

Rabu, 03 Oktober 2012 | 12:56

Selama pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pengusaha, nasib buruh tidak akan meningkat.

Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Fahmi Idris mengharapkan pemerintah mampu menjadi partner pengusaha dalam menciptakan dunia usaha yang nyaman dan aman, termasuk nasib para buruh.

Perusahaan besar masih membutuhkan tenaga kerja *outsourcing.*

"Demo buruh telah mengganggu iklim dunia usaha, harus segera disikapi," kata Fahmi, di sela-sela Rapimnas Kadin di Yogyakarta, Rabu (3/10).

Menurut Fahmi, tuntutan penghapusan tenaga kerja outsourcing (alih daya) dan kenaikan upah sesunguhnya sudah diatur dalam UU 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Namun jika dampaknya bagi dunia usaha cukup signifikan, Fahmi menegaskan, pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mampu menjembatani

pekerja, pengusaha hingga regulasi perusahaan secara universal.

Pada dasarnya, kata Fahmi, setiap tenaga kerja memiliki induk perusahaan awal atau pihak yang mendistribusikan tenaga kerja, sehingga perusahaan besar memanfaatkan sesuai jenis pekerjaannya.

"Contoh misal, buruh bangunan. Setiap pekerjaan selesai, maka kontraktror akan menyudahi hubungan kerja, sebaliknya buruh tetap kembali kepada mandor yang merekruitnya. Artinya, kondisi ini biasa saja. Dan memang ada kondisi khusus yang tidak layak dalam pemberlakuan *outsourcing*," kata mantan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.

Sementara itu, kata Fahmi, Kadin juga mendukung usulan untuk pemerataan ekonomi, melalui pola pengembangan usaha ke daerah.

Anggota Penasehat Kadin Mooryati Soedibyo berharap agar pemerintah mau mendengar dua pihak, pengusaha dan juga pekerja. Selama pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pengusaha, nasib buruh tidak akan meningkat.

"Jangan hanya menekan pengusaha, tetapi mari sama-sama menciptakan win-win solution. Pengusaha juga diberi kelonggaran dalam berusaha, dan tentunya tuntutan buruh akan peningkatan kesejahteraan bisa diwujudkan," katanya.

Mooryati mengatakan, selama ini pengusaha dirugikan dengan kondisi seperti saat ini, misalnya aksi buruh besar-besaran dan memblokir jalan umum.

"Kan ini sama saja dengan merugikan pihak lain, contohnya pengguna jalan. Seandainya bisa diatur soal penyampaian pendapat ini, maka aksi demo tidak akan menjadi dampak buruk bagi dunia usaha," katanya.

Ketua Kadin DIY Nur Achmad Afandi menegsakan, Rapimnas Kadin akan fokus terhadap penguatan industri dan perdagangan dalam negeri dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi daerah.

Dia menambahkan Kadin mampu meningkatkan menilai laju pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya sektor keuangan. "Rapimnas Kadin sekarang memfokuskan pada pemerataah perekonomian nasional, karena itu berbagai masalah dalam dunia usaha di daerah akan dipecahkan bersama," tegasnya.

Perusahaan Outsourcing Seharusnya Beri Status Karyawan Tetap

Rabu, 03 Oktober 2012 | 13:10

Pemerintah mewajibkan perusahaan *outsourcing* memberikan hubungan kerja tetap terhadap para karyawannya.

Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Fahmi Idris, mengatakan demonstrasi buruh akibat masih banyaknya perusahaan *outsourcing* (alih daya) yang enggan memberikan status karyawan tetap terhadap para pekerja.

“Banyak bank besar seperti Mandiri, BRI atau Citibank yang melakukan praktik *outsourcing* tetapi mereka tidak pernah menemui masalah," kata Fahmi di sela rapat pimpinan kadin di Yogyakarta, Rabu (3/10).

Dia menjelaskan, setelah kontrak berakhir, para pekerja kembali ke perusahaan *outsourcing* sebagai karyawan tetap.

Menurut Fahmi, solusinya adalah pemerintah mewajibkan perusahaan *outsourcing* memberikan hubungan kerja tetap terhadap para karyawannya.

“Karena menurut undang-undang praktek *outsourcing* itu diakui dan diperbolehkan,” tandas opria yang pernah menajdi Menteri Perindustrian ini.

Ketua Kadin, Suryo Bambang Sulisto, menyetujui aktivitas *outsourcing* merupakan kesempatan ekonomi. “Masih banyak kesalahpahaman mengenai praktik *outsourcing* dan saya rasa tidak tepat untuk melarang hal tersebut,” kata Bambang.

Penulis: Tito Summa Siahaan/ Whisnu Bagus

Presiden Minta Menakertrans Fasilitasi Tuntutan Buruh

Rabu, 03 Oktober 2012 | 16:05

Dalam waktu yang tidak lama lagi diharapkan peraturan mengenai outsourcing bisa diterbitkan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk bekerja maksimal dalam memberikan solusi terbaik mengenai outsourcing/alih daya yang ditentang kaum buruh.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan SBY mengetahui bahwa isu perburuhan haruslah ditangani dengan baik, utamanya melalui dialog antara pihak yang terkait.

“Ini menjadi perhatian Presiden. Presiden telah menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bekerja seoptimal mungkin memfasilitasi apa yang menjadi perhatian buruh selama ini, terutama yang menyangkut isu mengenai outsourcing/alih daya,” kata Julian, kepada wartawan di Bina Graha, Jakarta, hari ini.

Menurut Julian, SBY telah memerintahkan Muhaimin agar kementeriannya segera

melakukan suatu perumusan peraturan baik di tingkat kementerian yang juga melibatkan para serikat pekerja dan pengusaha.

Disebutkan, SBY telah mendapatkan laporan mengenai terjadinya suatu dialog antara para buruh dengan pemerintah. Namun, belum ada laporan lanjutan mengenai hal ini.

Julian menambahkan, SBY berpesan agar di dalam pembahasan semua hal bisa dikomunikasikan, baik keinginan buruh dan pengusaha agar peratuan yang dihasilkan bisa diterima dan dijalankan oleh semua pihak.

”Tujuan pemerintah untuk membahas outsourcing adalah kebijakan bagi para pekerja di mana para buruh bisa lebih dijamin hak-haknya misalnya mendapatkan cuti, jaminan sosial, Jamsostek atau jaminan hak-hak lainnya,” ujar Julian.

Ditegaskan Julian. dalam waktu yang tidak lama lagi diharapkan peraturan mengenai outsourcing bisa dihasilkan. Selain mengenai outsourcing, jaminan kesehatan juga menjadi hal penting yang diinginkan oleh buruh.

Julian mengatakan pemerintah sedang menyusun peraturan pemerintah sebagai amanat dari UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelanggara Jaminan Sosial dan UU No. 40/2011 tentang Sistem Jaminan Sosial. Seperti diketahui, BPJS harus mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2015.

”Sedang disusun rancangan peraturan pemerintah agar bisa dipastikan saatnya nanti itu bisa dimplementasikan atau bisa dilaksanakan. Kami melibatkan juga serikat pekerja dan unsur pengusaha agar benar-benar bersepakat bilamana ini akan dilaksanakan,” papar Julian.

Para buruh dari berbagai serikat melakukan aksi mogok nasional di lebih dari 80 kawasan Industri di seluruh Indonesia hari ini. Aksi ini untuk mendorong pemerintah untuk menetapkan upah layak dan menghapuskan sistem kerja outsourcing.
Penulis: Arientha Primanita/ Wisnu Cipto

Polda Metro: Tidak ada Buruh yang Ditangkap

Rabu, 03 Oktober 2012 | 19:57

Jumlah buruh yang unjuk rasa dan mogok kerja di Jadetabek mencapai 50.200 orang.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Pol) Rikwanto, mengatakan secara umum, aksi unjuk rasa buruh di Jadetabek hari ini kondusif.

"Secara umum berjalan aman dan kondusif. Untuk menghadapi mogok kerja dan unjuk rasa, Polda Metro Jaya sudah menyiapkan 15 ribu personel gabungan Polri dan TNI, untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan," ujar Rikwanto kepada **Beritasatu.com**, Rabu (3/10).

Dikatakan Rikwanto, menurut data yang diterima, jumlah buruh yang unjuk rasa dan mogok kerja di kawasan ini mencapai 50.200 orang. Mereka terpantau sudah pulang sekitar pukul 16.00 WIB.

"Buruh jam 16.00 WIB sudah kembali ke rumah masing-masing. Jumlah buruh yang demo dan mogok kerja se-Jadetabek sebanyak 50.200 orang," ungkapnya.

Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Pol) Chairul Nur Alamsyah menyatakan aksi buruh berjalan kondusif. Meskipun diakuinya, memang sempat ada sedikit kericuhan di beberapa tempat, namun bisa diatasi.

"Unjuk rasa berjalan kondusif. Tadi memang sempat terjadi kericuhan di Tanjung Priok. Ada buruh yang memecahkan kaca spion kontainer. Namun, sudah dilakukan negosiasi antara Kapolres dengan perwakilan buruh, dan selesai, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang ditangkap," tandasnya.
Penulis: Bayu Marhaenjati/ Murizal Hamzah

Tiga Tuntutan Buruh Bakal Disampaikan ke Jokowi

Rabu, 03 Oktober 2012 | 14:26

Tiga tuntutan yaitu penghapusan outsourcing, jaminan kesehatan buruh, kenaikan UMP DKI Rp 1,8 juta per bulan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/10), sekitar pukul 12.00 WIB menerima Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta,

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan buruh menyampaikan tiga tuntutan yaitu penghapusan *outsourcing,* pemberikan jaminan kesehatan buruh, serta kenaikan UMP DKI sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DKI Jakarta Rp 1,8 juta per bulan.

Usai mendengar keluh-kesah para buruh dan pekerja selama 20 menit, salah satu anggota dewan dari F-PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, menemui para buruh yang berorasi di depan gedung DPRD DKI.

Melihat ada anggota dewan yang menemui mereka, para buruh langsung bersorak dan bertepuk tangan. Mereka meminta Dwi Rio naik ke atas mobil untuk melakukan orasi. Selama kurang lebih 15 menit berorasi, anggota Komisi E DPRD DKI bidang kesejahteraan rakyat ini turun dari mobil komando.

Dalam orasinya, Dwi menyatakan sangat memahami kebutuhan para buruh yang selama ini tuntutannya diabaikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dia berjanji menyampaikan tiga tuntutan para buruh ini kepada Gubernur DKI yang baru Joko Widodo (Jokowi), usai dilantik pada 7 Oktober mendatang.

"Saya tahu kondisi batin Anda semua. Karena itu, saya berjanji segera menyampaikan masalah ini kepada pemimpin baru Jakarta yaitu Jokowi dan Basuki. Mereka akan segera membahas tiga tuntutan yang diminta para pekerja," seru Dwi Rio, yang disambut teriakan "Hidup Jokowi" oleh para buruh.

Di antara tiga tuntutan buruh itu, salah satunya adalah mendesak pelaksanaan jaminan kesehatan (bagi) seluruh rakyat (lewat BPJS) pada 1 Januari 2014, dan bukannya pada 2019. Terkait tuntutan itu, Rio pun menjanjikan akan menyampaikannya kepada Jokowi-Ahok.

"Jangankan 2014, kita akan usahakan jaminan kesehatan seluruh warga DKI Jakarta dapat berjalan pada 2013 melalui Kartu Sehat. Ini program kerja yang akan kita awasi sebagai lembaga legislatif," terangnya.
Penulis: Lenny Tristia Tambun/ Murizal Hamzah

Menakertrans: Pelaksanaan Outsourcing Harus Mengacu UU

Rabu, 03 Oktober 2012 | 17:53

Semua pelaksanaan outsourcing harus mengacu dan sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003

Pemerintah menegaskan, pelaksanaan outsourcing harus mengacu kepada undang-undang (UU). Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan pekerja inti, juga ditegaskan harus menjalin hubungan langsung dengan para pekerjanya.

"Kami menyambut baik semua aspirasi yang berkembang dan telah menjadi isu sentral dalam pelaksanaan demo maupun unjuk rasa para buruh dan serikat buruh, hari ini. Semua sudah kami dialogkan selama beberapa bulan terakhir, untuk bersama-sama mencari solusi menyangkut outsourcing dengan tepat, cermat, dan tidak membahayakan ekonomi nasional kita," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, di Kantor Kemenakertrans, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, hari ini.

Dikatakan Muhaimin, pada dasarnya semua pelaksanaan outsourcing harus mengacu dan sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003. "Yang boleh dilakukan outsourcing hanya pekerjaan tambahan, bukan pokok. Sehingga, pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing-kan. Sedangkan pekerjaan inti merupakan pekerjaan yang harus ada hubungan kerja langsung antara pengusaha dengan para pekerja. Tidak melalui perusahaan pengerah tenaga kerja atau perusahaan outsourcing," tambahnya.

Muhaimin menyampaikan, hanya ada lima jenis pekerjaan tambahan yang boleh di-outsourcing menurut UU itu. "Pekerjaan tambahan yang boleh di-outsourcing-kan di dalam UU antara lain disebutkan ada lima jenis pekerjaan. Antara lain cleaning service, keamanan, transportasi, catering, dan pekerjaan penunjang pertambangan," terangnya.

Muhaimin melanjutkan, selain kelima jenis pekerjaan tambahan itu, semua pekerjaan inti

secara perlahan harus menyesuaikan dengan UU. "Kami minta kepada gubernur dan bupati untuk menertibkan semua para pengelola perusahaan pengerah tenaga kerja outsourcing, (agar) mulai secara bertahap menghentikan pengerahan tenaga kerja di luar pekerjaan inti," katanya.

Ditambahkan Menakertrans, ke depan akan diatur secara lebih detail terkait peraturan menteri yang mengatur hubungan kerja langsung antara pemberi kerja atau perusahaan dengan para pekerja yang tanpa melalui perusahaan pengerah tenaga kerja atau outsourcing itu. "Proses perantara yang melalui perusahaan pengerah tenaga kerja outsourcing harus dihentikan selain (pada) lima pekerjaan itu," tegasnya.

Menyoal apa tindakan pemerintah kalau ada (perusahaan) yang membandel, Muhaimin mengatakan bahwa ada dua langkah yang akan diambil. "Pertama, semua pekerjaan yang dikelola perusahaan outsourcing harus melakukan registrasi ulang kepada gubernur. Artinya, melalui izin baru. Sehingga yang tidak melaksanakan izin baru dianggap tidak bisa operasi. Kedua, kalau ada pelanggaran, maka perusahaan itu bisa dicabut izinnya," paparnya.

Terkait kapan keputusan itu akan keluar, Muhaimin menjanjikan pekan depan, atau pada akhir Oktober ini. "Kita harapkan minggu ini atau akhir bulan ini ditetapkan. Akan kita undang dulu Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan serikat pekerja (untuk) menuntaskannya di dalam rapat," katanya.

Hanya saja, menurut Muhaimin lagi, butuh masa transisi untuk meratakan aturan baru yang mengatur pelarangan outsourcing di luar pekerjaan utama tersebut. "Butuh masa transisi untuk meratakan aturan baru. Mungkin butuh waktu kira-kira satu tahun. Secepat-cepatnya bisa enam bulan," katanya.

"Selain itu, perlu dicatat, ini bukan soal pengalihan pekerjaan. Misalnya beberapa pekerjaan yang sifatnya periodik, temporer, itu lain lagi. Ini terutama khusus menyangkut perusahaan pengerah tenaga kerja," tandas Muhaimin.

Mahasiswa Desak SBY Hentikan Kampanye Upah Buruh Murah

Rabu, 03 Oktober 2012 | 17:46

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak untuk menghentikan kampanye upah buruh murah di Indonesia kepada siapapun yang berniat menginvestasikan uangnya di Indonesia.

Pasalnya, pola hubungan industrial seperti itu karena pada akhirnya akan menyengsarakan hidup rakyat.

Hal itu disampaikan Aliansi BEM Batavia dan Aliansi BEM Jawa Barat dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/10).

"Jika tidak dihentikan, maka kami mengajak semua mahasiswa melawan terus rezim neokolonialisme," kata Koordinator Aliansi BEM Batavia dan Jawa Barat Achyar Al-Rasyid.

Dia menjelaskan mahasiswa memandang pemerintah saat ini terlena dengan membiarkan praktik outsourcing yang tidak sesuai UU Ketenagakerjaan dan menyakitkan rakyat.

Menurutnya, selama ini kebijakan upah buruh murah selalu dipertahankan dan bahkan dijual sebagai penarik orang asing agar mau masuk ke Indonesia.

Di sisi lain, perbaikan iklim usaha dalam bentuk birokrasi bersih dan tidak berbelit-belit, serta tidak korupsi, tak kunjung dilaksanakan.

"Kami mendukung buruh dalam mogok nasional. Mari kita lawan segala kebijakan tidak prorakyat," tukasnya.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ Kristantyo Wisnubroto

Pemerintah Tidak Mungkin Mencabut Sistem Outsourcing

Rabu, 03 Oktober 2012 | 16:31

Pemerintah sudah meminta kepada para bupati dan gubernur agar memverifikasi seluruh perusahaan outsourcing yang izinnya mereka keluarkan

Pemerintah tak mungkin menghapus sistem outsourcing/alih daya, karena sistem itu legal dan diatur undang-undang. Namun, pemerintah tidak akan mentolerir perusahaan outsorcing yang membuat buruh makin susah dan miskin.

"Outsourcing itu adalah sistem ketenagakerjaan yang legal menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003. Jadi, kita tidak mungkin menghapuskan sesuatu yang diperbolehkan Undang-undang. Karena itu yang kami lakukan adalah menghapus segala bentuk outsourcing yang melanggar Undang-undang. Menurut Mahkamah Konstitusi, outsourcing juga legal. Tapi kalau ada praktik yang ilegal, itu yang harus dibasmi," ujar Juru Bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, di Kantor Kemenakertrans, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, hari ini.

Dikatakan Dita, pemerintah sudah meminta kepada para bupati dan gubernur agar memverifikasi seluruh perusahaan outsourcing yang izinnya mereka keluarkan. Kalau ada bukti pelanggaran, cabut izinnya.

"Diverifikasi, lalu diperiksa kinerjanya. Kalau ada terbukti pelanggaran, maka ijin operasional perusahaan outsourcing yang dikeluarkan dinas itu dicabut saja. Itu surat imbauan yang sudah kita sampaikan beberapa bulan lalu," tambahnya.

Dita menuturkan, pembenahan regulasi menjadi hal yang krusial, karena pemerintah sejalan dengan para pekerja. Pemerintah tak menolir pelaksanaan outsourcing yang

'mencekik' buruh.

"Pemerintah tidak menolerir pelaksanaan outsourcing yang membuat buruh semakin miskin, makin susah. Jadi, perusahaan outsourcing semacam ini tidak boleh beroperasi. Caranya bagaimana? Harus ada pengetatan dari segi kelembagaan, pengetatan dari segi administrasi izin operasional PT outsourcing itu dan soal jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing," terangnya.

Selama ini, ungkap Dita, salah satu sumber permasalahan adalah soal jenis pekerja yang menunjang atau tidak. "Dengan Permenaker yang kami keluarkan, sudah ditentukan bahwa jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing hanya lima yaitu, sekuriti, cleaning service, catering, transportasi, dan perminyakan-pertambangan. Jadi, kita berupaya memperketatnya," paparnya.

Menyoal tuntutan upah layak, Dita menyampaikan, pemerintah sudah memberikan tambahan 10 komponen. Sebelumnya rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional memberikan rekomendasi sebanyak 50 komponen, sekarang menjadi 60 komponen.

"Awalnya rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional sebagai otoritas yang berhak untuk memberikan rekomendasi pada menteri soal kebutuhan hidup layak, hanya 50 komponen upah. Tetapi kemudian, Pak Menteri (Muhaimin Iskandar) menganggap ini kurang, harus ada tambahan. Jadi, kita tambah 10. Jadi dari 46 menjadi 60 komponen sudah diberikan. Tetapi sejumlah kalangan pekerja menganggap masih kurang. Mereka mintanya antara 86 sampai 120 komponen," tandasnya.

Penulis: Bayu Marhaenjati/ Ayyi Achmad Hidayah

Presiden SBY Imbau Unjuk Rasa Buruh Jangan Rusuh

Rabu, 03 Oktober 2012 | 16:22

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengimbau para buruh untuk berunjuk rasa dengan tertib dan tidak melakukan sweeping kepada buruh lain yang memilih tetap bekerja.

Dirinya pun mengharapkan agar aksi demonstrasi tidak meluas karena bisa mengganggu iklim investasi.

Hal itu disampaikan melalui Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di kantornya di Bina Graha, Jakarta, Rabu (3/10).

"Dihimbau agar tidak sampai melakukan ajakan apalagi disertai ancaman dan intimidasi kepada teman-teman pekerja lain yang tidak ingin melakukan aksi demo karena ingin terus bekerja pada hari ini. Ini tidak positif," ujarnya.

Menurut Julian, pemerintah menghormati hak setiap warga negara, dalam hal ini para buruh untuk berdemonstrasi. Namun, jangan sampai ada pemaksaan karena itu berarti tidak menghormati hak dan pilihan orang lain.

Seperti diketahui, para buruh di kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur melakukan aksi sweeping terhadap rekannya yang masih bekerja. Mereka mengajak para buruh untuk turun ke jalan dan berdemonstrasi.

"Aksi yang dilakukan para buruh tidak meluas dan mengganggu investasi karena bisa mengganggu image kita sebagai negara yang aman atau baik untuk investasi. Yang kita harapkan iklim investasi tidak terganggu," ujar Julian lebih lanjut.

Para buruh dari berbagai serikat buruh melakukan aksi mogok nasional di lebih dari 80 kawasan industri di seluruh Indonesia. Aksi ini untuk mendorong pemerintah untuk menetapkan upah layak dan menghapuskan sistem kerja outsourcing.

Presiden Yudhoyono sendiri, kata Julian, terus memantau aksi buruh di seluruh Tanah Air dari Istana Negara.
Penulis: Arientha Primanita/ Kristantyo Wisnubroto

Presiden Minta Menakertrans Fasilitasi Tuntutan Buruh

Rabu, 03 Oktober 2012 | 16:05

Dalam waktu yang tidak lama lagi diharapkan peraturan mengenai outsourcing bisa diterbitkan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk bekerja maksimal dalam memberikan solusi terbaik mengenai outsourcing/alih daya yang ditentang kaum buruh.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan SBY mengetahui bahwa isu perburuhan haruslah ditangani dengan baik, utamanya melalui dialog antara pihak yang terkait.

“Ini menjadi perhatian Presiden. Presiden telah menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bekerja seoptimal mungkin memfasilitasi apa yang menjadi perhatian buruh selama ini, terutama yang menyangkut isu mengenai outsourcing/alih daya,” kata Julian, kepada wartawan di Bina Graha, Jakarta, hari ini.

Menurut Julian, SBY telah memerintahkan Muhaimin agar kementeriannya segera melakukan suatu perumusan peraturan baik di tingkat kementerian yang juga melibatkan para serikat pekerja dan pengusaha.

Disebutkan, SBY telah mendapatkan laporan mengenai terjadinya suatu dialog antara para buruh dengan pemerintah. Namun, belum ada laporan lanjutan mengenai hal ini.

Julian menambahkan, SBY berpesan agar di dalam pembahasan semua hal bisa

dikomunikasikan, baik keinginan buruh dan pengusaha agar peratuan yang dihasilkan bisa diterima dan dijalankan oleh semua pihak.

”Tujuan pemerintah untuk membahas outsourcing adalah kebijakan bagi para pekerja di mana para buruh bisa lebih dijamin hak-haknya misalnya mendapatkan cuti, jaminan sosial, Jamsostek atau jaminan hak-hak lainnya,” ujar Julian.

Ditegaskan Julian. dalam waktu yang tidak lama lagi diharapkan peraturan mengenai outsourcing bisa dihasilkan. Selain mengenai outsourcing, jaminan kesehatan juga menjadi hal penting yang diinginkan oleh buruh.

Julian mengatakan pemerintah sedang menyusun peraturan pemerintah sebagai amanat dari UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelanggara Jaminan Sosial dan UU No. 40/2011 tentang Sistem Jaminan Sosial. Seperti diketahui, BPJS harus mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2015.

”Sedang disusun rancangan peraturan pemerintah agar bisa dipastikan saatnya nanti itu bisa dimplementasikan atau bisa dilaksanakan. Kami melibatkan juga serikat pekerja dan unsur pengusaha agar benar-benar bersepakat bilamana ini akan dilaksanakan,” papar Julian.

Para buruh dari berbagai serikat melakukan aksi mogok nasional di lebih dari 80 kawasan Industri di seluruh Indonesia hari ini. Aksi ini untuk mendorong pemerintah untuk menetapkan upah layak dan menghapuskan sistem kerja outsourcing.
Penulis: Arientha Primanita/ Wisnu Cipto

Kemenakertrans: Outsourcing tidak mungkin dihapus

Terbaru 3 Oktober 2012 - 13:04 WIB

Hari ini jutaan buruh di Indonesia melakukan aksi mogok nasional menuntut dihapuskannya sistem alih daya (*outsourcing*) tetapi pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan sistem itu tidak mungkin dihapuskan.

Sekitar dua juta buruh dari 80 kawasan industri mogok massal untuk menuntut perbaikan kesejahteraan antara lain penghapusan sistem alih daya, tidak ada lagi upah rendah dan jaminan kesehatan.

Namun staf khusus Kemenakertrans, Dita Indah Sari, kepada wartawan BBC Indonesia Andreas Nugroho, mengatakan sistem alih daya diatur oleh undang-undang karenanya tidak bisa dihapuskan.

"Aturan inti *outsourcing* ada di UU No 13, jadi *outsourcing* tidak akan dicabut selama UU No 13 masih ada,"kata Dita.

Ia mengakui kelemahan regulasi adalah tidak dikenakannya sanksi terhadap praktik alih daya.

"*Nah,* ini kekeliruan pada saat UU itu dibuat. Kita sudah mengajukan revisi pada UU No 13 supaya bisa memasukkan pasal sanksi tapi ditolak DPR," kata dia lagi.

Meski pun demikian, pemerintah terus melakukan pembenahan regulasi dan dalam waktu dekat Kemenakertrans akan mengeluarkan revisi peraturan tentang sistem alih daya.

"Intinya memperkuat pelaksanaan, peraturan izin *outsourcing* dan kelembagaan misalnya kalau dulu izin dikeluarkan dinas kabupaten sekarang harus melalui dinas provinsi."

Pembenahan itu dicantumkan dalam revisi dan diharapkan dapat menjawab 60 persen tuntutan buruh.

Miskomunikasi

Dita juga menduga adanya miskomunikasi antara pimpinan serikat pekerja dengan anggota-anggotanya.

"Sehingga kesannya *outsourcing* harus dihapus, padahal dalam dialog kami yang muncul bukan itu, tapi praktek *outsourcing* yang melanggar uu, yang gajinya kurang dan lain lain."

Titik massa terbesar diperkirakan berada di Bekasi menurut Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). MPBI juga mengatakan mogok nasional ini dilaksanakan di 21 kabupaten/kota dengan 80 sentra industri menghentikan produksi.

Sedangkan di luar 80 kawasan industri itu, buruh akan berdemonstrasi di depan gedung DPRD seluruh Indonesia.

Di Jakarta, 10 ribu buruh berencana memusatkan aksi di Istana Negara, Bundaran HI, dan kantor Kemenakertrans.

"Kami menurunkan 15 ribu petugas untuk mengamankan aksi buruh," kata Rikwanto pada BBC Indonesia.

Soal Outsourcing, Bisa Selesai dengan Revisi UU

Undang-undang Ketenagakerjaan membolehkan adanya alih daya.

Rabu, 3 Oktober 2012, 21:35 Hadi Suprapto, Oscar Ferri, Erik Hamzah (Bekasi)

VIVAnews - Belasan ribu buruh turun ke jalan menuntut upah layak dan penghapusan sistem *outsourcing*, Rabu 3 Oktober 2012. Mereka menyasar sejumlah tempat untuk menyampaikan aspirasi, salah satu di depan Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta.

Menyikapi aksi buruh untuk kesekian kalinya, Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (DPN Gemasaba) sebagai organ taktis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan, perlu ada jalan dialog antara pekerja melalui perwakilannya, pengusaha, dan pemerintah, sehingga, apa yang selama ini menjadi tuntutan pekerja menemukan jalan tengah.

Ketua DPN Gemasaba Ghozali Munir mengatakan, khusus persoalan outsourcing atau alih daya bisa ditemukan pemecahannya dengan merevisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. “Sebab dalam UU itu masih ada pasal yang membolehkan adanya outsourcing. Ini perlu segera dilakukan revisi,” kata Ghozali, Rabu 3 Oktober 2012.

Mengenai upah murah, kata Ghozali, Menakertrans Muhaimin Iskandar sudah merespons melalui kebijakan Peraturan Menakertrans No 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Hidup Layak. Permenakertrans yang baru itu merupakan revisi Permenakertrans No 17/PER/VIII/2005.

Revisi Permenakertrans itu sendiri sudah ditetapkan secara objektif dengan berbagai pertimbangan dan aspek. "Termasuk dari usulan dan kajian yang berasal dari berbagai pihak," ujar Ghozali.

Namun demikian kebijakan lewat revisi Permenakertrans itu belum didukung sepenuhnya oleh para pemerintah daerah (pemda). Menurut Ghozali, persoalan upah murah buruh sebetulnya juga menjadi tugas dan tanggung jawab Pemda-Pemda.

Akibat banyak Pemda yang belum mendukung kebijakan itu, masih banyak upah buruh yang di bawah kebutuhan untuk hidup layak. Apalagi untuk hidup sejahtera.

Macetkan Bekasi

Menjelang berakhirnya unjukrasa mogok nasional, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bekasi mengalami kemacetan. Seperti terpantau di Jalan Raya Kalimalang, dari arah kawasan industri Cikarang menuju ke Bulak Kapal, Bekasi Timur.

Hal serupa juga terjadi di Jalan Imam Bonjol Cibitung, Jalan Sultan Hasanudin Tambun, hingga memasuki Jalan Ir. H Juanda dan Jalan Cut Meutia Bekasi Timur. Kendaraan yang melintas di dominasi oleh kendaraan roda dua milik para buruh, yang sebelumnya melakukan aksi di sejumlah kawasan industri.

Hingga aksi mogok nasional berakhir sekitar pukul 18.00 WIB, isu pemblokiran Jalan Tol Jakarta-Cikampek tidak terbukti. “Tidak ada buruh yang berani masuk tol, mereka sudah komitmen tidak ada aksi blokir,” ujar Direktur Lalu-lintas Polda Metro Jaya, Kombes Dwi Sigit Nurmantyas, saat memantau pengamanan di pintu masuk tol Cikarang Barat, Rabu 3 Oktober 2012.

Kemenkominfo: BBM "Error" Tak Terkait Demo Buruh

Sama halnya awal tahun lalu, saat pembahasan kenaikan harga BBM.
Rabu, 3 Oktober 2012, 17:10

VIVAnews -- Layanan BlackBerry Messenger (BBM) "*error*" hari ini, Rabu 3 Oktober 2012, bertepatan dengan aksi demo demo buruh serentak di wilayah Indonesia.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gatot Dewa S Broto menegaskan, gangguan tersebut tak ada kaitannya dengan demo buruh. "Tidak ada kaitannya dengan demo buruh, ini sama halnya dengan awal tahun baru soal pembahasan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Kami tidak berpretensi apapun," kata dia kepada *VIVAnews*, Rabu 3 Oktober 2012.

Apalagi gangguan tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga menimpa sebagian pengguna BlackBerry di Asia Pasifik.

"Kami sudah minta penjelasan ke RIM, mereka menjelaskan ada kesalahan teknis," tambah dia.

Gatot menyayangkan kembali terjadi gangguan semacam ini. Sebab, "ini kejadian ketiga kalinya," kata dia.

Sebelumnya, gangguan tersebut dibenarkan oleh Manager Public Relations Corporate communication PT. XL Axiata, Henry Wijayanto.

"Ada gangguan dari RIM dan ini menimpa pengguna Asia Pasifik termasuk Indonesia," kata dia saat dihubungi *VIVAnews*, Rabu 3 Oktober 2012.

Dia menegaskan, gangguan bukan berasal dari operator, sebab masalah ini menimpa seluruh operator di Indonesia. (umi)

373 Pabrik di Pulogadung Stop Operasi, Rugi Ratusan Miliar

Hampir semua pabrik di kawasan industri Pulogadung stop operasi.
Rabu, 3 Oktober 2012, 17:08

VIVAnews - Akibat aksi mogok nasional yang dilakukan buruh di Kawasan Industri Pulogadung, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan potensi kerugian yang dialami perusahaan yang ditinggal buruhnya mogok mencapai ratusan miliar rupiah.

"Pabrik di sini jumlahnya mencapai 373 perusahaan, bila rata-rata perputaran uang satu pabrik Rp1 miliar. Jika seluruh pabrik berhenti beroperasi, bayangkan berapa ratus miliar yang hilang," ujar Ketua Hubungan Industrial Dewan Pengurus Kota Jakarta Timur Apindo, Bambang Adam di Sekertariat Apindo Pulogadung, Rabu, 3 Oktober 2012.

Bambang mengatakan, akibat aksi mogok kali ini, hampir semua perusahaan atau pabrik di kawasan industri Pulogadung mengalami kelumpuhan. "Hari ini seluruh produksi

hingga distribusi perusahaan yang ada di kawasan terhenti karena banyak karyawannya yang turun ke jalan," ujarnya.

Sebelum aksi mogok digelar, perusahaan di kawasan industri Pulogadung telah meliburkan buruhnya untuk mengikuti aksi mogok nasional. "Untuk mencegah tindakan anarkis, perusahaan meliburkan buruhnya, tapi sebagian ada yang tetap beroperasi," kata Bambang.

Ia berharap aksi mogok buruh ini tidak berlanjut. Selain merugikan perusahaan, aksi mogok ini juga dapat merusak iklim investasi di Indonesia. "Semoga cukup sampai hari ini buruh melakukan demo, kalau demo dan mogok terus bisa-bisa investor pada kabur semua karena dianggap investasi di sini tidak kondusif," ujarnya.

Sementara Kepala Humas PT JIEP (Jakarta Indutrial Estate Pulogadung), Achmad Maulizal, yang mengelola Kawasan Industri Pulogadung mengatakan, masih banyak perusahaan yang tidak menghentikan kegiatan produksinya.

"Banyak perusahaan yang tetap produksi, tapi karena desakan buruh untuk ikut mogok, akhirnya perusahaan hanya beroperasi setengah hari," ujar Maulizal.

Berbeda dengan Bambang, Ia justru menolak kalau aksi mogok para buruh ini telah melumpuhkan produksi dan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri Pulogadung.

"Mayoritas pabrik di sini hanya sebagai supporting system saja, beda dengan kawasan industri Jababeka yang menjadi sentra produksi barang. Pulogadung lebih banyak berperan sebagai lokasi pengepakan dan pergudangan saja," katanya.

Wartawan Dianiaya Buruh

Kontributor televisi lokal, CB Chanel TV, Jawa Pos Group, Rahmat Hidayat, dianiaya buruh saat melakukan peliputan di Jalan Raya Dipenogoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 3 Oktober 2012.

Tidak jelas apa penyebabnya, kamera Rahmat yang berisi rekaman liputan dirampas buruh yang diduga anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi dari PT Suzuki Indomobil.

"Saya sedang mengambil gambar dikerumunan massa, tiba-tiba salah satu buruh memukul kepala bagian belakang dan kaset saya dirampas, juga kamera disiram air," katanya di kantor polisi.

Meski telah menyampaikan bahwa dirinya sedang bertugas untuk meliput aksi unjuk rasa, buruh yang semula mukuli Rahmat justru memprovokasi massa lain yang akhirnya ikut melakukan pemukulan.

"Saya tidak tahu persis siapa saja yang melakukan pemukulan, karena peristiwa

berlangsung cepat. Kamera saya juga dirusak, dan kaset dibawa kabur. Pelaku pakai seragam FSPMI," katanya.

Rahmat kemudian melaporkan kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polresta Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemani petugas langsung melakukan visum di RSUD Kabupaten Bekasi. Guna keperluan penyelidikan siapa pelaku pemukulan, polisi juga langsung melakukan olah tempat kejadian.

Apindo: Buruh Seharusnya Demo DPR dan Pemerintah

Setiap satu kawasan, kerugian bisa mencapai puluhan miliar rupiah.

Rabu, 3 Oktober 2012, 15:35

VIVAnews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi Jawa Barat, menyatakan aksi unjukrasa buruh di sejumlah kawasan industri di Kabupaten Bekasi, salah sasaran.

Menurut Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, Sutomo, jika permasalahan yang diangkat menyangkut undang-undang, seharusnya para buruh tidak melakukan aksi di kawasan industri.

"Seharusnya yang didemo itu pemerintah, dalam hal ini DPR. Karena mereka yang bisa membuat dan merevisi undang-undang," kata Sutomo, Rabu 3 Oktober 2012.

Akibat aksi unjukrasa hari ini, kata Sutomo, bukan hanya pengusaha yang dirugikan, masyarakat luas juga kena dampaknya. "Seperti pengguna jalan yang terjebak kemacetan. Mereka juga pasti sangat dirugikan," Sutomo menambahkan.

Sejauh ini, Apindo Kabupaten Bekasi belum bisa merinci secara detail total kerugian akibat aksi unjuk rasa yang disertai mogok kerja oleh para buruh kali ini.

"Tapi setiap satu kawasan, kerugian bisa mencapai puluhan miliar rupiah, karena berhenti produksi," jelasnya.

Di Kabupaten Bekasi terdapat tujuh kawasan industri dengan jumlah perusahaan mencapai 3.000 lebih. Tenaga kerja yang terserap angkanya lebih dari 800 ribu orang. "Semua pengusaha di Kabupaten Bekasi sekarang masih fokus untuk memantau pengamanan pabrik," kata Sutomo. (sj)

"Jangan Samakan Upah Buruh Berkeluarga dengan Lajang"

Dua juta lebih buruh di Indonesia menggelar aksi Mogok Kerja Nasional.

Rabu, 3 Oktober 2012, 15:23

VIVAnews – Anggota Komisi IX Bidang Tenaga Kerja DPR, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan ratusan ribu buruh se-Indonesia terpaksa melakukan aksi Mogok Kerja Nasional karena buruknya standar hidup mereka.

Upah buruh selama ini tergolong rendah sampai-sampai tidak mencukupi kebutuhan mereka. "Setiap tahun buruh berjibaku berjuang menaikkan upah, sementara di pabrik tiap hari tetap dipaksa kerja dan berproduksi," kata Rieke di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Oktober 2012.

Politisi PDIP itu pun mempersoalkan penyamaan standar upah antara pekerja yang masih lajang dan sudah berkeluarga. "Sangat jelas ini sama artinya dengan mengatakan, buruh Indonesia tidak boleh berkeluarga, tidak boleh tinggal di tempat yang lebih baik, dan tidak boleh memiliki rumah," ujar Rieke.

Oleh karena itu Rieke mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan dan memenjarakan pengusaha yang membayar upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). "Kami juga mendesak pemerintah agar Peraturan Pemerintah tentang iuran jaminan kesehatan bagi buruh atau pekerja, tetap dibayarkan oleh pemberi kerja atau pengusaha," kata dia.

Pemerintah pun diminta menghentikan sementara dan mencabut izin seluruh outsourcing yang melanggar UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Kami mendesak pemerintah membatasi praktik kerja outsourcing. Pembatasan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya untuk pekerjaan pendukung saja dan tidak digunakan pada pekerjaan pokok," ujar Rieke.

Seperti diketahui, dua juta lebih buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) hari ini serentak menggelar aksi Mogok Kerja Nasional di 21 kabupaten atau kota, 80 kawasan padat industri, di kantor DPRD, dan di kantor gubernur di daerah non pada industri. (sj)

2.000 Buruh Tanjung Priok Bergabung ke Pulogadung

Meski sempat ada aksi sweeping, demo buruh masih berlangsung damai.

Rabu, 3 Oktober 2012, 14:58

VIVAnews - Jumlah Buruh yang melakukan aksi mogok kerja di Kawasan Industri Pulogadung terus bertambah, selain dari Pulogadung, ratusan buruh dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, ikut bergabung untuk aksi bersama.

Berdasarkan pantauan *VIVAnews*, ratusan buruh dari Tanjung Priok ini masuk melalui pintu gerbang dekat Pulogadung Trade Center (PTC). Massa buruh datang dengan bus.

Kapolres Jakarta Timur, Kombes Saidal Mursalin mengatakan, jumlah buruh dari Tanjung Priok yang ikut bergabung dengan Buruh di Pulogadung mencapai 2.000 orang. Meski sempat ada aksi sweeping, demo buruh masih berjalan damai.

"Setelah melakukan orasi di kawasan industri, mereka melanjutkan aksinya di Pulo Gadung, info yang didapat dari Polres Jakarta Utara jumlahnya 2.000 orang," ujarnya.

Guna mengantisipasi agar aksi ini tidak menimbulkan kericuhan, Saidal mengatakan pihaknya telah mengerahkan 500 personel dari Polres Jakarta timur dan Polda Metro Jaya.
"Memang tidak sebanding dengan jumlah buruh yang terus bertambah, karena itu kita harap aksi buruh berlangsung tertib," katanya. (umi)

Istana: Demo Buruh Jangan Sampai Ganggu Investasi

Buruh di berbagai daerah hari ini menggelar aksi mogok nasional.
Rabu, 3 Oktober 2012, 14:55

VIVAnews – Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, menyatakan pemerintah meminta para buruh yang sedang menggelar aksi mogok nasional, untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam menyampaikan aspirasi mereka.

“Tentu yang kami harapkan agar iklim investasi secara umum tidak terganggu. Oleh karena itu aksi-aksi buruh agar tidak meluas, serta tidak mengganggu investasi dan citra kita sebagai negara yang aman dan baik untuk investasi,” kata Julian di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu 3 Oktober 2012.

Istana juga meminta aksi sweeping di sejumlah kawasan industri terhadap buruh yang tidak ikut mogok, dihentikan. Julian mengatakan, sweeping tidak pantas dilakukan karena tidak menghormati pilihan orang lain. “Ini tidak positif,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan demonstran untuk tidak mengancam dan mengintimidasi pekerja lain yang ingin tetap bekerja. “Kami tekankan jangan sampai mengganggu proses produksi,” kata Julian. Terganggunya produksi akibat tak ada buruh yang bekerja dikhawatirkan tak hanya mengganggu proses produksi di pabrik-pabrik, tapi juga mengganggu perekonomian secara nasional.

Di sisi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setuju untuk mengakomodir tuntutan para buruh terkait sistem tenaga alih daya atau outsourcing. Presiden berupaya memperbaiki kesejahteraan buruh dan lebih menjamin hak-hak mereka, termasuk untuk mendapat cuti, jaminan sosial, dan lain-lain.

“Sistem harus bekerja. Mekanisme khusus yang mungkin bisa diterapkan lebih baik terkait isu outsourcing ini memang terus dicari,” ujar Julian. Untuk itu Presiden meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk mempercepat pemenuhan tuntutan para buruh itu. “Harus dapat diselesaikan dengan baik karena ini melibatkan unsur pekerja dan pengusaha,” imbuh Julian.

Tuntutan Buruh

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyatakan, tuntutan utama buruh dalam aksi mogok nasional hari ini adalah penghapusan sistem kerja kontrak, penghapusan outsourcing, penghapusan politik upah murah, iuran jaminan kesehatan tetap dibayar pengusaha, dan pemberantasan korupsi.

Buruh juga menuntut adanya revisi peraturan secara menyeluruh dengan membuat kebijakan pengupahan yang melindungi buruh, serta menjamin penetapan upah dilakukan melalui proses yang transparan dan melibatkan semua konstituen buruh. (umi)

Tuntutan Buruh yang Harus Diselesaikan Jokowi-Ahok

Lalu lintas di kawasan Jalan Kebon Sirih kini telah dibuka sebagian.
Rabu, 3 Oktober 2012, 13:10

VIVAnews - Perwakilan serikat buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, diterima oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, di kantornya, Jalan Kebon Sirih, Rabu, 3 Oktober 2012.

Usai melakukan komunikasi di kantor DPRD DKI selama kurang lebih 20 menit, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, menemui ribuan buruh se-Jabodetabek.

Rio, sapaannya, didaulat naik ke atas mobil komando untuk melakukan orasi. Dalam orasinya, ia mengaku memahami kondisi kebatinan para buruh yang merasa tuntutannya selama ini diabaikan oleh pemerintah.

"Saya berjanji akan segera mengkomunikasikan masalah ini kepada pemimpin baru Jakarta, Pak Jokowi dan Pak Basuki, untuk segera membahas tiga tuntutan yang para pekerja minta," ujar Dwi Rio diiringi seruan 'hidup Jokowi' dari para buruh.

Tiga tuntutan yang disampaikan para buruh kepada anggota dewan yakni untuk menghapuskan sistem kerja outsourcing, tolak upah murah dan jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat pada 1 Januari 2014, bukan 2019.

Terkait tuntutan BPJS yang didesak para buruh untuk segera dilakukan pemerintah, Rio menjanjikan akan menyampaikan aspirasi mereka kepada Jokowi-Ahok.

"Jangankan 2014, kami akan usahakan jaminan kesehatan seluruh warga DKI Jakarta dapat berjalan pada 2013 melalui kartu sehat. Ini program kerja yang akan kami awasi sebagai lembaga legislatif," ungkapnya.

Bagi para pekerja di luar DKI, Rio mengatakan akan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah setempat. "UMP DKI Jakarta masih pada angka lebih dari Rp1,5 juta, dan kami paham para pekerja yang bekerja pada daerah penyangga Jakarta pasti memeroleh upah yang lebih kecil. Ini akan kami usahakan untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengkaji kembali UMP," tuturnya.

Selama kurang lebih 15 menit berorasi, anggota Komisi E DPRD DKI bidang kesejahteraan rakyat ini pun turun dari mobil komando.

Para buruh kembali melanjutkan aksinya diiringi lagu Bento yang dipopulerkan oleh salah satu seniman Indonesia terkemuka, Iwan Fals. Aksi dilakukan dengan damai, tanpa aksi anarkis. Lalu lintas di kawasan Jalan Kebon Sirih yang tadinya ditutup oleh para buruh, kini telah dibuka sebagian. (umi)

Sweeping Buruh, Pagar Pabrik Didobrak

Mereka menuntut perusahaan membolehkan buruhnya mengikuti aksi mogok.

Rabu, 3 Oktober 2012, 12:36

VIVAnews - Ribuan buruh di Kawasan Industri Pulogadung mengikuti aksi mogok hari ini, Rabu 3 Oktober 2012. Mereka juga melakukan aksi sweeping kepada buruh yang masih terlihat bekerja.

Berdasarkan pantauan *VIVAnews*, sebelum berkumpul di titik yang menjadi pusat aksi mogok, buruh terlebih dahulu menyambangi tiap pabrik untuk mengajak rekannya yang masih bekerja untuk bergabung mengikuti aksi mogok.

Massa dari berbagai elemen ini melakukan orasi di depan perusahaan yang melarang buruhnya melakukan mogok kerja. Mereka menuntut agar perusahaan membolehkan buruhnya mengikuti aksi mogok.

Sweeping juga diwarnai aksi dobrak gerbang. Hal itu terjadi lantaran para pekerja di salah satu pabrik sabun masih bekerja saat disambangi buruh.
Mengetahui rekannya masih melakukan aktivitas, ribuan buruh segera menghampiri, dan menggoyang-goyangkan pagar besi pabrik yang dijaga dua satpam.

Kejadian serupa hampir terjadi di sebuah pabrik baja yang terletak tak jauh dari pabrik sabun tersebut. Beruntung beberapa pekerja yang sedang melakukan aktivitasnya di dalam pabrik bernegosiasi dengan para demonstran. Mereka akhirnya memutuskan untuk menghentikan pekerjaannya dan bergabung dengan massa aksi.

Sementara itu, puluhan pekerja pabrik Sari Ayu yang sebagian besar perempuan memilih bertahan di dalam pabrik. Para demonstran yang mengajak mereka tak mampu menggerakan para pekerja untuk turun aksi. Para buruh perempuan yang ikut mogok tampak menyoraki dan meminta kepada buruh yang masih terlihat bekerja untuk bergabung.

"Ayo bergabung kita mogok bareng supaya nasib buruh makin sejahtera," ujar Ayu salah seorang Buruh yang bekerja disalah satu perusahaan elektronik tersebut. (adi)

Massa Buruh Mulai Masuk Jakarta, Kawasan Kebon Sirih Macet

Sekitar 10 bus terparkir di sepanjang Jalan Kebon Sirih.

Rabu, 3 Oktober 2012, 11:54

VIVAnews - Sedikitnya 1.500 buruh se-Jabodetabek mulai memasuki pusat kota. Buruh yang datang dengan bus dan kendaraan roda doa mulai menutup kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka konvoi sambil berorasi menyuarakan hak-hak mereka di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Ribuan buruh ini tergabung dalam Serikat Pekerja Graha Sarana Duta (SEJAGAD), dan Afliasi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia). Dalam orasinya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SEJAGAD, Mahmud, mengatakan bahwa seluruh buruh menuntut kepastian status pekerja dan menolak upah murah yang selama ini masih banyak diterapkan pengusaha.

"Teman-teman di Pulogadung telah menutup lima akses di kawasan industri, *sweeping* juga telah dilakukan di kawasan Cakung. Semua sudah tidak bisa bergerak karena banyaknya. Ini saatnya buruh membuktikan, kita tidak mau lagi ditindas," kata Mahmud, saat berorasi di atas mobil di depan kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2012.

Mahmud menyerukan, bahwa tujuan aksi ini adalah untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai buruh, yang selama ini banyak tertindas oleh para investor, dan juga para pembuat undang-undang.

"Kami menolak *outsourcing*, apalagi karyawan borongan, itu sudah tidak pantas lagi untuk kita. Tolak upah murah, karena buruh tidak dihargai sebagai sumber daya manusia," katanya.

SEJAGAD menuntut agar perusahaan tempat mereka bekerja, yakni PT Graha Saran Duta, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja untuk PT TELKOM Indonesia, agar menghentikan diskriminasi terhadap pengurus dan anggota SEJAGAD. Serta mempekerjakan kembali 96 orang yang dirumahkan.

"Hentikan tindakan pelemahan terhadap serikat pekerja dalam bentuk apapun. Hentikan intimidasi baik langsung maupun tidak langsung kepada pengurus dan anggota serikat pekerja," serunya.

Tak hanya itu, para buruh juga menuntut agar perusahaan membayar upah lembur sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Buruh juga marah karena mereka tidak pernah mendapatkan haknya dalam keikutsertaan di Jamsostek.

Sekitar 10 bus terparkir di sepanjang Jalan Kebon Sirih. Akibat aksi ini, lalulintas Jalan Kebon Sirih menuju Tugu Tani mengalami kemacetan, bahkan tak dapat dilalui kendaraan. (eh)

Buruh Juga Blokir Jalan Raya Industri Cikarang

Kendaraan mengalami kemacetan parah di dua arah berlawanan.

Rabu, 3 Oktober 2012, 11:48

VIVAnews - Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Serikat Pekerja Minyak dan Gas (SPMG-Bekasi), memblokir Jalan Raya Industri Cikarang, tepatnya di depan pabrik Pertamina Gas Distrik Tegal Gede, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Rabu 3 Oktober 2012.

Di depan pabrik, ratusan buruh yang mayoritas menggunakan kendaraan roda dua, secara bergantian melakukan orasi. Ada sebuah kendaraan bak terbuka lengkap dengan *sound system* yang disiapkan untuk orasi tersebut.

"Hapuskan sistem *outsourcing*, tolak upah murah dan berikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia," teriak salah seorang buruh.

Akibat aksi pemblokiran Jalan Raya Industri Cikarang, kendaraan mengalami kemacetan yang cukup parah di dua arah berlawanan. Beruntung pemblokiran hanya berlangsung sekitar 15 menit. Setelah itu ratusan buruh bergerak menuju kawasan Industri Lippo Cikarang, untuk bergabung dengan buruh lainnya.

Aksi di depan pabrik Pertamina Gas, berlangsung kondusif meskipun tidak terlihat ada petugas kepolisian yang melakukaan penjagaan. Kini, kondisi arus lalu-lintas di Jalan Raya Industri Cikarang sudah kembali normal. Namun untuk yang mengarah ke kawasan Industri Lippo, terjadi kemacetan akibat banyaknya kendaraan buruh yang berkonvoi. (eh)

Konvoi Buruh, Kawasan Cibitung Macet Panjang

Sekitar 546 pabrik di Kabupaten Bekasi tidak beroperasi.

Rabu, 3 Oktober 2012, 11:06

VIVAnews - Sekitar 546 pabrik yang berada di kawasan Kebupaten Bekasi, Jawa Barat, dipastikan tidak beraktivitas karena buruh mereka mengikuti aksi mogok nasional, Rabu, 3 Oktober 2012. Mereka tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).

"Meski ada aktivitas, pabrik tidak akan berjalan seperti biasa. Tidak ada aksi sweeping, solidaritas buruh sudah kuat," kata Jhoni Saragih, pekerja dari FSPMI PT KMA Platik Indonesia kepada *VIVAnews.*

Dalam aksi mogok nasional ini, seluruh buruh yang berasal dari Kabupten Bekasi, berkumpul di depan PT Samsung dan PT Dailim, kawasan Jababeka 1.

Saat akan menuju titik kumpul, sejumlah kawasan di Kabupaten Bekasi mengalami kemacetan panjang. Dari pantauan, konvoi buruh masih terlihat di Jalan Raya Sultan Hasanudin dari arah Tambun sampai kawasan Jalan Raya Imam Bonjol di kawasan

Cibitung.

Akibat aksi konvoi ini, dua arah jalan dipenuhi ribuan kendaraan roda dua milik buruh. Lalulintas yang mengarah Jakarta dan Karawang mengalami kemacetan Total.

Tapi tidak seluruh buruh akan berkumpul di kawasan Jabebaka 1. Terlihat ada ratus buruh yang sengaja berputar-putar untuk konvoi. Mereka hanya menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit buruh yang mematuhi peraturan, selain melanggar lampu merah, banyak juga buruh yang tidak menggunakan helm.

Hingga kini, aksi buruh masih kondusif, pengamanan Polres Kabupaten Bekasi dan Korem Wijayakarta masih melakukan pengamanan.

Seperti buruh di daerah lain, buruh di Bekasi juga menuntut pemerintah segera menghapus sistem kerja outsourcing, menghapus politik upah murah dan menuntut pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai 1 Januari 2014. (adi)

Redakan Ketegangan, Ribuan Buruh Dihibur Dangdut

Saat ini akses menuju Bogor dan Jakarta masih belum bisa dilewati.

Rabu, 3 Oktober 2012, 11:06

VIVAnews - Ribuan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Raya Bogor Km 35, dihibur orkes dangdut, Rabu 3 Oktober 2012. Suguhan hiburan inipun langsung disambut massa dengan goyang bersama.
Rupanya, cara ini cukup ampuh untuk mencairkan suasana yang sempat tegang saat ratusan polisi bersenjata lengkap diturunkan ke lokasi demonstran.

Pantauan *VIVAnews*, saat ini akses menuju Bogor dan Jakarta masih belum bisa dilewati lantaran ditutup oleh ribuan buruh. Polisi masih mengalihkan arus lalu lintas menuju dua kota itu.

Dalam orasinya, massa menuntut penghapusan *outsourcing* dan kelayakan upah sesuai dengan UMR. Massa mengancam, jika tuntutan itu tak dipenuhi mereka bakal melakukan aksi serupa besok.

Aksi ini diikuti buruh dari sejumlah pabrik di Kota Depok, antara lain, PT Sanyo, PT. Yanmar, PT. Pralon, PT. Meiwa PT PSI, dan dan KSPI (Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia). (eh)

Hari Ini Ribuan Buruh Demo, Hindari Kawasan Ini

Aksi demonstrasi tersebar di seluruh Indonesia di 80 kawasan industri.

Rabu, 3 Oktober 2012, 06:37

VIVAnews - Serikat pekerja berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada Rabu 3 September 2012. Anda sebaiknya mengetahui di mana saja lokasi unjuk rasa itu, agar tidak terjebak kemacetan dan terlambat sampai tujuan. Tips sederhananya adalah hindari kawasan industri.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi damai tersebut akan digelar sejumlah wilayah di Indonesia, setidaknya di 21 kabupaten/kota dan 80 kawasan industri.

"Demonya dibagi dua. Ada buruh yang mogok kerja atau stop produksi, keluar dari pabrik tetap di kawasan industri. Kedua adalah unjuk rasa di kantor DPRD setempat," kata Iqbal kepada *VIVAnews*, di Jakarta, Selasa malam, 2 Oktober 2012.

Khusus di Jakarta, demonstrasi akan berpusat pada beberapa titik kawasan Industri. Antara lain, Pulo Gadung, Kawasan Berikat Nusantara Cakung, dan Sunter. Demonstran tidak akan menuju ke gedung parlemen. "Tidak ke DPR. Kami aksi damai di kawasan industri masing-masing," katanya.

Dari seluruh Indonesia, massa yang terbesar yang turun ke jalan adalah di Jabotabek. Iqbal berjanji bahwa dalam aksi tersebut para pekerja tidak akan menggangu fasilitas umum, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan petugas keamanan yang berwenang guna mengamankan jalannya unjuk rasa.

"Ini aksi damai, kami serukan kepada pengusaha jangan khawatir dan takut," katanya. Aksi buruh dengan cara mogok kerja nasional ini menuntut penghapusan *outsourcing* tenaga kerja dan menolak upah murah.

Selain melakukan penjagaan di tempat obyek vital seperti gedung DPR/MR, Istana Negara, jalan tol, kepolisian juga sudah mempersiapkan pengalihan arus lalu lintas jika ruas jalan tertutup oleh aksi buruh.

Berikut sasaran aksi untuk wilayah Polda Metro :
1. Kawasan Industri Pulogadung Jaktim
2. KBN Cakung Jaktim & KBN Cilincing Jakut
3. Kawasan Industri.Jatake Kota Tangerang
4. Kawasan Industri Kalisadi Tangerang
5. Kawasan Industri Manis Kota Tangerang
6. Kawasan Industri Jatiuwung Kota Tangerang
7. Kawasan Industri MM 2100 Kab Bekasi
8. Kawasan Industri Jababeka Kab.Bekasi
9. Kawasan Industri EJIB Kab Bekasi
10. Kawasan Industri Hyundai Kab.Bekasi
11. Kawasan Industri Delta Silikon Kab.Bekasi
12. Kawasan Industri Lipppo Kab.Bekasi
13. Kawasan Industri Gobel Kab Bekasi

Buruh minta perusahaan agen outsourcing hentikan operasi

Terbaru 4 Oktober 2012 - 13:57 WIB

Perundingan antara pemerintah dengan kelompok buruh tentang penerapan aturan *outsourcing* akan dilanjutkan pekan ini.
Kelompok buruh mengatakan mereka berupaya menyamakan sejumlah tafsir atas beberapa aturan yang tengah disusun oleh pemerintah.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan mereka juga meminta pemerintah mengkaji keberadaan seluruh perusahaan penyalur tenaga kerja alih daya.

"Setelah tanggal 3 Oktober proses negosiasi akan berlangsung kembali hingga kurun dua pekan ke depan dan kami masih menunggu pemberitahuan kapan proses pembicaraan selanjutnya akan berjalan," kata Said Iqbal kepada BBC Indonesia.

"Dalam pertemuan nanti salah satu yang kami usulkan adalah soal moratorium terhadap keberadaan agen outsourcing yaitu mencabut izin semua agen dan kemudian mengubah aturan hubungan pekerja outsourcing dengan perusahaan pengguna."

Iqbal mengatakan usulan ini masih didiskusikan dengan pemerintah karena pemerintah memahami moratorium sebagai kebijakan untuk tidak memberi ijin perusahaan agen outsourcing baru selama satu tahun dan menindak perusahaan lama yang diketahui melanggar aturan.

Mogok lagi

Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Muhaimin Iskandar kemarin berjanji aturan yang mengatur hubungan pemberi kerja atau perusahaan dengan pekerja tanpa perusahaan penyalur tenaga kerja alih daya akan segera terbit minggu ini.

Buruh dalam negosiasi tahap kedua nanti juga akan meminta kepastian soal kategori pekerjaan yang bisa dilakukan dengan sistem kerja outsourcing.

"Pemerintah harus menjelaskan soal definisi proses produksi langsung, kalau kita memahami kegiatan pokok atau proses produksi langsung itu mulai bahan baku masuk sampai barang jadi."

Sebelumnya pemerintah, buruh dan pengusaha menyepakati ada lima jenis pekerjaan yang boleh dilakukan secara outsourcing. kelima jenis pekerjaan itu adalah *cleaning service*, keamanan, transportasi, catering, dan jasa migas pertambangan.

Sementara pekerjaan yang berkaitan dengan proses produksi langsung tidak boleh dikerjakan dengan sistem outsourcing.

Iqbal mengatakan pertemuan sejauh ini sudah menunjukkan titik terang namun jika tidak terdapat kesepakatan dalam waktu dua minggu ke depan soal aturan outsourcing maka buruh menurutnya akan melakukan aksi mogok.

"Kami akan mempertimbangkan melakukan mogok nasional lagi namun sejauh ini kami melihat ada jalan untuk melakukan negosiasi."

Buruh Blokade Pertamina Jatibarang

Kamis, 4 Oktober 2012 | 22:02 WIB

INDRAMAYU, KOMPAS.com - Aksi mogok para buruh alih daya di Pertamina EP *field* Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat sejak Rabu (3/10/2012) hingga Kamis (4/1/2012) hari ini masih berlangsung. Bahkan dikabarkan, para buruh *outsourcing* ini memblokade pintu gerbang masuk kawasan Pertamina EP Jatibarang dengan menjejerkan 8 unit truk trailer.

"Para buruh *outsourcing* ini menyabotase kendaraan berat milik Pertamina. Hingga sekarang truk itu masih menghalangi pintu masuk," jelas salah seorang sekuriti Pertamina EP Jatibarang kepada *Kompas.com*, Kamis (4/1/2012).

Menurutnya, aksi yang dilakukan sekitar 900 buruh alih daya itu merupakan buntut dari kekecewaan buruh terhadap perusahaan tersebut yang belum juga menghapus sistem *outsourcing.* Menurutnya, tuntutan tersebut sudah dihembuskan pada awal Juli lalu. Namun hingga sekarang tuntutan itu belum juga direalisasikan oleh Pertamina.

Akibat blokade gerbang masuk Pertamina EP Jatibarang, lanjut sumber itu, pasokan bahan bakar ke Balongan di Jawa Barat terganggu. Pasalnya, kompresor dimatikan yang menyebabkan pasokan gas ke sumur-sumur minyak terhenti.

Salah seorang petugas di Polres Indramayu menambahkan, 8 unit truk trailer yang dipakai untuk memblokade pintu gerbang masuk, bannya sudah digembosi, dan kunci diambil pendemo.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina EP Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, terkait aksi blokade ini.

Muhaimin: Mogok dan Demo Buruh Cuma Sehari

Penulis : Imanuel More | Rabu, 3 Oktober 2012 | 21:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi kemungkinan berlanjutnya unjuk rasa dan mogok kerja di kalangam buruh. Muhaimin mengaku telah berdialog dengan pemimpin-pemimpin konfederasi serikat buruh.

"Tadi pagi kami sudah berdialog dengan para pimpinanannya. Dari hasil pembicaraan, kami sepakat aksi hanya berlangsung sehari," terang Muhaimin di kantor Kemenakertrans, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2012).

Ia mengutarakan, sebelumnya pihak buruh berencana melakukan aksi mogok dan unjuk rasa selama lima hari. Kementerian dan para pimpinan konfederasi kemudian mencapai kesepakatan setelah Muhaimin dan jajaran menyatakan kesediaan untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Kemenakertrans berjanji akan memberlakukan pengetatan dalam penerapan sistem *outsourcing* kepada perusahaan-perusahaan penerima jasa outsourcing.

"Intinya kita kembali kepada ketetapan lima jenis pekerjaan yang bisa di-*outsourcing* sebagaimana diatur UU No 13 Tahun 2003. Pekerjaan-pekerjaan pokok tidak bisa di-*outsourcing*. Itu hanya diperbolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan tambahan," kata Cak Imim, sapaan Muhaimin.

Namun, salah satu tuntutan pokok kaum buruh lainnya, yaitu tentang upah layak, masih dalam proses dialog. Kementerian telah menambah komponen upah dari 46 item menjadi 60 item. Namun, sejumlah kalangan buruh menilai jumlah tersebut masih kurang. Mereka menuntut komponen upah yang dihitung sejumlah 80 item, bahkan ada yang meminta hingga 100-an item.

"Untuk 2013, saya sudah koordinasikan ke buruh, gunakan peraturan menteri yang ada. Tetapi semua itu harus bergantung hasil survei lapangan. Kalau komponen tetap 60, cuma jumlah akhir dari penetapan upah minimum tergantung Dewan Pengupahan Daerah," kata Cak Imin.

Tak Demo, Buruh di Halmahera Pilih Bikin Baliho

Penulis : Kontributor Halmahera, Anton Abdul Karim | Rabu, 3 Oktober 2012 | 21:19 WIB

HALMAHERA, KOMPAS.com - Ratusan karyawan PT Weda Bay Nikcel (WBN) di Halmahera Tengah, Maluku Utara juga turut mendukung gerakan menolak Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang *outsourching*. Hanya saja, para karyawan PT WBN ini menggelar aksi dalam bentuk menyampaikan aspirasi melalui baliho dan spanduk.

Ketua Persatuan Karyawan (Pekarya) PT WBN, Kasim Abdullah saat menghubungi *Kompas.com* melalui sambungan telepon, Rabu (3/10/2012) mengatakan, pihaknya sangat mendukung Persatuan Seluruh Buruh Indonesia (PSBI) dalam menggelar aksi penolakan terhadap peraturan menteri tersebut.

"Kalau untuk demo-demo dan sebagainya kami pertimbangankan lagi. Tapi kami sangat mendukung hapus saja *outsourching* itu," tegas Kasim.

Dia mengatakan, pihaknya memberikan dukungan itu berupa membuat beberapa spanduk dan baliho dengan bertuliskan karyawan PT WBN mendukung sikap para buruh secara nasional. "Ada tulisan seperti Pekarya PT WBN mendesak pemerintah pusat menghapuskan *outsourcing* dan mendukung PSBI dalam gerakannya," ungkap Kasim.

Dia menambahkan, pagi tadi ratusan karyawan PT WBN yang merupakan anggota Pekarya PT WBN melakukan rapat untuk membahas rencana aksi mereka, menyusul ada surat dari PSBI yang meminta dukungan karyawan PT WBN melakukan aksi mogok kerja dalam rangka menolak peraturan menteri tenaga kerja tersebut. Namun pihaknya tidak melakukan apa yang dikehendaki PSBI berupa mogok kerja.

Sebanyak 346 karyawan PT WBN yang tergabung dalam Persatuan Karyawan (Pekarya) PT WBN tetap melakukan aktivitasnya sebagai karyawan perusahan tambang, namun tetap mendukung gerakan yang dilakukan PSBI secara nasional. Dukungan itu berupa pemasangan spanduk-spanduk maupun baliho yang intinya memberikan dukungan kepada rekan-rekan buruh sekaligus menyatakan sikap menolak *outsourcing*. Menurut Kasim, ada lima buah spanduk dan baliho yang dibuat dengan ukuran berbeda. Spanduk dan baliho ini dipasang di areal kamp perusahan PT WBN.

Fraksi PDIP Tampung Aspirasi Buruh

Penulis : Alfiyyatur Rohmah | Rabu, 3 Oktober 2012 | 20:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menampung aspirasi buruh di depan gedung DPRD. Fraksi tersebut akan mengusulkan kenaikan upah minimum buruh. "Upah Minimum Provinsi (UMP) yang menurut bapak ibu masih kecil, kami akan usulkan untuk dinaikkan agar sesuai angka kebutuhan minimal bapak ibu," kata Dwi Rio Sambodo, Sekretaris Fraksi PDIP dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat dalam orasi politiknya, Rabu (3/10/2012).

Rio menungkapkan, sebagai wakil DPRD DKI Jakarta memahami suasana kebatinan buruh yang sedang menuntut keadilan. Pihaknya dan kawan-kawan dari DPRD maupun fraksi PDI Perjuangan akan coba membantu keinginan buruh.

Menurut Rio, tuntutan upah murah, penghapusan *outsourcing,* dan tidak jelasnya pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Jakarta harus sesuai undang-undang. Perekrutan buruh menggunakan sistem *outsourcing* hanya untuk pekerjaan yang bersifat adhock atau tidak tetap.

Rio menambahkan, anggota dewan legislatif akan melakukan pengawasan perusahaan *outsourcing* agar keinginan buruh bisa tercapai. Selain itu, anggota dewan akan terus mencoba mengusulkan kenaikan upah minimum agar dapat mensejahterakan kehidupan buruh.

Rio mengatakan, BPJS tidak akan dilakukan pada Januari 2014. Tetapi pihaknya akan mencoba memajukan jadwal pada tahun 2013 melalui sistem kartu Jakarta sehat yang sesuai dengan sistem BPJS. "Dengan Jokowi-Basuki jadi pemimpin Jakarta, sistem BPJS akan diberlakukan sebagai sistem jaminan di Jakarta," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan buruh mendatangi gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mereka melakukan orasi hingga menyebabkan kemacetan sepanjang Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Editor :
I Made Asdhiana

Apa Kata Jokowi Terkait Aksi Buruh?

Penulis : Kurnia Sari Aziza | Rabu, 3 Oktober 2012 | 18:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Para buruh yang berdemo di Gedung DPRD DKI Jakarta yakin, Gubernur Jakarta terpilih Joko Widodo akan berpihak pada rakyat kecil, seperti buruh. Lalu apa kata mantan Wali Kota Solo itu terkait tuntutan penghapusan sistem *outsourcing*, upah murah dan realisasi BPJS tahun 2014?

"Semuanya yang baik untuk masyarakat, saya setuju-setuju saja," kata pria yang akrab disapa Jokowi, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (3/10/2012).

Saat kembali dipertegas apakah ia mendukung penghapusan sistem *outsourcing*, ia kembali memberi jawaban yang sama.

"Pokoknya semuanya yang baik untuk masyarakat saya setuju," kata Jokowi.

Sementara itu, Jokowi mengatakan salah satu solusi yang paling ampuh dalam mengatasi permasalahan aksi buruh yang rutin dilaksanakan adalah dengan penguatan komunikasi.

"Yang paling penting itu komunikasi, harus ada komunikasi dan dialog. Supaya semuanya dapat *win-win solution*," ujar Jokowi.

Sebelumnya, ribuan buruh melakukan aksi mogok nasional dengan turun ke jalan di pusat-pusat industri kawasan Jabodetabek. Buruh meminta pemerintah segera merealisasikan tuntutan yang disampaikan. Apabila tidak, para buruh akan melakukan aksi yang sama dengan lebih banyak masa.

"Apabila pemerintah belum mengabulkan permohonan kami, akhir Oktober kami akan gelar aksi kembali dengan melibatkan hingga 10 juta orang," ujar Mudhofir.

Mogok nasional ini dilakukan karena tiga tuntutan utama para buruh tersebut belum juga dikabulkan oleh pemerintah. Tiga tuntutan tersebut antara lain, tuntutan para buruh masih sama seperti sebelumnya yaitu penolakan upah murah, penghapusan outsourcing, dan realisasi BPJS tahun 2014.

Mereka mengakui jika pemerintah sudah ada niat baik untuk mendengar tuntutan mereka, akan tetapi realisasinya hingga saat ini belum juga dilakukan. Apabila masih belum ada tanggapan dari pemerintah, rencananya, aksi mogok nasional di bawah MPBI akan berlangsung hingga Kamis (4/10/2012) besok.

Buruh Mogok Seharian, Perusahaan Antisipasi Kerugian

Penulis : Fabian Januarius Kuwado | Rabu, 3 Oktober 2012 | 18:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa oleh puluhan ribu buruh pabrik di kawasan industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (3/10/2012), diperkirakan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang mempekerjakan mereka. Karena ditinggal para buruh seharian, pabrik-pabrik yang berada di kawasan tersebut melakukan antisipasi agar kerugian tidak mencapai angka maksimal.

"Perusahaan sudah antisipasi. Mereka mengejar target produksi sejak malam, sore sebelumnya. Begitu masuk pagi, mereka *nothing to lose* saja," kata Ketua Hubungan Industrial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Dewan Pengurus Kota Jakarta Timur Bambang Adam saat dihubungi *Kompas.com*, Rabu petang.

Bambang menambahkan, meski telah melakukan sejumlah antisipasi, perusahaan-perusahaan di kawasan industri terlengkap itu tetap mengalami kerugian akibat mogok kerja para buruh. Namun, ia tidak bisa menyebutkan berapa nominal kerugian itu.

"Kalau di kawasan industri Pulogadung ada 450 perusahaan. Satu hari kita ambil rata-rata satu perusahaan kehilangan Rp 2 miliar, tapi itu bukan angka tepatnya," ujar Bambang.

Berdasarkan data Apindo, kawasan industri Pulogadung tersebut terdiri dari banyak pabrik besar yang menopang segala sektor mulai dari farmasi, peleburan logam, garmen, hingga otomotif. Jumlah buruh di satu pabrik bisa mencapai 5.000 orang.

Terkait tuntutan buruh untuk menghapus sistem *outsourcing* dan penetapan upah layak, Bambang menjelaskan, Apindo mempunyai posisi mendukung penuh tuntutan para buruh. Meski demikian, pihaknya berharap para buruh tidak melakukan aksi yang merugikan banyak pihak.

Berdasarkan komunikasi terakhir dengan berbagai pihak, mulai dari unsur buruh, pemerintah, dan pengusaha, Bambang memastikan bahwa mogok nasional hanya dilakukan hari ini dan tak akan berlanjut esok. "Tapi mereka menunggu, jika tidak ada tanggapan pemerintah, mereka akan turun lagi," katanya.

Editor :
Laksono Hari W

Dukung Buruh, Bupati Pasuruan Surati Presiden

Penulis : Kontributor Pasuruan, Moh. Anas | Rabu, 3 Oktober 2012 | 17:45 WIB

PASURUAN, KOMPAS.com - Setelah ribuan massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memblokade Jalur Pantura Pasuruan-Probolinggo, akhirnya Bupati Pasuruan Jawa Timur Dade Angga mengabulkan tuntutan mereka.

Dade menandatangani dua surat yang akan dilayangkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) berisi dukungan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial (BPJS) dan

pencabutan izin bagi perusahaan yang memperjakan karyawan dengan status *outsorching*, Rabu (3/10/2012).

"Izin operasional pengusaha akan dicabut jika melanggar hukum. Seperti tidak membayar gaji sesuai UMK," tegas Dade Angga.

Dalam surat pertama menyebutkan Pemkab Pasuruan mendesak Presiden SBY segera mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur besaran dan tata cara pembayaran iuran jaminan kesehatan.

"Dan kawan-kawan buruh juga menuntut agar pembayaran iuran jaminan kesehatan itu dibayar perusahaan yang besarannya sama dengan Jamsostek," terangnya.

Sedangkan di surat kedua, Bupati Pasuruan juga menantangani empat tuntutan. Diantaranya besaran UMK pada tahun 2013 nanti harus seratus persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Karena hampir setiap tahunnya besaran UMK seringkali dibawah nilai KHL" ujar Jazuli, ketua FSPMI Pasuruan.

Sedangkan tiga tuntutan lainnya adalah penerapan upah minimum sektoral Kabupaten pada 2013, pencabutan status *outsourcing* yang tidak sesuai aturan yang ada, serta meysosialisasikan Perda No. 22 Tahun 2011 tentang sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Kenaikan Upah Buruh Tergantung Survei Akhir

Penulis : Alfiyyatur Rohmah | Rabu, 3 Oktober 2012 | 17:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta belum bisa menentukan upah minimum buruh di wilayah DKI Jakarta. Upah tersebut baru bisa ditentukan setelah survei akhir yang akan dilaksanakan pada November 2012.

"Upah yang dibahas untuk 2011 sudah melakukan survei sebanyak 8 kali. Upah buruh yang awalnya Rp 1.529.140, setelah melakukan survei, naik menjadi Rp 1.844.000," kata Sekretaris Dewan Pengupahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta, Dwi Untoro, Rabu (3/10/2012) di Jakarta.

Dwi menambahkan, upah tersebut belum final karena masih akan dilakukan survei akhir pada bulan depan. Survei tersebut bukan dilaksanakan oleh Disnakertrans, melainkan oleh perusahaan, pekerja, dan pemerintah.

Ia mengatakan, upah di DKI Jakarta akan meningkat setelah pelaksanaan survei, tetapi sulit menembus angka Rp 2 juta untuk upah minimum buruh. Peningkatan tersebut masih di bawah tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah menjadi Rp 2,5 juta. Selain itu, kata Dwi, Disnakertrans akan melakukan perlindungan jaminan sosial agar semakin baik di wilayah Jakarta. Kebijakan yang akan ditetapkan akan berpihak kepada buruh. "Kita enggak ada niat untuk menelantarkan buruh," katanya.

Dwi menyatakan, penentuan upah buruh masih melalui proses pemantauan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh, sehingga penetapan kenaikan pun belum bisa ditentukan. Disnakertrans masih menunggu hasil survei akhir yang akan dilaksanakan kembali.

Aksi unjuk rasa para buruh tersebut awalnya dilakukan di depan Gedung DPRD Propinsi DKI Jakarta. Di sana demonstran diterima oleh anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan. Perwakilan DPRD menampung aspirasi buruh untuk mengupayakan kenaikan upah. Setelah berorasi di depan kantor DPRD, buruh melakukan *long march* ke kantor Disnakertrans DKI Jakarta untuk menuntut kenaikan upah minimum buruh.

Buruh Ancam Adukan Kadisnakertrans kepada Jokowi

Penulis : Alfiyyatur Rohmah | Rabu, 3 Oktober 2012 | 17:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh yang berdemo di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mengancam kepala dinas jika tuntutan mereka tidak didengarkan. Ancaman tersebut berupa pengaduan kepada Gubernur Baru Joko Widodo agar kepala dinas diganti.

"Pak kepala dinas, kalau tidak mau mendengarkan aspirasi kami, kita akan minta pak Jokowi untuk mengganti Kepala Dinas Ketenagakerjaan menjadi Kepala Dinas Perkuburan! (Pemakaman)," kata William, salah satu buruh yang berorasi di depan kantor Disnakertrans, Rabu (3/10/2012).

Buruh yang melakukan aksi menyebut Jokowi merupakan pimpinan pilihan buruh. Mereka pun banyak berharap pada mantan Wali Kota Solo itu.

Dalam orasinya, salah satu pemimpin menyebut Joko Widodo pro rakyat ketika memimpin di Solo. Buruh pun berharap Jokowi akan melakukan hal serupa kepada buruh yang tinggal di wilayah DKI Jakarta.

"Jokowi adalah pimpinan pilihan buruh!" ucapnya.

Sebelumnya, massa yang terdiri dari buruh-buruh di daerah Jakarta melakukan aksi di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Kemudian mereka long march menuju Disnakertrans untuk menuntut kenaikan upah minimum dan penghapusan *outsourcing*.

Buruh di MM 2100 Mulai Membubarkan Diri

Penulis : Roderick Adrian Mozes | Rabu, 3 Oktober 2012 | 16:41 WIB

BEKASI, KOMPAS.com - Ribuan buruh yang memadati pintu masuk kawasan industri MM 2100, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, mulai membubarkan diri pukul 16.00 WIB, Rabu (3/10/2012). Mereka membubarkan diri setelah mendengar komando.

Pembubarkan aksi tersebut dikomandoi dengan orasi Presiden KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Andi Gani Nenawea.

"Jangan masuk ke tol, dengarkan komando dari saya, hari ini kita tidak usah masuk tol. Tapi, jika pemerintah tidak menepati janjinya, kita akan masuk tol dengan massa yang lebih banyak," kata Andi, Rabu (3/10/2012).

Aksi mogok kerja disertai unjuk rasa buruh yang dimulai Pukul 08.00 WIB, telah membuat membuat ratusan pabrik di kawasan industri itu berhenti produksi. Sejak pagi, buruh berkonvoi menggunakan motor dan mengajak buruh yang masih bekerja untuk berhenti dan turut berunjuk rasa.

Pada pukul 14.00 WIB, buruh memadati pintu masuk MM 2100 yang berada beberapa ratus meter dari pintu tol Cibitung. Aksi ini membuat kemacetan di dalam kawasan industri MM 2100, namun tidak merembet ke jalan tol.

Aksi yang dilakukan serentak di kawasan Jabodetabek ini, merupakan bentuk protes buruh yang merasa dirugikan dengan sistem kerja *outsourcing*. Selain itu mereka juga menolak upah buruh yang masih terbilang rendah. Sehingga mereka menuntut agar pemerintah menaikkan upah buruh. Aksi berlangsung damai dan kondusif.

Jalanan Jakarta Malah Sepi Pendemo

Penulis : Sabrina Asril | Rabu, 3 Oktober 2012 | 16:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Demo besar buruh yang terjadi hari ini, Rabu (3/10/2012) tidak mempengaruhi kondisi arus lalu lintas di Jakarta. Ibu Kota malah lengang karena hanya segelintir kaum buruh yang berunjuk rasa di Jakarta. Volume kendaraan berkurang 40-45 persen dari hari-hari biasanya.

"Hingga saat ini situasi kondusif di Jakarta. Kendaraan juga berkurang 40-45 persen dari yang biasanya ada sehari-hari," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Rabu (3/10/2012), di Mapolda Metro Jaya.

Rikwanto memperkirakan, berkurangnya volume kendaraan lantaran banyaknya masyarakat yang mengikuti aksi demo buruh.

Berkurangnya kendaraan lalu lintas tampak terjadi di sejumlah titik dan ruas jalan seperti Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia, Jalan Gatot Subroto, simpang Semanggi, jalan MH Thamrin, dan di sekitar kawasan Monas. Padahal, sehari-harinya di ruas jalan itu aktivitas perjalanan warga paling tinggi terjadi.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, setidaknya ada 20 juta perjalanan yang melintas di Ibu Kota. Sebagian besar dilakukan oleh kendaraan pribadi baik sepeda motor dan mobil.

Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sendiri mencapai 1.117 per hari. Kondisi yang tidak lazim di Jakarta ini bisa jadi karena aktivitas unjuk rasa lebih terpusat di

kawasan industri seperti Tangerang dan Bekasi.

Lokasi-lokasi di Jakarta yang biasa dijadikan tempat berunjuk rasa pun sepi pendemo seperti di Bundaran Hotel Indonesia, Istana Negara, dan Gedung DPR/MPR. Kepadatan justru terjadi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, yang dipenuhi sekitar 200 buruh berunjuk rasa; kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara; dan di depan Kemenakertrans, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur.

Hal ini pun diakui Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Komisaris Besar M Chairul Nur Alamsyah. "Situasi di beberapa titik sudah kondusif kecuali KBN Cakung, Bekasi dan Tangerang, lainnya sudah aman," ujarnya.

Nur mengaku belum ada informasi lebih apakah demo buruh yang ada di Bekasi dan Tangerang akan menuju Jakarta. Pihak kepolisian, lanjutnya, akan terus berjaha hingga batas akhir waktu berunjuk rasa pukul 18.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, elemen buruh akan melakukan aksi unjuk rasa besar, Rabu (3/10/2012). Setidaknya akan ada 23.000 buruh yang melakukan aksinya dari pagi hingga siang hari. Mereka menuntut dihapuskannya sistem *outsourcing*.

Kemenakertrans: Aturan "Outsourcing" Sudah Diketatkan

Penulis : Imanuel More | Rabu, 3 Oktober 2012 | 16:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menyikapi tuntutan kalangan pekerja atau buruh, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan mulai menggalakan pengetatan dalam aturan *outsourcing*. Pengetatan tersebut mencakup tiga hal.

"Kebijakan pengetatan dari Kemenakertrans terkait *outsourcing* mencakup soal kelembagaan, pembenahan regulasi perizinan, dan pengetatan jenis pekerjaan," urai Dita Indah Sari, juru bicara Kemenakertrans, saat ditemui wartawan di Kemenakertrans, Rabu (3/10/2012).

Ia mengulas, dalam hal kelembagaan, pengetatan akan diterapkan dalam bentuk status lembaga *outsourcing*. Menurut Dita, ke depan tidak akan ada lembaga *outsourcing* yang berstatus koperasi atau yayasan.

"Semuanya diwajibkan berstatus PT," kata Dita.

Dalam bidang perizinan, pengetatan akan dilakukan dengan regulasi baru yang mewajibkan izin dikeluarkan oleh gubernur. Sebelumnya, izin bagi perusahaan *outsourcing* dikeluarkan oleh daerah tingkat dua.

"Untuk itu akan diadakan registrasi ulang untuk semua perusahaan *outsourcing*," kata Dita.

Pengetatan ketiga adalah pada jenis perusahaan yang bisa memanfaatkan tenaga kerja *outsourcing*. Pengetatan tersebut sejalan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang hanya membolehkan lima jenis pekerjaan untuk dilayani pekerja *outsourcing.*

"Kelima jenis pekerjaan itu adalah jasa keamanan atau sekuriti, jasa kebersihan, seperti *cleaning service*, katering, pertambangan dan perminyakan, serta jasa transportasi," ujar Dita.

Ratusan Buruh Juga Geruduk DPRD DKI

Penulis : Alfiyyatur Rohmah | Rabu, 3 Oktober 2012 | 15:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi demo buruh yang dilaksanakan serempak di 80 area industri dan DPRD kota setempat juga terjadi di DPRD Propinsi DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ratusan buruh melakukan orasi untuk menghapus sistem *outsourcing* di perusahaan.

"Kami menolak *outsourcing*, tertibkan perusahaan penyalur jasa pekerja dan kami menolak upah murah," kata salah satu orator di depan gedung DPRD Propinsi DKI Jakarta, Rabu (3/10/2012).

Hari ini terdapat 3 juta pendemo yang turun ke jalan di wilayah Jabodetabek. Jika aspirasi tidak di dengarkan, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan menurunkan 10 juta buruh se-Indonesia. Selain itu, para pendemo juga menuntut ketidaklayakan upah pekerja sebesar 1,5 juta rupiah.

Jumlah tersebut dinilai tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup para buruh. Terlebih buruh tidak memiliki jaminan kesehatan.

Dalam tuntutannya ini, para buruh meminta anggota DPRD mendengarkan aspirasi mereka. Mereka juga menuntut agar anggota dewan dapat berpihak kepada buruh, bukan pada pemilik perusahaan.

Dari pantauan Kompas.com, sekitar delapan bus berjejer di depan gedung DPRD. Puluhan petugas kepolisian terlihat sedang berjaga-jaga.

Demo melibatkan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (KSPI). Sepanjang jalan Kebon Sirih terlihat macet. Buruh menutup 3/4 jalan di depan gedung DPRD tersebut. Saat ini buruh menuju Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.

Gubernur Siap Larang "Outsourcing" di Jabar

Penulis : Kontributor Bandung, Rio Kuswandi | Rabu, 3 Oktober 2012 | 15:23 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Keinginan puluhan ribu pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat untuk menemui Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terkabulkan.

Massa sudah menunggu gubernur sekitar pukul 10.07 WIB di depan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (3/10/2012).

Dengan kesabaran dan ditemani lantunan musik dangdut, akhirnya Ahmad Heryawan datang menghadap massa dan menaiki panggung orasi sekitar pukul 12.32 WIB.

Heryawan menyambut baik aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh SPSI Jabar. Ia juga menyatakan janjinya dan akan berusaha memenuhi tuntutan para kaum buruh di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

"Saya akan lakukan tindakan untuk kesejahteraan kaum buruh dengan memenuhi berbagai macam tuntutan dari kalian. Kita akan lakukan moratorium terhadap penggunaan sistem kerja *outsourcing* di masing-masing kabupaten/kota, selanjutnya untuk mengefektifkan pngawasan maka harus bentuk posko *outsourcing* yang diisi unsur buruh," tegas Heryawan kepada puluhan ribu orang di atas panggung orasi, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/10/2012)

Ia melanjutkan, untuk kesejahteraan buruh, pihaknya akan membuat dan menandatangani surat pelarangan *outsourcing* dan sistem kontrak kerja di Jawa Barat.

Serta, kata dia, mencabut Permenakertrans RI No 13/MEN/2012, juga kepada Menteri Kesehatan untuk tidak memotong iuran BPJS Kesehatan.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan membuat surat rekomendasi kepada Menteri Keuangan agar segera menaikan nilai PTKP. "Buruh harus sejahtera, apalagi di Jawa Barat, saya mendukung akan hal itu, hidup buruh.. hidup buruh... hidup Jawa Barat. Merdeka," teriak Heryawan.

Selain para buruh, aksi unjuk rasa ini dipenuhi oleh berbagai elemen mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Bandung. Mereka pun turut mendukung peningkatan kesejahteraan kaum buruh di Indonesia.

Setelah berakhirnya pembicaraan Heryawan di depan panggung, tak lama kemudian seluruh massa dan mahasiswa membubarkan diri. Sekitar 13.23 WIB arus lalu lintas di Jalan Diponegoro, Bandung, Rabu (3/10/2012), sudah mulai lancar dan dapat dilalui berbagai macam kendaraan.

Tunggu Gubernur, Ribuan Buruh Berjoget Dangdut

Penulis : Kontributor Bandung, Rio Kuswandi | Rabu, 3 Oktober 2012 | 15:15 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa dalam menyuarakan polemik masyarakat kepada pemerintah biasanya identik dengan cemoohan, baku hantam serta kekerasan,

sehingga pada ujungnya mengakibatkan situasi menjadi tak menentu, bahkan tak sedikit yang berujung pada peristiwa berdarah-darah.

Namun demikian, lain halnya dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, di depan Gedung Sate Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu, (3/10/2012).

Aksi ini terbilang unik dibandingkan beberapa aksi unjuk rasa sebelumnya. Sebanyak 30 ribu buruh yang tergabung dalam organisasi buruh SPSI malah menyetel lagu dangdut, lalu bergoyang dan berdendang bersama-sama.

Ketua DPD SPSI Jabar Roy Jinto Feriyanto mengatakan, lantunan lagu dan goyangan ini dilakukan sambil menunggu kehadiran Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

"Aksi yang kami lakukan ini adalah aksi cinta damai, bukan kekerasan," teriak Roy Jinto di atas panggung orasi.

Namun, kata dia, tujuan utamanya ingin bertemu dengan gubernur. "Kami akan tunggu kehadirannya, kami akan tuntut kesejahteraan buruh menjadi lebih baik lagi, jika gubernur tidak juga keluar, kami akan melakukan aksi yang lebih ekstrem," ujar Roy Jinto saat diwawancarai *Kompas.com* di panggung orasi, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Rabu, (3/10/2012)

Sesekali di samping lantunan lagu dan goyangan dangdut, Roy menyampaikan orasi-orasi tuntutan kepada gubernur untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat.

Mereka menuntut kepada gubernur, salah satunya adalah mensejahterakan kaum buruh dengan lebih baik lagi. "Kepada gubernur kami meminta untuk membuatkan surat pelarangan *outsourcing* dan sistem kerja kontrak di Jabar, mencabut Permenakertrans RI No.13/MEN/2012 dari 60 item menjadi 122 item, meminta iuran buruh tidak dipotong BPJS Kesehatan serta kepada Menteri Keuangan RI agar segera menaikan PTKP dari Rp1.320.000 menjadi Rp5.000.000," pungkasnya.

Jalan Akses ke Kawasan Industri Jatake Ditutup Buruh

Penulis : Luthfie Febrianto | Rabu, 3 Oktober 2012 | 15:07 WIB

TANGERANG, KOMPAS.com — Seratusan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat buruh melakukan aksi mogok nasional di Kawasan Industri Jatake, Tangerang. Mereka juga menutup akses jalan ke kawasan tersebut.

Pantauan *Kompas.com* di lokasi, para buruh yang berasal dari SPSI, FSPMI, dan KSBI melakukan aksinya dengan mengendarai sepeda motor. Mereka menuntut penghapusan sistem *outsourcing* dan upah layak sejak pukul 07.00 WIB. Rencananya mereka akan tetap menutup jalan akses tersebut hingga pukul 17.30 WIB.

Dalam orasinya, para buruh sempat mengecam anggota serikat pekerja yang terbukti menikmati upah menjadi koordinator *outsourcing*. Mereka juga mengancam akan membakar anggota yang terbukti menjadi koordinator *outsourcing.*

"Jika ada yang terbukti menjadi koordinator *outsourcing* maka tidak ada hukuman lain selain membakar orang tersebut," ujar salah satu orator dari FSPMI.

Aksi *sweeping* sempat mewarnai mogok buruh tersebut. Mereka mendatangi sejumlah pabrik di kawasan Industri Jatake untuk merazia para buruh yang masih bekerja.

"Sudah tinggal sedikit Pak yang di dalam, sudah pada keluar semua," ujar salah seora g petugas keamanan pabrik saat mencoba mencegah masuknya para demonstran.

Namun, kendati sudah dicegah petugas, para buruh akhirnya berhasil mengeluarkan rekan mereka yang masih bekerja. Para buruh yang baru bergabung mendapat sambutan tepuk tangan dari para buruh lainnya.

Meski melakukan *sweeping*, akses Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, dan Gajah Tunggal, Tangerang, tetap lancar dilalui para pengendara. Tidak ada pengamanan berlebihan dari kepolisian.

Tiga Puluh Ribu Buruh Kepung Gedung Sate

Penulis : Kontributor Bandung, Rio Kuswandi | Rabu, 3 Oktober 2012 | 15:05 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Lebih dari 30.000 orang yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengepung Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/10/2012).

"Kita datang dari berbagai kota dan kabupaten di Jabar, di antaranya, Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Sumedang. Saat ini dari Kota Bandung saja sudah hadir 30.000 anggota, dan kami yakinkan anggota kami akan datang sekitar 50.000 anggota dalam aksi unjuk rasa damai di Gedung Sate ini," jelas Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) SPSI Jawa Barat Roy Jinto Feriyanto saat ditemui *Kompas.com* di panggung orasi seusai menyuarakan suara di depan Gedung Sate Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/10/2012).

Ia menjelaskan, pasukannya datang khusus untuk bertemu dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. "Kedatangan kami hari ini hanya mau bertemu dengan gubernur, tidak dengan siapa-siapa lagi selain bertemu dengan gubernur. Jika gubernur tidak memenuhi permintaan kami, kami akan melakukan aksi yang lebih hebat lagi serta mendatangkan massa lebih banyak," tegas Roy.

Adapun tuntutan-tuntutan kepada gubernur, kata dia, yakni membuat surat pelarangan *outsourcing* dan sistem kontrak kerja di Jabar.

Kedua, mendesak gubernur membuat surat rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) untuk segera mencabut Permenakertrans RI No 13/MEN/2012 dari 60 *item* menjadi 122 *item*.

Ketiga, meminta dibuatnya surat rekomendasi melalui Menakertrans dan Menteri Kesehatan agar upah buruh tidak dipotong iuran BPJS Kesehatan serta membentuk Dewan Pengawas Ketenagakerjaan serta tripartit dan sentralisasi.

Tuntutan lainnya adalah meminta dibuatkan surat rekomendasi kepada Menteri Keuangan agar segera menaikkan nilai PTKP menjadi Rp 5 juta yang sebelumnya hanya Rp 1.320.000.

"Semua itu kami suarakan untuk Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Kami berharap bertemu dengan gubernur hari ini juga. Kami akan buktikan persatuan kami untuk menuntut kesejahteraan buruh menjadi lebih baik," tegasnya.

Kadin: "Outsourcing" Bukan Barang Haram

Penulis : Didik Purwanto | Rabu, 3 Oktober 2012 | 14:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komtap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Iftida Yasar menganggap sistem kerja *outsourcing* bukan barang haram. Sistem tersebut justru dianggap mampu menjadi salah satu solusi perluasan kesempatan kerja di tengah tingginya angka pengangguran.

Selain itu, sistem ini juga akan melindungi pekerja dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat. Tentunya perusahaan juga berusaha melakukan efisiensi biaya produksi. "*Outsourcing* itu bukan barang haram," tegas Iftida di Jakarta, Rabu (3/10/2012).

Menurut Iftida, kesejahteraan bangsa ini menjadi prioritas untuk segera diwujudkan agar pekerja kita mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa kesejahteraan, rasanya susah untuk mewujudkan negara tanpa karyawan kontrak apalagi tanpa *outsourcing*.

"Tapi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bukan *outsourcing* yang dihapus, melainkan praktik pelaksanaan *outsourcing* yang salah dan melanggar hukum yang harus dibenahi," tambahnya.

Menurutnya, pelaksanaan *outsourcing* yang baik dan benar yang memenuhi hak-hak pekerja harus dilindungi. Hal itu disebabkan karena *outsourcing* bukan barang haram dan dapat menjadi salah satu solusi perluasan kesempatan kerja di tengah tingginya angka pengangguran tadi.

"Sudah waktunya seluruh *stakeholder outsourcing* memikirkan langkah-langkah terhadap penghapusan *outsourcing* yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bukan meninabobokan masyarakat dengan gerakan hapuskan *outsourcing*, yang tidak akan pernah bisa dihapus," katanya..

Iftida menambahkan, sepanjang sistem *outsourcing* mampu dikelola, direncanakan, dijalankan dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten, *outsourcing* akan menjadi pilihan strategis perusahaan dan peluang bagi karyawan menuju sejahtera bersama," kata penulis buku *Outsourcing Tidak Akan Pernah Bisa Dihapus* ini.

Pernyataan tersebut juga diamini oleh Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto. Ia mengatakan, sistem kerja *outsourcing* merupakan sistem kerja yang tidak bisa dihindari. "Saya memang beda pendapat tentang *outsourcing.* Sistem ini belum tentu merugikan," kata Suryo.

Menurutnya, masyarakat memang belum banyak mengerti tentang sistem kerja *outsourcing* ini. Padahal, sistem tersebut dianggap mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Suryo pun mencontohkan banyak perusahaan i India yang memakai tenaga *outsourcing* dari Amerika Serikat. "Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari," jelasnya.

Editor :
Erlangga Djumena

Pukul 12.00, Rombongan Buruh Tiba di Kemnakertrans

Penulis : Imanuel More | Rabu, 3 Oktober 2012 | 13:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rombongan buruh yang berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akhirnya mulai berdatangan. Rombongan pertama tiba di kantor yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, itu tepat pukul 12.00 WIB.

"Kami dari PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia). Tadi yang kumpul di Kalideres (Jakbar) jumlahnya 120 orang," kata Joko, salah seorang pengunjuk rasa, saat ditemui *Kompas.com* di depan Kantor Kemenakertrans, Kuningan, Rabu (3/10/2012) siang.

Rombongan tiba dengan menumpang beberapa metromini. Oleh petugas keamanan yang dipimpin Kabag Operasi Polres Metro Jakarta Selatan ajun Komisaris Besar Yossie Priyambodo, rombongan tersebut langsung diarahkan masuk ke kompleks perparkiran Kemnakertrans. Rombongan tidak langsung menggelar aksi. Setelah turun dari kendaraan, rombongan langsung bergerak menuju masjid di kompleks kementerian untuk menunaikan shalat dzuhur.

Menurut Joko, tuntutan yang hendak disampaikan masih sama. Dua tuntutan utama, yakni penghapusan sistem *outsourcing* dan penetapan upah minimum yang layak. Petugas keamanan telah bersiaga sejak pagi di sekitar kompleks kementerian. Di lokasi tersebut juga terlihat tiga ambulans bersiaga mengantisipasi kemungkinan jatuhnya korban.

Kepanasan, Mereka Berteduh di Bawah Pohon

Penulis : Reporter RakaFM Bandung, Indra | Rabu, 3 Oktober 2012 | 13:17 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Sebagian buruh yang berdemonstrasi di depan Gedung Sate, Bandung, Rabu (3/10/2012), memilih berteduh di bawah pohon yang ada di sekitar lokasi dengan alasan cuaca yang panas.

Mereka, yang sebagian kaum perempuan, memilih tidak ikut berorasi bersama teman-temannya karena tidak tahan dengan teriknya cuaca Kota Bandung siang ini. "Duh, panas. Gak kuat saya.... Takut pingsan," demikian kata seorang pengunjuk rasa asal Majalaya.

Meskipun demikian, sebagian besar pengunjuk rasa tidak terusik dengan teriknya cuaca siang ini. Para buruh yang tergabung dalam Kelompok Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat, dalam menyuarakan aspirasi, yaitu menuntut dihapuskannya sistem outsourcing, kenaikan upah, dan tidak adanya pemotongan upah untuk iuran BPJS Kesehatan.

Saat ini para buruh yang berasal dari wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Sumedang ini berangsur-angsur mulai meninggalkan area Gedung Sate.

Berita Foto: Demo Buruh di Kawasan Industri Pulogadung

Penulis : Andrean Kristianto | Rabu, 3 Oktober 2012 | 13:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ribuan buruh yang bekerja di Kawasan Industri Pulogadung ikut berunjuk rasa di hari mogok buruh nasional, Rabu (3/10/2012). Massa memblokade jalan masuk ke kawasan industri ini.

Sebagian buruh lain sejak pagi berkeliling untuk mengajak para pekerja yang berada di kawasan ini untuk ikut berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya. Mereka melakukan *sweeping* sejak pukul 07.00 WIB.

Aksi para buruh ini menyebabkan Kawasan Industri Pulogadung lumpuh total dan tidak ada kegiatan produksi yang berjalan. Ada tiga tuntutan yang diteriakkan oleh buruh, yaitu penghapusan sistem kerja *outsourcing*, menolak upah murah, dan pemberian jaminan kesehatan. Para buruh melakukan aksi dengan berorasi, membacakan puisi, dan bernyanyi di bundaran kawasan industri yang berada di Jakarta Timur itu.

Berdasarkan pantauan *Kompas.com* di lokasi, ratusan buruh memulai aksi dengan berkonsolidasi di pabrik-pabrik di Kawasan Industri Pulogadung sekitar pukul 07.00 WIB. Setelah itu, massa buruh pun memecah kelompok menjadi lima bagian. Empat kelompok berkumpul di akses masuk kawasan, sedangkan satu kelompok melakukan *sweeping* di pabrik-pabrik.

Para buruh menutup empat akses masuk ke kawasan industri, yaitu dari Jalan Kawasan Industri Pulogadung, Cakung; Jalan Buaran, Pulogadung; Pulogadung Trade Center; dan Jalan Bekasi Raya. Pengendara kendaraan bermotor yang hendak melintas pun diinstruksikan memutar balik dan mencari jalur alternatif.

Massa buruh yang melakukan *sweeping* datang ke pabrik menggunakan kendaraan roda dua. Beberapa perwakilan memasuki pabrik dan mengajak para buruh lainnya untuk ikut aksi dengan menggunakan pengeras suara. Beberapa buruh pun turut mengikuti aksi dan melakukan konvoi ke pabrik-pabrik selanjutnya.

Pabrik yang berada di kawasan industri tersebut memproduksi berbagai barang, seperti garmen, farmasi, elektronik, dan kertas. Akibat unjuk rasa para buruh, aktivitas di pabrik-pabrik tersebut pun lumpuh. Hanya terdapat petugas keamanan yang berada di depan pabrik.

Editor :
A. Wisnubrata

Demo Buruh, Jalan Raya Bogor Km 35 Sempat Ditutup

Penulis : Robertus Belarminus | Rabu, 3 Oktober 2012 | 12:44 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa buru yang berlangsung di beberapa pabrik yang ada di sepanjang Jalan Raya Bogor sempat membuat kemacetan. Khususnya di Kilometer 35 Jalan Raya Bogor, Cilodong, Depok. Ribuan buruh tumpah ruah di badan jalan. Akibatnya kemacetan pun sempat terjadi selama hampir dua jam.

Kepala Polisi Resor Kota Depok, Komisaris Besar Mulyadi Kaharni yang ditemui di lokasi membenarkan hal tersebut. Meski tak terjadi kericuhan, ruas jalan sempat ditutup oleh aksi buruh sejumlah perusahaan.

"Tadi berlangsung tertib. Ada sekitar 4.000 orang lebih. Dari beberapa PT di sini, pertama memang di tutup (buruh) ya, sekitar hampir dua jam. Kami buka, dan berlakukan sistem satu jalur, jadi dibuka separuh," katanya.

Menurut Mulyadi, aksi dimulai pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.30 WIB tadi. Sebanyak 300 personel gabungan dari Polisi, TNI, Dishub, dan Sat Pol PP pun dikerahkan untuk mengamankan aksi agar berlangsung tertib.

Marsunu, Ketua Serikat Pekerja PT Sanyo mengatakan, hampir semua buruh pekerja di sepanjang Jalan Raya Bogor melakukan aksi. Massa berasal dari buruh PT Sanyo, PT Meiwa Indonesia Plant II, dan beberapa perusahaan di kota Depok lainnya. Mereka tergabung dalam Forum Buruh Depok, yang berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

"Hari ini kami sesuai dengan yang diinstruksikan di tingkat nasional, melakukan aksi dalam artian mogok. Dan dari kita hampir semua perusahaan di depok tidak keberatan untuk aksi ini. Kalau tuntutannya yaitu tolak *outsourcing*, tolak upah murah, dan kemudian menjalankan jaminan kesehatan di tahun 2014," ujar Marsunu.

Menanggapi penutupan jalan yang menyebabkan lalulintas sempat macet, Marsunu mengatakan, sebenarnya instruksinya tidak menutupi jalan, cuma kalau hari ini terlihat seperti yang itu tadi, itu sebenarnya lebih kepada dampak, karena jumlahnya banyak akhirnya sampai ke jalan. "Proses mati tolalnya dua jalur ini satu jam lebih hampir dua jam lah, sempat macet memang," katanya.

Marsunu berharap agar pemerintah, dalam hal ini di wilayah kota Depok, melalui Wali Kota Depok mau mendengar aspirasi dan tuntutan mereka. Apabila tidak dipenuhi, sambungnya, buruh akan melakukan aksi serupa lagi.

"Jangan salahkan kalau tuntutan tidak dipenuhi kami akan melakukan aksi lagi. Tadi kita minta audensi dengan Wali Kota Depok, yang kita ingin bukan cuma retorika, kita inginkan realisasi. Jangan sampai tidak pro kepada buruh," ujarnya.

Dari pantauan *Kompas.com,* massa yang menutup jalur hampir dua jam itu, perlahan tertib meninggalkan jalan dan kembali ke pabrik. Beberapa aparat Polisi dan TNI juga terlihat dilokasi. Mereka membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 11.00 WIB.

Aksi Buruh di Cikarang

BEKASI, KOMPAS.com — Unjuk rasa ratusan ribu buruh juga terjadi di kawasan industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/10/2012). Aksi dimulai pukul 08.00 WIB saat ribuan buruh langsung keluar dari pabrik dan mulai berkonvoi menggunakan motor. Buruh yang berkonvoi berhenti di setiap pabrik di kawasan tersebut kemudian meminta buruh yang masih bekerja agar menghentikan aktivitasnya dan keluar dari pabrik.

Meskipun ada buruh yang konvoi berkeliling kawasan pabrik, massa buruh lebih terkonsentrasi di depan pabrik masing-masing, bahkan beberapa memilih pulang. Hingga pukul 11.30 WIB, ribuan buruh masih berada di dalam kawasan industri tersebut.

Untuk menjaga ketertiban aksi, sejumlah petugas berjaga-jaga di depan gerbang Tol Cibitung. Mereka mengerahkan satu mobil Baracuda dan *water canon* mengingat pada aksi sebelumnya buruh merangsek masuk ke tol dan menutup akses sehingga mengakibatkan kemacetan.

Selain di MM 2100, aksi juga terjadi di kawasan industri Pulo Gadung, Tangerang, Kawasan Berikat Nusantara Cilincing dan depan Kemnakertrans. Aksi para buruh ini dimaksudkan untuk menolak sistem kerja *outsourcing*.

Editor :
A. Wisnubrata

Ajak Aksi, Buruh Pulogadung Dobrak Pagar

Penulis : Fabian Januarius Kuwado | Rabu, 3 Oktober 2012 | 12:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi mogok nasional buruh di kawasan industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (3/10/2012), diwarnai insiden. Para buruh mendobrak pintu salah satu pabrik saat tengah mengajak buruh lainnya untuk turut menggelar aksi unjuk rasa.

Berdasarkan pantauan *Kompas.com*, semula para buruh yang melakukan *sweeping* sampai di depan pabrik sabun yang diketahui bernama Total. Para buruh tersebut pun berteriak-teriak memangil buruh yang masih beraktivitas di dalam pabrik untuk keluar dan mengikuti aksi. Namun, karena pagar pabrik tak kunjung dibuka, ratusan buruh langsung mendekat dan menggoyangkan pagar.

Akibat tak kuat lagi menahan goyangan buruh, pagar besi berwarna putih setinggi 1 meter itu pun lepas dari jalurnya dan jatuh ke dalam halaman pabrik. "Ayo keluar, keluar. Satu nasib satu penderitaan. Masih ada motornya itu," teriak para buruh.

Setelah insiden tersebut, para buruh pabrik tersebut keluar dan menyambut positif ajakan para buruh. Para buruh yang semula berada di dalam pabrik pun turut mengikuti aksi. Beberapa orang ada yang menumpang kendaraan roda dua buruh lainnya, beberapa lagi ada yang menggunakan motor sendiri untuk melanjutkan aksi mereka.

Massa yang melakukan aksi tersebut merupakan organisasi buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja dan Buruh Indonesia (MPBI). Kelompok buruh itu terdiri dari tiga konfederasi buruh, di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Mogok nasional yang dilakukan buruh kali ini merupakan puncak konsolidasi para buruh sejak berbulan-bulan lalu. Para buruh menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menetapkan upah layak dan menghapuskan sistem kerja *outsourcing*.

Hingga pukul 11.45 WIB, massa yang semula menutup akses masuk kawasan industri Pulogadung telah terpusat di Bunderan Kantor Pajak, Kawasan Industri Pulogadung. Akibatnya, akses masuk kawasan pun mulai terlihat lengang. Pengendara kendaraan bermotor yang sebelumnya dilarang masuk pun kini sudah mulai melintas.

Demo Buruh, Jalur Pasuruan-Probolinggo Macet Total

Penulis : Kontributor Pasuruan, Moh. Anas | Rabu, 3 Oktober 2012 | 12:17 WIB

PASURUAN, KOMPAS.com - Jalur pantura Pasuruan-Probolinggo, Jawa Timur, macet total selama lebih dari dua jam lebih akibat aksi yang digelar sekitar 1.000 buruh yang tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Mereka menggelar orasi tepat di depan kantor Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Jalan Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/10/10).

Sebelum menggelar orasi, ribuan massa buruh FSPMI Pasuruan itu langsung menutup kedua ruas jalur. Baik dari arah Surabaya yang menuju Probolinggo, maupun arah sebaliknya. Sejumlah petugas buruh berkaus hitam itu berdiri tegas badan jalan. Kemacetan panjang pun tidak terhindarkan.

Kemacetan terjadi sepanjang sekitar 10 kilometer dan berlangsung selama lebih dari dua jam. Setelah semua kendaraan terhenti, sejumlah perwakilan buruh menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Bupati Pasuruan.

Mereka antara lain menuntut Bupati segera melayangkan surat secara resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberlakukan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial (BPJS). Sehingga para buruh bisa mendapatkan jaminan kesehatan selama berkerja.

Untuk mengurai kemacetan panjang, sejumlah polisi lalu lintas dari Polres Pasuruan mengarahkan para pengguna jalan untuk mencari jalan alternatif.

MPBI: Konsentrasi Demo Buruh Bukan di Jakarta

Penulis : Kurnia Sari Aziza | Rabu, 3 Oktober 2012 | 12:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan buruh kembali melakukan aksi mogok nasional dengan turun ke jalan, di pusat-pusat industri kawasan Jabodetabek, Rabu (3/10/2012). Namun, hingga pukul 10.30 WIB, situasi di depan Istana Negara dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) masih terpantau kondusif.

Pantauan *Kompas.com*, tidak terlihat ada kumpulan masa yang melakukan aksi turun ke jalan. Situasi dan kondisi di sekitar kawasan tersebut tetap normal. "Di Jakarta *clear* tidak ada konsentrasi massa dari para buruh di bawah MPBI. MPBI hanya melakukan aksi demonstrasi dipusatkan di titik-titik kawasan industri," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang merupakan salah satu presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Andi Gani, saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Rabu (3/10/2012) pagi.

MPBI juga mengatakan, tidak akan bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. "Kalaupun ada demo di Jakarta baik itu di Istana ataupun DPR dari serikat pekerja lain, itu di luar dari MPBI. Kami persilakan tapi kami tidak bertanggung jawab," kata Andi.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Mudhofir, mengatakan, tuntutan yang disampaikan para buruh harus segera direalisasikan pemerintah, karena apabila tidak para buruh akan melakukan aksi yang sama dengan lebih banyak massa.

"Apabila pemerintah belum mengabulkan permohonan kami, akhir Oktober kami akan gelar aksi kembali dengan melibatkan hingga sepuluh juta orang," ujar Mudhofir.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, mogok nasional di bawah MPBI dilakukan di 80 kawasan industri dengan jumlah 4 juta buruh seluruh Indonesia. "Bentuk mogok nasional kami adalah mogok kerja. Di luar 80 kawasan industri itu adalah aksi unjuk rasa," ujar Said.

Mogok nasional ini dilakukan karena tiga tuntutan utama para buruh tersebut belum juga dikabulkan oleh pemerintah. Tiga tuntutan tersebut antara lain, tuntutan para buruh masih sama seperti sebelumnya yaitu penolakan upah murah, penghapusan *outsourcing*, dan realisasi BPJS tahun 2014.

Mereka menilai jika pemerintah sudah ada niat baik untuk mendengar tuntutan mereka akan tetapi realisasinya hingga saat ini belum juga dilakukan. Apabila masih belum ada tanggapan dari pemerintah, rencananya, aksi mogok nasional di bawah MPBI akan berlangsung hingga besok, Kamis (4/10/2012).

Kawasan Industri Pulogadung Lumpuh

Penulis : Fabian Januarius Kuwado | Rabu, 3 Oktober 2012 | 11:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ribuan buruh yang mengatasnamakan diri Majelis Pekerja dan Buruh Indonesia (MPBI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur. Akibat pengerahan massa buruh secara besar-besaran, kawasan industri tersebut lumpuh.

Sekjen Percetakan Penerbit Media Informasi (PP PMI) Fredy Sembiring mengatakan, jumlah buruh yang melakukan aksi sebanyak 500.000 yang bekerja di 300 pabrik di dalam kawasan. Ia pun mengklaim kawasan industri tersebut dipastikan lumpuh total.

"Saat ini, kami aksi dan orasi di sini. Kawan-kawan yang lain dari serikat dan federasi lain akan bergabung juga di sini," kata Fredy kepada wartawan di lokasi aksi, Rabu (3/10/2012).

Fredy mengatakan, para buruh yang melakukan aksi mogok nasional kali ini terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Berdasarkan pantauan *Kompas.com* di lokasi, ratusan buruh memulai aksi dengan berkonsolidasi di pabrik-pabrik di kawasan industri Pulogadung sekitar pukul 07.00 WIB. Setelah itu, massa buruh pun memecah kelompok menjadi lima bagian. Empat titik berkumpul di akses masuk kawasan, satu kelompok melakukan *sweeping* di pabrik-pabrik.

Para buruh menutup empat akses masuk ke kawasan industri, yaitu dari Jalan Kawasan Industri Pulogadung, Cakung; Jalan Buaran, Pulogadung; Pulogadung Trade Center, dan Jalan Bekasi Raya. Pengendara kendaraan bermotor yang hendak melintas pun diinstruksikan memutar balik dan mencari jalur alternatif.

Massa buruh yang melakukan *sweeping* datang ke pabrik menggunakan kendaraan roda dua. Beberapa perwakilan memasuki pabrik dan mengajak para buruh lainnya untuk ikut aksi dengan menggunakan pengeras suara. Beberapa buruh pun turut mengikuti aksi dan melakukan konvoi ke pabrik-pabrik selanjutnya.

Pabrik yang berada di kawasan industri tersebut memproduksi berbagai barang, mulai dari garmen, farmasi, elektronik, kertas dan sebagainya. Akibat unjuk rasa para buruh, aktivitas di pabrik-pabrik tersebut pun lumpuh. Hanya terdapat petugas keamanan yang berada di depan pabrik.

Mogok nasional yang dilakukan buruh kali ini merupakan puncak konsolidasi para buruh sejak berbulan-bulan lalu. Para buruh menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk menetapkan upah layak dan menghapuskan sistem kerja *outsourcing*.

Buruh Semarang Tuntut Kesejahteraan

Penulis : P. Raditya Mahendra Yasa | Rabu, 3 Oktober 2012 | 11:26 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com — Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar unjuk rasa di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (3/10/2012) ini.

Mereka menggelar aksi berkaitan dengan kurangnya kesejahteraan buruh selama ini. Dengan membawa bendera dan poster, mereka menggelar orasi mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak memerhatikan nasib buruh.

Poster yang mereka bawa berisi tuntutan kenaikan upah buruh, hapus sistem kerja kontrak, dan jaminan sosial.

Koordinator lapangan, Kurniawan Dwi Prasetyo, mengatakan, unjuk rasa ini sebagai bentuk solidaritas terhadap nasib ribuan buruh di Jawa Tengah yang masih berupah rendah.

"Upah buruh di Jateng yang paling rendah dibandingkan dengan daerah lain, seperti Jatim, Jabar, dan Jakarta," kata Kurniawan.

Upah buruh di Indonesia saat ini paling rendah dibandingkan dengan China Rp 2,1 juta, Thailand Rp 2,7 juta, dan Malaysia Rp 4,5 juta per bulan.

Editor :
Agus Mulyadi

Kawasan Industri Dilumpuhkan

Penulis : Ambrosius Harto Manumoyoso | Rabu, 3 Oktober 2012 | 11:22 WIB

BEKASI, KOMPAS.com — Mogok massal buruh berdampak kegiatan produksi berhenti dan melumpuhkan kegiatan di seluruh kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Rabu (3/10/2012).

Pantauan *Kompas*, nyaris tidak ada pabrik yang beroperasi pada hari pertama mogok massal atas imbauan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Pabrik-pabrik yang beroperasi, misalnya di sepanjang Kalimalang, Kabupaten Bekasi, diminta berhenti berproduksi dan mengeluarkan buruh untuk mengikuti mogok.

Kondisi serupa juga terjadi di kawasan industri MM2100, EJIP, Delta Silicone, Hyundai, Lippo Cikarang, dan Jababeka. Kawasan industri disesaki buruh yang berputar-putar dengan sepeda motor. Kegiatan produksi terhenti sama sekali.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam MPBI memperkirakan, massa buruh yang ikut mogok massal di Kabupaten Bekasi sekitar 500.000 orang.

Adapun aksi serupa di Kota Bekasi dipusatkan di Kantor Wali Kota Bekasi. Aksi diperkirakan diikuti lebih dari 10.000 buruh.

Aksi memang tidak dikonsentrasikan di satu lokasi, tetapi di beberapa titik. Dengan demikian, kegiatan mogok belum memengaruhi secara signifikan terhadap kemacetan atau keruwetan lalu lintas.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Apindo terkait mogok massal, terutama yang menimbulkan kerugian materi.

Kawasan industri di Kabupaten Bekasi menopang setidaknya 70 persen produksi ekspor nonmigas nasional.

Editor :
Agus Mulyadi

Unjuk Rasa

Buruh sudah Berada di Titik Kumpul

Penulis : Agnes Swetta Br. Pandia | Rabu, 3 Oktober 2012 | 11:20 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Buruh mulai berkumpul di beberapa titik di kawasan industri, seperti Sier Surabaya, Margomulyo, dan Tanjungsari Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/10/2012) ini.

Di kawasan Sier, sekitar 2.000 buruh siap menuju Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan dan Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura.

Polda Jawa Timur akan menyiagakan aparat kepolisian di lokasi yang dianggap rawan karena mogok nasional hari ini akan diikuti sekitar 20.000 buruh dari sejumlah kota yang bergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).

Kabid Humas Polda Jatim Komisaris Besar Hilman Thayib mengatakan, polisi diterjunkan di lokasi titik kumpul, terutama di daerah industri.

Saat ini arus lalu lintas tersendat, terutama di kawasan industri, termasuk di Sidoarjo, karena sudah banyak buruh yang berkumpul.

Menurut Jamaludin dari MPBI, yang sedang berada di Jalan A Yani Surabaya, sebanyak 5.000 buruh sudah berkumpul di Gedangan dan sekitar 2.000 buruh di Sepanjang, Sidoarjo.

"Buruh belum ada rencana tujuan ke mana, yang penting bagaimana buruh yang sedang bekerja ikut mogok kerja untuk menuntut penghapusan sistem kerja alih daya dan hapus upah murah," katanya.

Semakin banyak buruh yang berkumpul di Brebek, Gedangan, dan Sepanjang mengakibatkan arus lalu lintas dari Surabaya-Sidoarjo dua arah mulai macet.

Editor :
Agus Mulyadi

Buruh Datangi Kantor Wali Kota

Penulis : Kris R Mada | Rabu, 3 Oktober 2012 | 11:17 WIB

BATAM, KOMPAS.com - Barisan buruh mulai berdatangan ke Kantor Wali Kota Batam, Rabu (3/10/2012). Mereka bagian dari pengunjuk rasa yang berasal dari berbagai sudut Batam, Kepulauan Riau.

Buruh datang ke kawasan kantor dengan aneka kendaraan bermotor. Namun, seluruh kendaraan diparkir 500 meter dari kantor. Sebab, polisi menutup akses ke kantor sejak pagi.

Namun, hal itu tidak mencegah buruh mendekati kantor wali kota. Buruh berjalan kaki lalu berkumpul di luar pagar kantor. Di depan pagar sudah dibentangkan kawat berduri sejak pagi.

Massa buruh akan semakin bertambah hingga sore nanti. Saat ini, baru. Buruh dari kawasan Batam Center dan Batu Ampar tiba di kantor wali kota. Sementara buruh dari kawasan Muka Kuning, Tanjung Uncang, dan Kabil belum tiba.

Editor :
Agus Mulyadi

LBH Jakarta: Mogok Buruh Dibenarkan

Penulis : Ambrosius Harto Manumoyoso | Rabu, 3 Oktober 2012 | 11:15 WIB

BEKASI, KOMPAS.com — Mogok nasional oleh para buruh di Indonesia, Senin (3/10/2012), dibenarkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Mogok nasional menuntut penghapusan sistem kerja *outsourcing* (alih daya) dan kontrak, penghapusan politik upah murah, serta jaminan kebebasan berserikat.

Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta mengatakan, kasus perburuhan adalah permasalahan yang paling banyak diadukan di LBH Jakarta. Jumlah pencari keadilan berlipat karena satu kasus bisa melibatkan ratusan bahkan ribuan pekerja.

"Lima tahun ini, kami menilai pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan semakin buruk dan meningkat. Hal ini diperparah dengan sangat lemah dan tidak berfungsinya pengawasan oleh Pengawas Ketenagakerjaan," kata Febi dalam siaran persnya.

LBH Jakarta juga mencatat bahwa hampir tidak ada penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap aturan ketenagakerjaan. Pemberian upah di bawah ketentuan upah minimum regional dan pelarangan berserikat adalah tindak pidana.

Namun, hingga hari ini, hampir tidak ada pengusaha yang terkena proses hukum. Padahal, pengaduan sudah sangat sering dilakukan oleh buruh kepada Polri dan Pengawas Ketenagakerjaan.

LBH juga menilai hampir tidak ada tindakan dari pemerintah terhadap pelanggaran sistem kontrak dan *outsourcing*. Pemerintah semakin melegalkan dan mempermudah pelaksanaan *outsourcing*.

Buruh diarahkan untuk berhadapan dengan perusahaan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Muhamad Isnur, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan LBH Jakarta, menyebutkan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa mogok kerja adalah sebagai hak dasar pekerja/buruh.

Dalam Pasal 143 ditegaskan, siapa pun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.

Pemerintah dan perusahaan tidak boleh melarang, apalagi melakukan penangkapan, kekerasan, dan mengurangi hak pekerja/buruh yang mogok kerja. LBH Jakarta siap membantu dan mendampingi buruh/pekerja yang mendapatkan permasalahan dalam melaksanakan haknya untuk melakukan mogok kerja.

Editor :

Agus Mulyadi

Buruh PT Mega Multi Komasindo Dikeluarkan dari Pabrik

Penulis : Ambrosius Harto Manumoyoso | Rabu, 3 Oktober 2012 | 11:12 WIB

BEKASI, KOMPAS.com - Sekitar 100 buruh perusahaan percetakan PT Mega Multi Komasindo, akhirnya mengikuti mogok nasional dengan keluar dari pabrik di Kompleks Industri Kimu, Gerbang Tol Cibitung 1, Kabupaten Bekasi, Senin (3/10/2012).

Sebelumnya, 100 buruh itu tidak bisa keluar untuk mengikuti aksi bersama ribuan buruh lainnya. Hal itu membuat massa buruh mendatangi MMK, dan meminta buruh di dalam pabrik untuk berhenti beroperasi.

Di lokasi, ratusan petugas polisi bersiaga untuk mencegah massa buruh masuk Jalan Tol Jakarta Cikampek melalui Gerbang Tol Cibitung 1. Di antara petugas ada personel Brimob dari Detasemen D, dengan tameng dan senjata.

Editor :
Agus Mulyadi

Buruh "Kepung" Gedung Sate

Penulis : Reporter RakaFM Bandung, Indra | Rabu, 3 Oktober 2012 | 10:57 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Buruh dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung mulai "mengepung" Gedung Sate di depan Lapangan Gasibu, Bandung, Rabu (3/10/2012). Para buruh yang berasal dari Leuwigajah, Cimahi, Padalarang, Majalaya, dan Rancaekek ini tergabung dalam aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah dan penghapusan sistem kerja *outsourcing*.

Rombongan buruh yang mulai datang sejak pukul 08.00 ini meminta Gubernur Jawa Barat membuat surat rekomendasi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencabut Permenakertrans Nomor 13/MEN/2012 dan surat kepada Menteri Kesehatan agar upah tidak dipotong iuran BPJS Kesehatan.

Polisi saat ini menutup jalan di depan Gedung Sate. Arus dari Jalan Supratman dibelokkan ke Jalan Cisangkuy lalu ke Jalan Cimanuk dan Jalan Cimandiri menuju Jalan Sulanjana. Dari Jalan Sulanjana dibelokkan ke Jalan Cimandiri. Sementara dari Jalan Layang Pasupati belok ke Jalan Sentot Alibasya masuk Jalan Diponegoro terus ke Jalan Supratman.

Saat aksi buruh berlangsung, di Lapangan Gasibu diadakan gladiresik TNI untuk persiapan upacara HUT TNI pada 5 Oktober mendatang.

Editor :
A. Wisnubrata

Buruh Kawasan Industri Pulogadung Lakukan "Sweeping"

Penulis : Fabian Januarius Kuwado | Rabu, 3 Oktober 2012 | 10:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mogok nasional yang dilakukan buruh, Rabu (3/10/2012), di kawasan industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, semakin ramai. Para buruh melakukan aksi *sweeping* untuk mengajak buruh lainnya yang masih berada di pabrik-pabrik kawasan itu.

Berdasarkan pantauan *Kompas.com* di lokasi, ratusan buruh datang ke pabrik menggunakan kendaraan roda dua. Beberapa perwakilan pun memasuki pabrik dan mengajak para buruh lainnya untuk ikut aksi dengan menggunakan pengeras suara.

"Ayo kawan-kawan, bergabung dengan kami untuk menuntut upah layak dan hapus *outsourcing*," ujar salah seorang buruh.

Meski tak semua buruh di pabrik-pabrik mengikuti kemauan buruh yang melakukan *sweeping*, tak ada perlawanan sedikit pun dari para buruh yang berada di pabrik. Beberapa buruh malah akhirnya turut mengikuti aksi dan melakukan konvoi ke pabrik-pabrik selanjutnya. Aksi tersebut dilakukan oleh ribuan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).

Ribuan buruh terbagi menjadi lima bagian. Empat kelompok berada di akses masuk kawasan industri, sedangkan sekelompok buruh lagi melakukan *sweeping*. Para buruh menutup empat akses masuk ke kawasan industri, yaitu dari Jalan Kawasan Industri Pulogadung, Cakung; Jalan Buaran, Pulogadung; Pulogadung Trade Center; dan Jalan Bekasi Raya.

Pengendara kendaraan bermotor yang hendak melintas pun diinstruksikan untuk memutar balik dan mencari jalur alternatif. Perlu diketahui, di dalam kawasan industri Pulogadung tersebut, terdapat 300 pabrik yang memproduksi berbagai kebutuhan, seperti garmen, farmasi, elektronik, dan kertas. Akibat unjuk rasa para buruh, aktivitas di pabrik-pabrik tersebut pun lumpuh.

Mogok nasional yang dilakukan buruh kali ini merupakan puncak konsolidasi para buruh sejak berbulan-bulan lalu. Para buruh menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk menetapkan upah layak dan menghapuskan sistem kerja *outsourcing*.

Kadin: Dibanding China, Upah Buruh Kita Lebih Bersaing

Penulis : Didik Purwanto | Rabu, 3 Oktober 2012 | 10:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto menganggap bahwa upah buruh di Indonesia justru lebih bersaing dengan China. Sehingga banyak para investor menanamkan usahanya di Indonesia.

"Itu menjadi daya tarik Indonesia di mata investor. Upah buruh di sini lebih bersaing dengan China. Sekarang sudah kompetitif," kata Suryo di Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Kendati lebih bersaing, Suryo menganggap, upah buruh di Indonesia bukan harus selamanya rendah. Masing-masing perusahaan masih bisa menaikkan upah sesuai dengan kemampuan perusahaannya. Apalagi jika kondisi perekonomian akan terus membaik, maka investor pun bisa mendapat untung.

Imbasnya, perusahaan tentu akan menambah upah para karyawannya. "Jadi demo ini saya kira wajar-wajar saja. Kalau masih wajar ya tidak apa-apa. Soal permintaan kenaikan upah, itu memang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau sekarang, sudah cukup kompetitif," katanya.

Sekadar catatan, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyampaikan, sekitar 3 juta buruh di seluruh Indonesia siap melakukan aksi mogok massal di beberapa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (3/10/2012) ini. Massa akan berunjuk rasa untuk menuntut upah yang layak berkeadilan sesuai dengan upah minimum provinsi dan penghapusan sistem *outsourcing*.

Hatta: Masih Ada yang Beda Persepsi soal "Outsourcing"

Penulis : Didik Purwanto | Rabu, 3 Oktober 2012 | 10:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, masih ada masyarakat yang belum mengerti tentang konsep kerja *outsourcing* sehingga para buruh berdemo ingin menghapus sistem *outsourcing* tersebut.

"Yang di-*outsourcing* itu bukan tenaga kerjanya, tapi pekerjaannya," kata Hatta di Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Menurut Hatta, sistem kerja *outsourcing* dan kontrak itu sudah sesuai berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga pemerintah juga cukup tegas dengan kedua sistem kerja tersebut.

Kendati demikian, pihaknya akan terus mengawasi berdasarkan kementerian terkait untuk melihat apakah sistem kerja tersebut benar-benar sesuai atau tidak di lapangan. Menurut Hatta, soal karyawan *outsourcing* itu memang tidak boleh kecuali hanya kepada lima usaha tertentu, misalnya perminyakan.

Selain itu, penerapan karyawan *outsourcing* ini harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan. "Soal mempekerjakan orang secara *seasonal* itu bukan *outsourcing,* tapi kontrak. Undang-undang kita sudah secara jelas mengatur itu," katanya.

Dengan demikian, pemerintah mengajak kepada para pengusaha dan buruh agar bisa menahan diri dan bisa mencari solusi terkait isu *outsourcing* dan karyawan kontrak tersebut. "Masih ada jalan bagi kita untuk menjaga agar usaha yang kita bangun dengan baik ini jangan sampai rusak dan terganggu," jelasnya.

Sekadar catatan, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyampaikan, sekitar 3 juta buruh di seluruh Indonesia siap melakukan aksi mogok massal di beberapa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (3/10/2012) ini. Massa akan berunjuk rasa untuk menuntut upah yang layak berkeadilan sesuai dengan upah minimum provinsi dan penghapusan sistem *outsourcing*.

Buruh di Batam Mulai Parade

Penulis : Kris R Mada | Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:49 WIB

BATAM, KOMPAS.com - Parade buruh mulai bergerak dari kawasan Muka Kuning dan Tanjung Uncang, Batam, Rabu (3/10/2012). Mereka akan menuju kantor Wali Kota Batam di kawasan Batam Center.

Parade itu bagian dari unjuk rasa serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Unjuk rasa itu untuk menuntut penghapusan sistem alih daya, perbaikan upah, dan penyelenggaraan sistem jaminan sosial.

Buruh memenuhi persimpangan Muka Kuning. Mereka berbaris memenuhi salah satu sisi jalan. Sementara kendaraan-kendaraan mereka diparkir sisi jalan lain.

Barisan buruh mengakibatkan akses ke dua kawasan industri di Muka Kuning tertutup. Sebagian buruh ikut barisan, sebagian lagi memilih pulang.

Pengawalan barisan buruh dilakukan oleh polisi dan tentara. Kepala Polres Barelang Komisaris Besar Karyoto, Komandan Kodim Batam Letnan Kolonel Rizal Ramadhan, dan Komandan Batalyon 134 Letnan Kolonel Hendra H terlihat di sekitar barisan buruh.

Bahkan, Karyoto dan Rizal sempat bersitegang dengan sebagian pengunjuk rasa. Insiden itu terjadi saat barisan buruh baru akan terbentuk.

Sementara di kawasan Tanjung Uncang, buruh masih berkumpul di sekitar kawasan. Mereka belum bergerak ke luar kawasan.

Editor :
Rusdi Amral

Buruh Bekasi Pusatkan Aksi di Kawasan Industri

Penulis : Ambrosius Harto Manumoyoso | Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:40 WIB

BEKASI, KOMPAS.com — Mogok nasional akan diikuti oleh 2,8 juta orang dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia sejak Rabu (3/10/2012). Aksi terbesar dilaksanakan di tujuh kawasan industri di Kabupaten Bekasi yang akan diikuti oleh 500.000 orang.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, salah satu bagian MPBI, memusatkan demonstrasi di empat lokasi. "Mohon maaf jika menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan, tetapi kami akan aksi di dalam kawasan, tidak mengganggu lalu lintas di jalan raya," kata Wakil Presiden FSPMI Obon Tabroni.

Untuk kawasan industri MM2100, aksi dipusatkan di depan PT AHM. Untuk wilayah EJIP, Hyundai, dan Delta Silicone, aksi dikonsentrasikan di simpang empat EJIP-Delta Silicone.

Untuk kawasan Jababeka, aksi dipusatkan di depan PT Samsung. Untuk kawasan Gobel CBT, aksi dikonsentrasikan di depan PT Gobel.

Mogok nasional dikabarkan dimulai pukul 09.00 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tidak ada jaminan kondisi lalu lintas di jalan akan tetap lancar.

Warga yang akan bepergian dan beraktivitas diminta memperhatikan kondisi lalu lintas. Diharapkan, warga tidak melintas di titik-titik konsentrasi massa buruh.

Editor :
Rusdi Amral

Ribuan Buruh Blokade Kawasan Industri Pulogadung

Penulis : Fabian Januarius Kuwado | Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ribuan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja dan Buruh Indonesia (MPBI) turut meramaikan aksi mogok nasional, Rabu (3/10/2012). Sekitar pukul 07.00 WIB, ribuan buruh ini memblokade akses masuk ke Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur.

Semula, para buruh berkumpul di area dalam kawasan industri untuk berkonsolidasi. Aksi para buruh ini tak lepas dari pantauan aparat kepolisian, baik dari Polres Jakarta Timur maupun Polsek Cakung. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di akses masuk kawasan industri.

Para buruh menutup empat akses masuk ke kawasan industri, yaitu dari Jalan Kawasan Industri Pulogadung, Cakung; Jalan Buaran, Pulogadung; Pulogadung Trade Center; dan Jalan Bekasi Raya. Pengguna kendaraan bermotor yang hendak melintas diinstruksikan para buruh untuk memutar balik dan mencari jalur alternatif. Insiden perlawanan sempat dilakukan seorang pengendara motor. Namun, situasi tersebut berhasil diredam.

Hingga pukul 09.00 WIB, aksi para buruh masih berlangsung. Beberapa kelompok buruh yang semuanya menggunakan kendaraan roda dua tampak mulai berdatangan. Namun, mereka masih menanti kelompok buruh lainnya yang rencananya turut menjalankan aksi

di kawasan tersebut.

Mogok nasional yang dilakukan buruh kali ini merupakan puncak konsolidasi para buruh sejak berbulan-bulan lalu. Mereka menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk menetapkan upah layak dan menghapuskan sistem kerja *outsourcing*.

Sambut Demo Buruh, Aparat Gabungan Disiagakan

Penulis : Kris R Mada | Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:37 WIB

BATAM, KOMPAS.com - Aparat gabungan disiagakan di berbagai titik di Batam, Rabu (3/10/2012) pagi. Persiapan itu untuk menyambut unjuk rasa buruh pagi ini.

Rabu pagi, mereka mengikuti apel di lapangan Engku Putri, Batam. Apel diikuti polisi, TNI AD, TNI AL, petugas pemadam kebakaran dan Dinas Perhubungan.

Polisi anti huru hara memakai pelindung tubuh, perisai, dan pentungan. Sebagian menyandang tongkat dua meter, sebagian lagi membawa tongkat standar.

Sementara TNI hanya berpakain seragam. Tidak terlihat TNI membawa senjata. Demikian pula dua peleton polwan yang ditempatkan di barisan paling depan.

Setelah apel, mereka disebar di beberapa titik. Tiga peleton polisi anti huru-hara disiagakan di depan Kantor Wali Kota Batam. Selain itu disiapkan pula dua peleton polwan.

Di sekitar kantor Wali Kota juga disebar sejumlah polisi. Mereka terutama ditugaskan mengatur lalu lintas di pusat Batam itu.

Aparat gabungan juga disiapkan di simpang Kabil. Titik itu akan menjadi tempat pertemuan barisan pengunjuk rasa dari berbagai wilayah di Batam. Dari Simpang Kabil, pengunjuk rasa bergerak bersama ke kantor Wali Kota Batam.

Editor :
Rusdi Amral

Menperin: Demo, Jangan Ganggu Produktivitas Pabrik

Penulis : Didik Purwanto | Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat berharap agar demo buruh yang dilakukan hari ini jangan sampai mengganggu produktivitas perusahaan masing-masing. Sebab hal tersebut akan mengganggu stabilitas ekonomi.

"Demo itu memang hak warga negara. Kita ini kan negara demokrasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana produktivitas pabrik tidak terganggu," kata Hidayat di Jakarta, Rabu (3/9/2012).

Menurut Hidayat, dengan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, para buruh tersebut juga bebas menyuarakan apa yang sepantasnya disuarakan. Namun meski demo tersebut dilakukan secara besar-besaran, Hidayat terus mengingatkan agar jangan sampai membuat produktivitas pabrik terganggu.

"Sebagai penganut demokrasi, kita berikan mereka hak untuk menyalurkan pendapatnya," jelasnya.

Terkait isu yang diusung para buruh untuk demo yaitu menaikkan upah minimum pegawai dan penghapusan outsorcing, menurut Hidayat, hal tersebut masih bisa diselesaikan di meja perundingan dengan masing-masing pabrik.

"Intinya kalau mau demo ya silahkan, jangan paksa yang tidak mau demo. Soal UMP dan *outsourcing,* itu memang hal yang serius, tapi masih bisa diselesaikan di meja perundingan tanpa demo," katanya.

Sekadar catatan, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyampaikan, sekitar 3 juta buruh di seluruh Indonesia siap melakukan aksi mogok massal di beberapa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (3/10/2012) ini. Massa akan berunjuk rasa untuk menuntut upah yang layak berkeadilan sesuai dengan upah minimum provinsi dan penghapusan sistem *outsourcing*.

Demo Buruh Diprediksi Tidak Pengaruhi Sentimen
Penulis : Robertus Benny Dwi Koestanto | Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencananya sekitar tiga juta dari seluruh Indonesia akan mogok kerja menolak kebijakan *outsourcing* dan upah murah pada Rabu (3/10/2012). Aksi ini diperkirakan tidak mempengaruhi sentimen pasar domestik. Aksi ini tidak hanya dipusatkan di Jakarta tetapi juga dilakukan di 80 kawasan industri seluruh Indonesia.

Mogok kerja buruh ini terutama terjadi pada pabrik-pabrik padat modal seperti otomotif, elektronika, logam dan perusahaan multinasional. Diperkirakan produsen akan mengakibatkan kerugian produksi senilai total Rp 10 triliun.

Menurut ekonom Samuel Sekuritas Indonesia, Lana Soelistianingsih, pengalaman demo yang pernah terjadi sebelumnya pada hari buruh 30 April 2012 lalu tidak mempengaruhi sentimen pasar. "Namun, aksi massal seperti ini menjadi faktor negatif dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia di tengah upaya pemerintah memompa investasi sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi yang tinggi bersama dengan konsumsi masyarakat," kata Lana.

Editor :
Rusdi Amral

Demo Buruh Diprediksi Tidak Pengaruhi Sentimen

Penulis : Robertus Benny Dwi Koestanto | Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencananya sekitar tiga juta dari seluruh Indonesia akan mogok kerja menolak kebijakan *outsourcing* dan upah murah pada Rabu (3/10/2012). Aksi ini diperkirakan tidak mempengaruhi sentimen pasar domestik. Aksi ini tidak hanya dipusatkan di Jakarta tetapi juga dilakukan di 80 kawasan industri seluruh Indonesia.

Mogok kerja buruh ini terutama terjadi pada pabrik-pabrik padat modal seperti otomotif, elektronika, logam dan perusahaan multinasional. Diperkirakan produsen akan mengakibatkan kerugian produksi senilai total Rp 10 triliun.

Menurut ekonom Samuel Sekuritas Indonesia, Lana Soelistianingsih, pengalaman demo yang pernah terjadi sebelumnya pada hari buruh 30 April 2012 lalu tidak mempengaruhi sentimen pasar. "Namun, aksi massal seperti ini menjadi faktor negatif dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia di tengah upaya pemerintah memompa investasi sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi yang tinggi bersama dengan konsumsi masyarakat," kata Lana.

Editor :
Rusdi Amral

Demo Buruh Diprediksi Tidak Pengaruhi Sentimen

Penulis : Robertus Benny Dwi Koestanto | Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencananya sekitar tiga juta dari seluruh Indonesia akan mogok kerja menolak kebijakan *outsourcing* dan upah murah pada Rabu (3/10/2012). Aksi ini diperkirakan tidak mempengaruhi sentimen pasar domestik. Aksi ini tidak hanya dipusatkan di Jakarta tetapi juga dilakukan di 80 kawasan industri seluruh Indonesia.

Mogok kerja buruh ini terutama terjadi pada pabrik-pabrik padat modal seperti otomotif, elektronika, logam dan perusahaan multinasional. Diperkirakan produsen akan mengakibatkan kerugian produksi senilai total Rp 10 triliun.

Menurut ekonom Samuel Sekuritas Indonesia, Lana Soelistianingsih, pengalaman demo yang pernah terjadi sebelumnya pada hari buruh 30 April 2012 lalu tidak mempengaruhi sentimen pasar. "Namun, aksi massal seperti ini menjadi faktor negatif dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia di tengah upaya pemerintah memompa investasi sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi yang tinggi bersama dengan konsumsi masyarakat," kata Lana.

Editor :
Rusdi Amral

Menperin: Demo, Jangan Ganggu Produktivitas Pabrik

Penulis : Didik Purwanto | Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat berharap agar demo buruh yang dilakukan hari ini jangan sampai mengganggu produktivitas perusahaan masing-masing. Sebab hal tersebut akan mengganggu stabilitas ekonomi.

"Demo itu memang hak warga negara. Kita ini kan negara demokrasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana produktivitas pabrik tidak terganggu," kata Hidayat di Jakarta, Rabu (3/9/2012).

Menurut Hidayat, dengan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, para buruh tersebut juga bebas menyuarakan apa yang sepantasnya disuarakan. Namun meski demo tersebut dilakukan secara besar-besaran, Hidayat terus mengingatkan agar jangan sampai membuat produktivitas pabrik terganggu.

"Sebagai penganut demokrasi, kita berikan mereka hak untuk menyalurkan pendapatnya," jelasnya.

Terkait isu yang diusung para buruh untuk demo yaitu menaikkan upah minimum pegawai dan penghapusan outsorcing, menurut Hidayat, hal tersebut masih bisa diselesaikan di meja perundingan dengan masing-masing pabrik.

"Intinya kalau mau demo ya silahkan, jangan paksa yang tidak mau demo. Soal UMP dan *outsourcing,* itu memang hal yang serius, tapi masih bisa diselesaikan di meja perundingan tanpa demo," katanya.

Sekadar catatan, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyampaikan, sekitar 3 juta buruh di seluruh Indonesia siap melakukan aksi mogok massal di beberapa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (3/10/2012) ini. Massa akan berunjuk rasa untuk menuntut upah yang layak berkeadilan sesuai dengan upah minimum provinsi dan penghapusan sistem *outsourcing*.

Sambut Demo Buruh, Aparat Gabungan Disiagakan

Penulis : Kris R Mada | Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:37 WIB

BATAM, KOMPAS.com - Aparat gabungan disiagakan di berbagai titik di Batam, Rabu (3/10/2012) pagi. Persiapan itu untuk menyambut unjuk rasa buruh pagi ini.

Rabu pagi, mereka mengikuti apel di lapangan Engku Putri, Batam. Apel diikuti polisi, TNI AD, TNI AL, petugas pemadam kebakaran dan Dinas Perhubungan.

Polisi anti huru hara memakai pelindung tubuh, perisai, dan pentungan. Sebagian menyandang tongkat dua meter, sebagian lagi membawa tongkat standar.

Sementara TNI hanya berpakain seragam. Tidak terlihat TNI membawa senjata. Demikian pula dua peleton polwan yang ditempatkan di barisan paling depan.

Setelah apel, mereka disebar di beberapa titik. Tiga peleton polisi anti huru-hara disiagakan di depan Kantor Wali Kota Batam. Selain itu disiapkan pula dua peleton polwan.

Di sekitar kantor Wali Kota juga disebar sejumlah polisi. Mereka terutama ditugaskan mengatur lalu lintas di pusat Batam itu.

Aparat gabungan juga disiapkan di simpang Kabil. Titik itu akan menjadi tempat pertemuan barisan pengunjuk rasa dari berbagai wilayah di Batam. Dari Simpang Kabil, pengunjuk rasa bergerak bersama ke kantor Wali Kota Batam.

Editor :
Rusdi Amral

Aksi Mogok Nasional

Ribuan Buruh Blokade Kawasan Industri Pulogadung

Penulis : Fabian Januarius Kuwado | Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ribuan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja dan Buruh Indonesia (MPBI) turut meramaikan aksi mogok nasional, Rabu (3/10/2012). Sekitar pukul 07.00 WIB, ribuan buruh ini memblokade akses masuk ke Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur.

Semula, para buruh berkumpul di area dalam kawasan industri untuk berkonsolidasi. Aksi para buruh ini tak lepas dari pantauan aparat kepolisian, baik dari Polres Jakarta Timur maupun Polsek Cakung. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di akses masuk kawasan industri.

Para buruh menutup empat akses masuk ke kawasan industri, yaitu dari Jalan Kawasan Industri Pulogadung, Cakung; Jalan Buaran, Pulogadung; Pulogadung Trade Center; dan Jalan Bekasi Raya. Pengguna kendaraan bermotor yang hendak melintas diinstruksikan para buruh untuk memutar balik dan mencari jalur alternatif. Insiden perlawanan sempat dilakukan seorang pengendara motor. Namun, situasi tersebut berhasil diredam.

Hingga pukul 09.00 WIB, aksi para buruh masih berlangsung. Beberapa kelompok buruh yang semuanya menggunakan kendaraan roda dua tampak mulai berdatangan. Namun, mereka masih menanti kelompok buruh lainnya yang rencananya turut menjalankan aksi di kawasan tersebut.

Mogok nasional yang dilakukan buruh kali ini merupakan puncak konsolidasi para buruh sejak berbulan-bulan lalu. Mereka menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk menetapkan upah layak dan menghapuskan sistem kerja *outsourcing*.

Ikuti perkembangan terkait demo buruh hari ini dalam topik "Demo 3 Juta Buruh"

Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary

Buruh Bekasi Pusatkan Aksi di Kawasan Industri

Penulis : Ambrosius Harto Manumoyoso | Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:40 WIB

BEKASI, KOMPAS.com — Mogok nasional akan diikuti oleh 2,8 juta orang dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia sejak Rabu (3/10/2012). Aksi terbesar dilaksanakan di tujuh kawasan industri di Kabupaten Bekasi yang akan diikuti oleh 500.000 orang.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, salah satu bagian MPBI, memusatkan demonstrasi di empat lokasi. "Mohon maaf jika menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan, tetapi kami akan aksi di dalam kawasan, tidak mengganggu lalu lintas di jalan raya," kata Wakil Presiden FSPMI Obon Tabroni.

Untuk kawasan industri MM2100, aksi dipusatkan di depan PT AHM. Untuk wilayah EJIP, Hyundai, dan Delta Silicone, aksi dikonsentrasikan di simpang empat EJIP-Delta Silicone.

Untuk kawasan Jababeka, aksi dipusatkan di depan PT Samsung. Untuk kawasan Gobel CBT, aksi dikonsentrasikan di depan PT Gobel.

Mogok nasional dikabarkan dimulai pukul 09.00 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tidak ada jaminan kondisi lalu lintas di jalan akan tetap lancar.

Warga yang akan bepergian dan beraktivitas diminta memperhatikan kondisi lalu lintas. Diharapkan, warga tidak melintas di titik-titik konsentrasi massa buruh.

Editor :
Rusdi Amral

Antisipasi Demo, Gerbang Tol Citeureup Dijaga

Penulis : Robertus Belarminus | Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:09 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Untuk mengantisipasi gelombang demo buruh yang rencananya akan melintas melalui pintu Tol Citeureup, gabungan aparat dari Brimob Polda Jabar dan dari beberapa Polsek di wilayah hukum Polres Bogor, berjaga di pintu Tol Citeureup. Antisipasi ini dimaksudkan untuk menjaga agar massa pendemo yang melintas tidak mengganggu ketertiban.

Selain itu, aparat kepolisian juga mengamankan jalur Tol Jagorawi untuk menghindari pemblokiran jalan tol oleh buruh pabrik yang berunjuk rasa. Ditemui di Tol Citeureup, Komandan Kompi 4 Detasemen A, Satuan Brimob Polda Jawa Barat, Iptu Yus Ali Yusuf mengatakan, pihaknya mengawal aksi agar berlangsung tertib.

"Untuk di Tol Citeureup ini disiapkan 110 anggota Brimob. Ditambah juga gabungan dari polsek-polsek di wilayah hukum Polres Bogor, anggota TNI, dan juga Dalmas," kata Yusuf, Rabu (3/10/2012).

"Antisipasi massa pengunjuk rasa ini dimaksudkan agar tidak menutup akses fasilitas umum. Jadi ketika mereka mau menyampaikan aspirasi silahkan, tetapi agar berlangsung tertib," tambahnya.

Pantauan *Kompas.com*, sejumlah aparat di lokasi sudah mempersiapkan diri dengan Peralatan Penanggulangan Huru-Hara (PPH). Sebuah mobil Water Canon juga sudah disiagakan di sekitar lokasi.

Tepat pukul 08.30 WIB, iring-iringan konvoi buruh dengan kendaraan bermotor mulai melintas sambil membawa bendera-bendera bertuliskan LEM-SPSI. Seperti diberitakan sebelumnya, elemen buruh akan melakukan aksi unjuk rasa besar, Rabu (3/10/2012) ini. Setidaknya akan ada 23.000 buruh yang melakukan aksinya dari pagi hingga siang hari nanti.

Editor :
A. Wisnubrata

KETENAGAKERJAAN

Pemerintah Ajak Berdialog, Buruh Tetap Mogok

Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mengajak buruh berdialog untuk mencari jalan keluar masalah ketenagakerjaan. Buruh pun tetap mogok kerja di sejumlah kawasan industri menuntut penghapusan pekerja alih daya (*outsourcing*), penetapan upah minimum sesuai angka kebutuhan hidup layak, dan iuran jaminan kesehatan pekerja ditanggung pemberi kerja.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, didampingi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, bertemu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (2/10/2012). Pertemuan di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian itu sempat tertunda karena Iqbal masih berkonsolidasi dengan elite serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia.

Hatta dan Muhaimin secara terpisah sudah berdialog empat mata dengan Iqbal. Namun, proses dialog belum mencapai titik temu.

”Intinya, mereka ingin bertemu. Saya coba carikan solusi. Kalau namanya mogok, tentu kita tidak menginginkan itu karena iklim investasi kita sudah baik. Situasi nasional sudah baik. Namun, tidak sekadar kita mengatakan jangan mogok, tetap harus dicarikan solusinya,” kata Hatta.

Buruh anggota KSPI, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia mogok di 80 kawasan industri di 21 kabupaten/kota pada Rabu ini. Buruh di luar Jakarta, seperti Surabaya, Sidoarjo, Batam, Cilacap, dan Sukabumi, juga akan berunjuk rasa ke gedung DPRD setempat.

Muhaimin mengatakan sudah menerbitkan Peraturan Menakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang 60 item komponen survei harga kebutuhan hidup layak (KHL) acuan penetapan upah minimum. Menakertrans bersama wakil pengusaha dan buruh dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional juga tengah menyusun peraturan yang mengatur tegas lima jenis pekerjaan alih daya yang diizinkan, yakni jasa kebersihan, jasa keamanan, katering, transportasi, dan jasa pertambangan migas.

"Peraturan ini menegaskan kembali, selain lima jenis pekerjaan itu, tidak boleh. Kita berharap semua bisa didialogkan karena mereka juga terlibat dalam LKS Tripartit Nasional," kata Muhaimin di sela-sela inspeksi mendadak survei harga komponen KHL oleh petugas Dewan Pengupahan Jakarta Timur di Pasar Jatinegara.

Perusahaan penyalur atau pemakai jasa pekerja alih daya diberi waktu enam bulan untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru ini. Pemerintah juga mewajibkan pengusaha penyalur atau pengguna jasa alih daya untuk lima jenis pekerjaan itu segera mengurus perizinan kepada gubernur dan bupati.

Secara terpisah, Iqbal mengapresiasi kesediaan Menko Perekonomian berdialog dengan buruh. Meski menolak menunda mogok, Iqbal berkomitmen tetap berdialog.

"Kami tak mau retorika. Kami ingin moratorium outsourcing seminggu setelah kesepakatan. Pemerintah harus membatalkan semua izin penyalur *outsourcing* yang ada sehingga hubungan kerja menjadi langsung dengan pemberi kerja," lanjutnya.

Iqbal menilai, draf peraturan Menakertrans soal alih daya memiliki tiga kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu adalah definisi "kegiatan pokok" belum diatur, ada pasal ambigu yang membuka peluang munculnya bisnis alih daya baru, dan tidak ada sanksi.

Ketua Umum KSPSI Sjukur Sarto mengatakan, anggota KSPSI, Yorrys Raweyai dan dirinya, tidak ikut mogok. "Kami sudah menyampaikan pernyataan sikap soal outsourcing dan upah layak kepada Menakertrans di depan 5.000 anggota pada 13 September 2012," ujar Sjukur.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton J Supit mengatakan, pengusaha setuju dengan penertiban pengusaha jasa alih daya yang nakal. Menurut Anton, tenaga alih daya menjadi pilihan selama porsi pekerja informal masih mencapai 70,7 juta orang dari 112,8 juta pekerja.

"Saat realisasi investasi baru meningkat dan lapangan kerja tercipta, outsourcing akan mati secara alamiah. Tugas pemerintah sekarang memperbaiki iklim investasi dengan tidak membuat aturan ketenagakerjaan populis yang menghambat investasi baru," ujar Anton.

Kemitraan

Dwi Idawati, pengajar Sekolah Tinggi Manajemen PPM, mengatakan bahwa lebih banyak perusahaan mengakali sistem alih daya untuk menekan biaya produksi. Menurut Dwi, alih daya bisa diganti dengan kemitraan sehingga perusahaan menyewa tenaga ahli dengan imbalan bagi hasil, bukan gaji.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto, di Jakarta, kemarin, mengimbau buruh yang berunjuk rasa agar menjaga ketertiban. Unjuk rasa buruh Rabu ini diperkirakan terjadi di 12 provinsi dan 37 kabupaten/kota serta melibatkan 745 perusahaan.

"Kita berharap para pengunjuk rasa mematuhi aturan dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum," katanya.

Aparat kepolisian, khususnya di tingkat wilayah, lanjut Agus, siap memfasilitasi komunikasi antara buruh dan pihak perusahaan. Dengan demikian, unjuk rasa sesuai keinginan bersama.

Ia menambahkan, Polda Metro Jaya menyiapkan 15.000 personel untuk melayani dan mengamankan unjuk rasa buruh pada Rabu ini. Di wilayah Polda Metro Jaya, ada 13 titik unjuk rasa. **(HAM/FER/ETA/RAZ/GRE/HEI/ARN)**

Demo Buruh, Indeks Saham Bakal Turun?

Penulis : Robertus Benny Dwi Koestanto | Rabu, 3 Oktober 2012 | 09:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini ditargetkan tiga juta buruh akan menggelar aksi unjuk rasa secara nasional. Apakah hal itu akan mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Rabu (3/10/2012) ini? Kemarin IHSG ditutup naik 20,55 poin (0,48 persen) ke level 4.256,84 dengan jumlah transaksi sebanyak 8,67 juta lot atau setara Rp 3,86 triliun. Sejumlah sektor naik, kecuali sektor pertanian dan perdagangan.

Kekhawatiran pelaku pasar bisa saja melatarbelakangi pilihan untuk kembali melakukan ambil untung pada perdagangan hari ini. Yang jelas semalam ada sentimen negatif dari pergerakan bursa global yang variatif melemah. Kekhawatiran atas kondisi perbankan dan perekonomian Spanyol menjadi penyebabnya. Indeks Dow Jones melemah 32,75 poin (0,24 persen) ke level 13.482,36. Indeks S&P 500 naik tipis 1,26 poin (0,09 persen) ke level 1.445,75 dan Indeks Komposit Nasdaq naik 6,51 poin (0,21 persen) ke level 3.120,04.

Di bursa domestik, kemarin investor asing tercatat melakukan pembelian bersih di pasar reguler sebesar Rp 54,21 miliar dengan saham yang paling banyak dibeli adalah ASII, GGRM, ICBP, INDF, dan BBRI. Mata uang rupiah terdepresiasi ke level Rp 9.591 per dollar AS.

Secara teknikal, menurut riset eTrading Securities, kenaikan IHSG kemarin masih menyisakan *downside* yang belum tuntas sehingga untuk perdagangan hari ini perlu

sedikit hati-hati, IHSG masih mendapatkan sentimen negatif dan kecenderungan turun. Resistance IHSG berada pada level 4.272 dan support berada pada level 4.210. Adapun saham-saham yang dapat diperhatikan adalah BISI, KLBF, dan PTBA.

Editor :
Rusdi Amral

Demo Buruh, Inilah Rute Alih Arus Hari Ini!

Penulis : Sabrina Asril | Rabu, 3 Oktober 2012 | 06:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Elemen buruh akan melakukan aksi unjuk rasa besar, Rabu (3/10/2012) ini. Setidaknya akan ada 23.000 buruh yang melakukan aksinya dari pagi hingga siang hari nanti.

Beberapa di antaranya akan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara, Bundaran Hotel Indonesia, Kemennakertrans, dan Kemenkes. Arus lalu lintas diperkirakan akan macet.

"Hindari ruas jalan menuju Istana Negara (Jalan Medan Merdeka Utara), Bundaran HI (Jalan MH Thamrin), Jalan Medan Merdeka Selatan, DPR RI (Jalan Gatot Subroto arah barat), Kemenkes (Jalan HR Rasuna Said arah timur), Kemennakertrans (Jalan Gatot Subroto arah timur), FFI Susu Bendera (Pasar Rebo), Kawasan Industri Pulo Gadung Jaktim, KBN Cilincing, Pintu IX Jakarta Utara, M1 & P1 Bandara Cengkareng," ujar Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Wahyono, Selasa (2/10/2012) malam, dalam pesan singkat melalui telepon selulernya.

Terkait kondisi itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan pengalihan arus lalu lintas berikut ini:
1. **ISTANA NEGARA** :
a. Arah Harmoni (Jl Hayam Wuruk) menuju Istana akan dialihkan melalui: 1) Jl S Pranoto-Cideng-Tn Abang. 2) Jl Ir H Juanda-Jl Veteran/Jl Kathedral.
b. Arah Thamrin menuju Istana akan dialihkan melalui: 1) Jl KH W Hasyim/Jl Kbn Sirih-Jl Cideng Brt-Jl Suryo Pranoto. 2) Jl Kbn Sirih/MMS-Jl MR Rais-Jl MMT-Jl Perwira. 3) Jl B Kemuliaan-Jl Tnh Abang Tmr-Jl Abd Muis.

2. **DPR/MPR RI** :
a. Arah Semanggi : Semanggi-Jl. Gerbang Pemuda-Jl. Gelora-Jl. Gelora 1/Jl. Palmerah Utara.
b. Arah Jl. Sisingamangaraja/Jl. Sudirman : Jl. Asia Afrika/Jl. Pintu 1 Senayan-Jl. Asia Afrika-Jl. Gelora-Jl. Gelora 1/Jl. Palmerah Utara.
c. Arah Jl. S. Parman : Jl. Pejompongan-Jl. Penjernihan/Jl. Gelora 1.

3. **BUNDARAN HI**.
a. Arah Jl. Sudirman : Jl. Tlk Betung-Jl. Kbn Kacang atau Dukuh atas - Jl. Kendal
b. Arah Jl, Sudirman : Dukuh Atas-Tn. Abang Jl. Galunggung.

4. **KANTOR KEMENKES.**
a. Arah Selatan ke Utara (TL. Kuningan) :
1) Alternatif 1 : (a) Jalur lambat ke Jl. Gilimanuk - Mega Kuningan. (b) Lajur *busway* (BRT) arah utara dan *contra flow* lajur *busway* arah Utara - Selatan.
2) Alternatif 2 : Dari TL. Kuningan dialihkan ke Jl. Gatsu arah barat - Jl. Sudirman.
b. Arah utara ke selatan (TL. Jl. Cokro ke TL Kuningan) :
1) Pengaturan lalin seperti biasa (kecuali lajur *busway*).

5. **KEMENNAKERTRANS** :
a. Jl. Gatsu Arah barat ke timur (arah Pancoran) :
1) TL. Kuningan ke kanan -Jl. HR. R.Said - Jl. Kapt Tendean-FO Tgl Parang.
2) TL. Kuningan belok Kiri-Jl. Rasuna Said-Casablanca-Jl. Latu Harhari.
b. Arah selatan ke utara Jl. Rasuna Said (Kuningan) :
1) TL. Kuningan diluruskan -Jl. Rasuna Said-Jl.Kapt Tendean-FO Tgl Parang.
2) TL. Kuningan belok kanan seperti biasa.

6. **Kawasan Pulo Gadung** :
a. Arus lalin dari Jl. Pemuda ke Jl. Pulau Lio dialihkan ke kiri Jl.Bekasi Raya.
b. Arus lalin dari Jln Bekasi Raya ke Pulau Letut dialihkan/luruskan ke Jln Bekasi Raya (Jln Sultan HB IX), Jl. Perintis Kemerdekaan.
c. Arus lalin dari Bekasi Raya/Perintis Kemerdekaan yang ke kawasan Pulo Gadung diluruskan/dialihkan ke arah Penggilingan.
d. Arus lalin di Jln Bekasi Raya ke Swadaya 4 dialihkan diluruskan ke Penggilingan.

7. **Pintu IX** :
a. Dari arah dlm pelabuhan dialihkan melalui Pintu I dan III - Jl. RE.Martadinata - Gn. Sahari/lurus ke Kampung Bandan - Lodan - Gd Panjang. b. Dari arah pelabuhan lewat jalan baru depan RS Koja ke kiri Jl. Raya Cilincing - Jl. Raya Cakung/langsung masuk Tol Semper Timur.

Editor :
Glori K. Wadrianto

Hari Ini, 3 Juta Buruh Mogok!

Penulis : Aditya Revianur | Rabu, 3 Oktober 2012 | 06:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyampaikan, sekitar 3 juta buruh di seluruh Indonesia siap melakukan aksi mogok massal di beberapa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (3/10/2012) ini. Massa akan berunjuk rasa untuk menuntut upah yang layak berkeadilan sesuai dengan upah minimum provinsi dan penghapusan sistem *outsourcing*.

"Aksi mogok nasional akan dilaksanakan Rabu esok dari jam sembilan pagi sampai enam sore. Kami akan melakukan mogok kerja atau stop produksi di delapan puluh kawasan atau sentra industri di dua puluh satu kabupaten," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Iqbal merinci, di luar 80 kawasan industri, massa buruh akan melakukan aksi di kantor DPRD seluruh Indonesia yang antara lain mencakup DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan lainnya. Ia menjelaskan, aksi buruh yang terbesar dipusatkan di tujuh kawasan industri di Bekasi, khususnya Kawasan Ejip dengan massa 500.000 orang.

"Masyarakat diimbau untuk menghindari lokasi-lokasi tempat aksi mogok massal buruh tersebut. MPBI memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia bila terganggu kenyamanannya dan terjebak macet," terangnya.

Ia menyatakan, untuk wilayah Jabodetabek, buruh beraksi di sekitar Pulogadung, Sunter, KBN Cakung, Tanjung Priok, Tol Bekasi Barat, Bekasi Timur, Cibitung, Tambun, Bantar Gebang, Cikarang, Karawang Barat, Karawang Timur, Jatake, Cikupa, Balaraja, Serpong, Jalan Raya Bogor, Simpang Depok, Citereup, Gunung Putri, dan Wanaherang.

Para pengguna jalan diimbau menghindari area tersebut untuk menghindari kemacetan.

Editor :
Glori K. Wadrianto

Arus Lalu Lintas Dialihkan karena Unjuk Rasa

Penulis : Ratih Prahesti Sudarsono | Rabu, 3 Oktober 2012 | 00:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Wahyono menginformasikan rencana penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta dan di luar Jakarta.

"Pengalihan arus lalu lintas sehubungan dengan akan dilaksanakan penyampaian pendapat oleh mahasiswa dan elemen buruh pada Rabu (3/10/2012)," kata Wahyono, Selasa malam.

Terkait hal itu, pemakai jalan diimbau untuk menghindari ruas jalan menuju Istana Negara (Jalan Medan Merdeka Utara), Bundaran HI (Jalan Thamrin), Jalan Medan Merdeka Selatan, Gedung DPR (Jalan Gatot Subroto arah barat), Kemenkes (Jalan HR Rasuna Said arah timur), Kemenakertrans (Jalan Gatot Subroto arah timur), FFI Susu Bendera (Pasar Rebo), Kawasan Industri Pulo Gadung (Jakarta Timur), KBN Cilincing, Pintu IX Jakarta Utara, M1 & P1 Bandara Cengkareng.

Pemakain jalan disarankan menggunakan jalan alternatif menuju atau dari ruas jalan tersebut. Jika terjadi peningkatan konsentrasi massa dan peningkatan eskalasi, maka Ditlantas Polda akan mengalihkan arus lalu lintas.

Editor :
Nasru Alam Aziz

Buruh minta perusahaan agen outsourcing hentikan operasi

Terbaru 4 Oktober 2012 - 13:57 WIB

Perundingan antara pemerintah dengan kelompok buruh tentang penerapan aturan *outsourcing* akan dilanjutkan pekan ini.
Kelompok buruh mengatakan mereka berupaya menyamakan sejumlah tafsir atas beberapa aturan yang tengah disusun oleh pemerintah.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan mereka juga meminta pemerintah mengkaji keberadaan seluruh perusahaan penyalur tenaga kerja alih daya.

"Setelah tanggal 3 Oktober proses negosiasi akan berlangsung kembali hingga kurun dua pekan ke depan dan kami masih menunggu pemberitahuan kapan proses pembicaraan selanjutnya akan berjalan," kata Said Iqbal kepada BBC Indonesia.

"Dalam pertemuan nanti salah satu yang kami usulkan adalah soal moratorium terhadap keberadaan agen outsourcing yaitu mencabut izin semua agen dan kemudian mengubah aturan hubungan pekerja outsourcing dengan perusahaan pengguna."

Iqbal mengatakan usulan ini masih didiskusikan dengan pemerintah karena pemerintah memahami moratorium sebagai kebijakan untuk tidak memberi ijin perusahaan agen outsourcing baru selama satu tahun dan menindak perusahaan lama yang diketahui melanggar aturan.

Mogok lagi

Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Muhaimin Iskandar kemarin berjanji aturan yang mengatur hubungan pemberi kerja atau perusahaan dengan pekerja tanpa perusahaan penyalur tenaga kerja alih daya akan segera terbit minggu ini.

Buruh dalam negosiasi tahap kedua nanti juga akan meminta kepastian soal kategori pekerjaan yang bisa dilakukan dengan sistem kerja outsourcing.

"Pemerintah harus menjelaskan soal definisi proses produksi langsung, kalau kita memahami kegiatan pokok atau proses produksi langsung itu mulai bahan baku masuk sampai barang jadi."

Sebelumnya pemerintah, buruh dan pengusaha menyepakati ada lima jenis pekerjaan yang boleh dilakukan secara outsourcing. kelima jenis pekerjaan itu adalah *cleaning service*, keamanan, transportasi, catering, dan jasa migas pertambangan.

Sementara pekerjaan yang berkaitan dengan proses produksi langsung tidak boleh dikerjakan dengan sistem outsourcing.

Iqbal mengatakan pertemuan sejauh ini sudah menunjukkan titik terang namun jika tidak terdapat kesepakatan dalam waktu dua minggu ke depan soal aturan outsourcing maka buruh menurutnya akan melakukan aksi mogok.

"Kami akan mempertimbangkan melakukan mogok nasional lagi namun sejauh ini kami melihat ada jalan untuk melakukan negosiasi."

Represif Saat Demo Buruh, LBH Kecam Polisi

Penulis : Luthfie Febrianto | Kamis, 4 Oktober 2012 | 14:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam aksi represif kepolisian saat demo buruh 3 Oktober 2012 kemarin. Aksi represif kepolisian terjadi di kawasan industri Legok, Tangerang. Saat itu buruh yang hendak mengajak buruh PT LG Elektronik dihadang aparat polisi dengan tembakan gas air mata dan penyerangan buruh saat melakukan orasi. Sedikitnya tujuh buruh terluka dalam peristiwa tersebut.

Pengacara publik LBH Handika Febrian yang mendatangi langsung tempat kejadian mengatakan massa sempat ketakutan karena perlakuan represif kepolisian dan TNI. Menurutn dia, tindakan tersebut tidak mengikuti asas proporsionalitas dalam penanganan ancaman.

"Dalam aksi itu, satuan polri tidak mengikuti asas proporsionalitas dimana tindakan yang dilakukan seimbang dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum" katanya.

Wakil Direktur LBH Jakarta, Restaria Hutabarat menilai adanya anggapan bahwa aksi buruh merupakan ancaman keamanan dan tindakan provokasi.

"Ajakan mogok disikapi aparat dan pengusaha sebagai ancaman keamanan sebagaimana tercermin dari pengerahan Polri dan TNI didepan gerbang pabrik. Ajakan buruh juga dianggap sebagai tindakan yang mengancam keamanan" ujarnya saat konferensi pers di kantor LBH Jakarta Kamis (4/10/2012).

Restaria juga menganggap mogok merupakan hak konstitusional buruh untuk mendorong kebijakan demi kesejahteraannya. LBH Jakarta sendiri sudah melakukan pelaporan kepada pihak Polisi untuk menindaklanjuti serta menangkap aparat yang terbukti bersalah atas tindak kekerasan tersebut.

"Kami sudah membuat laporan ke pihak Polisi dan apabila dalam penyidikan pihak LG terbukti meminta Polisi untuk melakukan pengamanan kami harap Polisi juga melakukan tindakan" katanya.

Rieke-PDIP: Pemerintah Jangan Adu Domba Buruh dan Pengusaha

Ketidakharmonisan itulah yang memicu gejolak hubungan industrial.
Jum'at, 5 Oktober 2012, 06:58

VIVAnews - Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan buruh maupun pengusaha adalah bagian dari rakyat. Oleh karena itu pemerintah wajib melindungi keduanya.

"Sayangnya pemerintah seolah tidak hadir bahkan menjalankan politik adu domba yang mengakibatkan ketidakharmonisan antara pekerja dan pemberi kerja," kata Rieke kepada *VIVAnews*, Jumat 5 Oktober 2012. Ketidakharmonisan itulah yang memicu gejolak hubungan industrial.

Jika itu dibiarkan terus, ujar Rieke, maka pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan pemerintah adalah angka semu dan tidak berkorelasi langsung dengan kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi barang-barang luar.

"Indonesia juga sekedar menjadi tempat bagi negara asing untuk menanamkan modal-modalnya, dan tempat bagi negara asing untuk mengambil bahan baku industri mereka," kata Rieke. Semua itu akan menjadikan Indonesia sebagai pusat buruh upah murah.

"Maka politik upah murah dan tenaga kerja sistem outsourcing harus dihentikan. Pemerintah juga harus menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat," ujar politisi PDIP itu.

Rieke juga mendesak pemerintah menerapkan kebijakan politik yang propengusaha dan industri dalam negeri. Bentuk keberpihakan pada pengusaha domestik itu dapat dikejewantahkan melalui subsidi energi, keringanan pajak, bunga bank yang rendah, perbaikan infrastruktur, penghapusan pungutan liar, perizinan yang cepat dan efisien, bea masuk bagi barang dari luar negeri, serta mengembangkan industri bahan baku dan industri lanjutan.

Menteri Dituntut

Ketua Komisi IX DPR Rakyat Ribka Tjiptaning juga menuntut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, untuk melakukan langkah konkrit guna mengubah nasib buruh korban outsourcing dalam waktu kurang dari satu tahun. "Setiap rapat kerja masalah buruh selalu kita angkat, tapi tidak ada tindakan tegas dari pemerintah," kata Ribka, Kamis 4 Oktober 2012.

Ia mengingatkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan sistem outsourcing hanya boleh digunakan di lima bidang, yakni *cleaning service*, keamanan, transportasi, katering, dan pemborongan pertambangan.
"Jadi *outsourcing* yang tidak sesuai UU No 13 Tahun 2003 yang hanya di lima sektor harus dihapus. Sekarang BUMN juga mabuk outsourcing. Apa-apa outsourcing, yang inti juga outsourcing," ujar Ribka.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar telah

mengancam akan menutup perusahaan outsourcing yang nakal. Kementerian saat ini sedang mendata sejumlah perusahaan outsourcing nakal di daerah-daerah.

Muhaimin menjelaskan, kebanyakan perusahaan outsourcing nakal beroperasi di daerah. Perusahaan itu biasanya semena-mena dalam mengeksploitasi dan memotong upah tenaga kerja. "Perusahaan outsourcing yang seperti itu yang akan kami tutup, sedangkan yang menjalankan sesuai aturan akan kamiu jamin," kata Muhaimin. (ren)

Rabu, 03/10/2012 16:34 WIB

Buruh di EJIP Cikarang Membubarkan Diri, Lalu Lintas Berangsur Normal

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews

Jakarta Ribuan buruh yang melakukan aksi demonstrasi di kawasan industri East Jakarta Industrial Park (EJIP), Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, mulai membubarkan diri. Lalu lintas di sekitar lokasi yang sebelumnya terpantau padat mulai berangsur-angsur normal. Pihak kepolisian terlihat berjaga mengamankan arus lalu lintas.

Pantauan detikcom di lokasi pada Rabu (3/10/2012), pukul 15.30 WIB para buruh mulai membubarkan diri. Spanduk yang sebelumnya memenuhi perempatan EJIP mulai diturunkan oleh masing-masing federasi buruh. Ribuan buruh tersebut bubar dengan menggunakan sepeda motor maupun bus-bus pariwisata berukuran besar.

Menurut Presiden KSPSI, Said Iqbal saat ditemui di lokasi menyebut, mereka memang sengaja membubarkan aksi lebih awal untuk mencegah terjadinya aksi anarkis. Dia menilai pesan yang disampaikan dari aksi hari ini sudah cukup kuat, pihaknya tinggal menunggu itikad baik dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan para buruh.

"Kami dari Musywarah Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sudah memberikan pesan kuat, saya tadi ditelepon Hatta Rajasa, saya bilang dua juta buruh melakukan aksi mogok nasional tanpa anarkis," terangnya.

Para pendemo saat ini sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Di lokasi tempat mereka aksi siang tadi kini menyisakan berbagai jenis sampah yang berserakan maupun teronggok.

Rabu, 03/10/2012 13:41 WIB

Buruh Konvoi ke Kawasan EJIP Cikarang, Toko-toko Tutup

Jakarta Ribuan buruh mulai meninggalkan lokasi di pintu keluar Tol Cikarang Barat menuju kawasan East Jakarta Industrial Park (EJIP), Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sejumlah toko tutup.

Buruh langsung konvoi setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, yang telah ditunggu-tunggu tiba di lokasi.

Andi tiba sekitar pukul 12.45 WIB. Ia lalu naik ke mobil komando, dan diiringi konvoi buruh menuju kawasan EJIP, Cikarang Barat.

Pengamatan detikcom, para buruh sengaja membunyikan klakson selama melintas di Jalan Raya Cibarusah, Lippo Cikarang, Bekasi. Perang klakson bersahutan.

Gelombang buruh menguasai dua jalur di jalan itu. Akibatnya, sejumlah mobil terjebak dan pengendara sepeda motor terpaksa melawan arus. Toko-toko besar di sepanjang jalan itu tutup, seperti Alfamart, dan Indomaret. Namun toko kelontong kecil tetap buka.

Eskalasi buruh terus bertambah dan berdatangan di titik konsentrasi aksi mogok kerja nasional di Bekasi, Jawa Barat. Tidak terlihat aparat kepolisian yang berjaga-jaga. Aparat gabungan sebelumnya terpusat di depan pintu keluar Tol Cikarang Barat.

Gejolak Buruh

Kompas – Sabtu, 15 September 2012

Media massa akhir-akhir ini memberitakan fenomena aksi dan gejolak perburuhan di sejumlah daerah industri yang terus meningkat sejak Januari 2012.

Dinamika aksi dan gejolak perburuhan tersebut dianggap oleh asosiasi pengusaha sebagai sesuatu yang dapat memprovokasi investor untuk merelokasi investasi mereka ke luar negeri. Sementara bagi kalangan buruh, gejolak yang terjadi adalah puncak aspirasi mereka untuk memperjuangkan penghapusan pekerja alih daya (outsourcing) dan upah murah yang dianggap merugikan hak mereka akan kepastian kerja dan hidup layak.

Fenomena gejolak aksi-aksi perburuhan saat ini terjadi bersamaan dengan tren pertumbuhan ekonomi secara nasional, yang beberapa tahun terakhir cukup tinggi (sekitar 6 persen) di tengah situasi krisis ekonomi global. Gejolak perburuhan secara perlahan, tetapi pasti turut meletup pada era Orde Baru, khususnya 1990-an, dengan berbagai aksi pemogokan berskala kawasan hingga tingkat kota.

Pertumbuhan ekonomi kita tak disertai pemerataan kesejahteraan. Ketidaksetaraan antar-lapisan sosial cukup mencolok, seperti dikomentari peraih Nobel Ekonomi 2007, Erik Maskin. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Maskin menyoroti nasib buruh di kelas terbawah yang mengalami tekanan persaingan pasar tenaga kerja yang sangat kompetitif.

Sistem kerja kontrak alih daya dan politik upah murah adalah karakteristik umum yang dikesankan jadi prasyarat keunggulan dan pertumbuhan dalam relasi kita dengan globalisasi.

Padahal, bila kita kembali ke observasi Maskin—juga oleh Kaushik Basu, guru besar ekonomi asal Cornell—justru ditemukan, globalisasi adalah salah satu penyebab ketimpangan kesejahteraan. Terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, karena menaikkan pendapatan rata-rata, tetapi menimbulkan masalah distribusi pendapatan.

Solusi di tingkat lokal

Latar dari pertumbuhan yang menghasilkan kesenjangan dan juga fondasi dari gejolak perburuhan dewasa ini ada di tingkat lokal. Kompetisi di pasar tenaga kerja berlangsung dalam konteks desentralisasi sebagai model kekuasaan yang diterapkan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pada masa pasca-otoriterisme.

Akibatnya, keterlibatan negara didorong agar ”berkurang” dalam politik perburuhan, dengan melimpahkan tanggung jawab untuk membereskan konflik yang selalu terjadi dalam hubungan industrial kepada pemerintah lokal. Struktur kesempatan politik yang tersedia saat ini memberikan ruang bagi mobilisasi lebih leluasa buruh untuk berpolitik menggunakan metode bersifat direct action.

Aksi massa, gangguan terhadap proses produksi di kawasan industri dan sekitarnya cenderung memperkuat posisi politik mereka ketimbang harus bergantung pada partai dan politisi yang cenderung dikuasai oligarki di tingkat lokal. Karakter industri yang melayani mata rantai ekonomi global mengakibatkan ”rasa kepemilikan” para oligarki juga relatif terbatas.

Gejolak perburuhan semakin meluas juga akibat tidak lagi tersedia kesempatan legal menggunakan represi dan keterlibatan aparat militer dalam penyelesaian masalah industrial, seperti yang menjadi andalan rezim otoriter Orde Baru.

Kesenjangan kesejahteraan yang bertemu tekanan hidup yang sangat kompetitif menjadi faktor di tingkat tiap lokal daerah industri. Gerakan yang mengikuti alur desentralisasi ini menjadi terhubung dan relatif terkoordinasi antardaerah akibat tren upah yang relatif setara bila diperhitungkan dengan beban biaya hidup antarkota yang turut memengaruhi besar upah riil pekerja. Antardaerah dalam kerangka kompetisi telah bersaing untuk menekan upah buruhnya, tetapi hasilnya justru kondisi yang relatif setara karena biaya hidup juga tinggi di daerah-daerah yang lebih tinggi upah rata-ratanya. Biaya hidup yang lebih tinggi adalah buah pertumbuhan ekonomi yang cukup besar ditopang konsumsi domestik. Ekspektasi hidup layak mendorong motivasi lebih besar buruh menuntut perbaikan kesejahteraan.

Arena utama politik hubungan industrial secara faktual beralih ke tingkat lokal. Di sanalah terjadinya gejolak-gejolak perburuhan yang berakar dari tingkat perusahaan hingga terbangunnya berbagai jaringan dan aliansi serikat buruh yang selama ini menginisiasi aksi-aksi secara teritorial. Sementara di sisi pengusaha, kepentingan yang diutamakan adalah pencarian profit dari kompetisi yang mengandalkan keunggulan komparatif: buruh murah dan fleksibilitas tenaga kerja. Negara ”terpecah” posisinya akibat latar desentralisasi yang di satu sisi mengalihkan urusan kepada pemerintah daerah, tetapi

masih banyak regulasi dan mekanisme perburuhan yang bersifat nasional. Situasi unik terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang dapat diinterpretasikan sebagai penolakan kepada sistem kerja kontrak dan alih daya.

Minimnya ruang demokratis untuk penyelesaian perselisihan di tingkat lokal menjadi masalah, tetapi juga seharusnya menjadi titik tolak solusi yang efektif.

Perubahan latar politik perburuhan harusnya memberikan lebih besar lagi insentif bagi pemerintah daerah dan pelaku-pelaku politik lainnya untuk mendorong demokratisasi yang lebih lagi dalam menangani hubungan industrial. Tidak bisa lagi hanya bergantung pada mekanisme rutin tripartit, seperti penetapan upah tahunan saja.

Pemimpin asosiasi pengusaha di tingkat pusat juga harus mengubah strategi keterlibatan yang lebih proaktif dalam memajukan musyawarah, mulai tingkatan perusahaan paling bawah hingga secara teritorial.

Tidak bertemunya praktik deliberasi (musyawarah) yang komprehensif dari unsur-unsur dalam politik hubungan industrial di tingkat lokal mengakibatkan pilihan metode perjuangan tuntutan dalam bentuk aksi langsung: demo! **(Irwansyah – Pengajar Politik Perburuhan Departemen Ilmu Politik UI)**

Buruh dan Kesejahteraan

Kompas – Sabtu, 6 Oktober 2012

Oleh **SAID IQBAL** – Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

Aksi demo buruh yang digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia oleh lebih dari 2 juta pekerja, Rabu (3/10), merupakan bentuk ekspresi kekecewaan para pekerja terhadap pemerintah yang dianggap tidak peka merespons aspirasi mereka.

Tiga hal yang utama dari aspirasi itu adalah terkait penataan sistem kerja alih daya (outsourcing), penghapusan upah murah, dan penyegeraan jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan. Trilogi tuntutan itu bukanlah isu yang baru muncul kemarin, melainkan disuarakan bertahun-tahun oleh pekerja melalui berbagai cara elegan dan demokratis agar diperoleh penyelesaian bijak dari pemerintah.

Pasca-lahirnya UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), buruh merasa sedikit lega karena jaminan kesehatan yang nantinya dikelola BPJS Kesehatan akan mulai direalisasikan untuk seluruh rakyat Indonesia selambat-lambatnya 1 Januari 2014.

Sayangnya, pemerintah kemudian justru terkesan hendak memperlambat beroperasinya BPJS Kesehatan. Ada tiga indikator. Pertama, lambannya penuntasan pembentukan sejumlah regulasi untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan. Padahal, batas waktu yang dimiliki pemerintah hanya sampai 25 November 2012, kurang dari dua bulan lagi. Sementara proses penyusunan peraturan-peraturan itu belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Kedua, melalui pidato kenegaraan 16 Agustus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru menyatakan hal yang bertentangan dengan UU terkait implementasi jaminan kesehatan. Menurut Kepala Negara, jaminan kesehatan baru akan diberikan selambat- lambatnya tahun 2019, sementara perintah UU paling lambat 1 Januari 2014. Ketiga, dalam berbagai sosialisasi kepada pekerja, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Kesehatan juga kerap menyampaikan hal senada. Ini tentu menimbulkan keresahan di kalangan pekerja. Alih-alih mendorong percepatan jaminan kesehatan agar rakyat terlindungi, pemerintah justru membuat rakyat galau dan dihinggapi frustrasi.

Jika dicermati, sistem kerja alih daya dan kebijakan upah murah sesungguhnya buah dari kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak berkeadilan. Pemerintah seperti asyik mengejar target pertumbuhan ekonomi dengan cara menarik sebesar-besarnya investasi dari dalam dan luar negeri, tetapi mengabaikan pemerataan pendapatan bagi pekerja dan perlindungan bagi buruh dalam hubungan kerja.

Kebijakan dalam desain pasar bebas banyak dimanfaatkan investor untuk memperkuat kekuatan tawar dan daya tekan di hadapan pemerintah. Dengan demikian, ketika muncul sejumlah prasyarat investasi yang diajukan pemilik modal, pemerintah tak berkutik. Prasyarat yang sering kali diminta para pemilik modal di antaranya, fleksibilitas pasar kerja berupa outsourcing; fleksibilitas jam kerja (jam kerja panjang 12 jam per hari dengan 4 jam dihitung lembur), upah murah yang memunculkan kebijakan upah minimum yang sangat rendah, serta pekerja kontrak di mana pemberi kerja begitu dominan dalam menentukan syarat-syarat kerja dan masa kerja buruh.

Mestinya, dalam iklim seperti ini, negara hadir memberikan perlindungan kepada pekerja untuk dicapai suatu keseimbangan. Perlindungan dimaksud berupa tersedianya regulasi, berfungsinya pengawasan perburuhan, dan adanya penegakan aturan.

Problem alih daya

Terminologi outsourcing di Indonesia merujuk Pasal 64 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Intinya, penyerahan sebagian pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang kategorinya ada dua. Pertama,

pemborongan pekerjaan atau disebut outsourcing pekerjaan. Contoh, pabrik televisi menyerahkan pengerjaan remote control kepada perusahaan lain. Kedua, jasa penyedia tenaga kerja atau dikenal dengan outsourcing tenaga kerja. Kategori terakhir inilah yang menimbulkan persoalan.

Menurut Pasal 66 UU Ketenagakerjaan, outsourcing tenaga kerja tak boleh untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, yaitu kegiatan yang dimulai sejak masuknya bahan baku, proses material, hingga menjadi barang jadi. Pada industri jasa, dimulai sejak diterimanya permintaan, proses pengerjaan jasa, sampai keluar hasil dari jasa yang diminta. Toleransi outsourcing hanya diberikan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tak berhubungan langsung dengan proses produksi, seperti pada usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), penyediaan makanan (katering), tenaga pengaman (sekuriti), jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja.

Faktanya, berdasarkan hasil penelitian Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia bersama lembaga perburuhan Akatiga dan SPS, pada 2010 di tiga provinsi padat industri ditemukan lebih dari 47 persen pekerja outsourcing digunakan dalam proses produksi pada industri padat modal. Bahkan, pada industri padat karya, pekerja outsourcing yang digunakan mencapai 80 persen. Ini menunjukkan betapa masifnya pelanggaran.

Kondisi ini diperparah oleh masih rendahnya perlindungan yang diberikan kepada pekerja. Pertama, pekerja mudah menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Kedua, berapa pun masa kerja, buruh tetap diberikan upah minimum. Masih ditemukan buruh dengan masa kerja di atas 10 tahun tetap diberikan upah minimum. Ketiga, tak adanya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Keempat, upah pekerja dipotong oleh agen outsourcing dalam jumlah yang sangat menyakitkan, yaitu Rp 200.000-Rp 1,5 juta per bulan dari gaji yang diterima pekerja.

Atas hal itu, pemerintah hanya berdiam diri. Tak ada sanksi tegas kepada agen outsourcing yang melanggar UU. Para agen outsourcing seolah tak bisa disentuh. Kontrol pemerintah tak berfungsi. Tak sedikit agen outsourcing ternyata berasal dari lembaga karang taruna, ikatan remaja daerah, pengurus desa, ormas, bahkan melibatkan orang dalam dan petugas berwenang. Keterlibatan oknum dinas ketenagakerjaan sering dijumpai pada kasus outsourcing bermasalah. Terlalu mudahnya disnaker memberikan izin kepada agen outsourcing kian menyuburkan praktik ilegal ini.

Regulasi baru

Agar ada penyelesaian komprehensif terhadap permasalahan outsourcing, setidaknya ada dua solusi yang bisa ditempuh pemerintah. Pertama, melakukan moratorium outsourcing. Dalam proses itu, pemerintah dapat

meninjau kembali dan menata ulang persoalan alih daya agar sesuai ketentuan UU. Sanksi berupa pencabutan izin usaha harus diterapkan kepada agen dan perusahaan pengguna yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kedua, membentuk peraturan Menakertrans yang khusus mengatur larangan dan pemberian sanksi tegas terhadap praktik outsourcing ilegal. Peraturan Gubernur Bank Indonesia terkait pengaturan outsourcing bisa menjadi rujukan. Pergub BI ini dengan tegas melarang penggunaan tenaga kerja outsourcing untuk posisi teller bank karena BI memandang teller adalah kegiatan pokok dalam industri perbankan.

SIARAN PERS MPBI

Mogok Kerja Nasional 3 Oktober 2012

Hari ini 3 juta lebih buruh yang tergabung dalam MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia), Rabu 3 Oktober 2012, melakukan aksi Mogok Kerja Nasional pada pukul 08.00-18.00 di ***21 kabupaten/kota dan 80 kawasan padat industri serta kantor DPRD dan Gubernur di daerah non padat industri.*** *Adapun 21 Kabupaten/Kota dan 80 Kawasan adalah sebagai berikut :*

DKI Jakarta

a. Kawasan Industri Pulogadung
b. Kawasan Industri KBN – Cakung
c. Gedung DPRD DKI Jakarta

Bekasi

a. Kawasan Industri MM 2100
b. Kawasan Industri Jababeka
c. Kawasan Industri EJIP
d. Kawasan Industri Hyundai
e. Kawasan Industri Delta Silikon
f. Kawasan Industri Lippo
g. Kawasan Industri Gobel

Tangerang

a. Kawasan Industri Jatake
b. Kawasan Industri Kalisadi
c. Kawasan Industri Manis
d. Kawasan Industri sekitar Jati Uwung

Bogor

a. Kawasan Industri Sentul
b. Kawasan Industri Menara
c. Kawasan Industri Wanaherang
d. Kawasan Industri Cileungsi

Karawang
a. Kawasan Industri KIIC – Karawang Barat
b. Kawasan Industri Surya Cipta
c. Kawasan Industri Indotaisei - Karawang Timur

Purwakarta
a. Kawasan Industri Kota Bukit Indah (KBI)
b. Kawasan Industri Jatiluhur
c. Kawasan Industri Sukasari

Bandung
a. Kawasan Industri Cimahi
b. Kawasan Industri Leuwigajah

Semarang
a. Kawasan Industri Candi

Pasuruan
a. Kawasan Industri PIER – Pasuruan

Sidoarjo
a. Kawasan Industri Rungkut
b. Kawasan Industri Berbek

Mojokerto
a. Kawasan Industri Ngoro

Sumatera Utara
a. Kawasan Industri Medan (KIM), atau Tamora - Deli Serdang

Batam (Kepri)
a. Kawasan Industri Muka Kuning
b. Kawasan Industri Batam Centre
c. Kawasan Industri Tanjung Uncang

Jambi
a. Kota Jambi
b. Tanjung Jabu Barat

Riau
a. Pekanbaru
b. Duri
c. Simak
d. Dumai

Sumatera Selatan
a. Palembang

Kalimantan Barat
a. Pontianak
b. Singkawang

Kalimantan Timur
a. Samarinda
b. Balikpapan

Sulawesi Utara
a. Manado

Sulawesi Tengah
a. Palu

Sulawesi Selatan
a. Makassar

Dalam aksi mogok kerja Nasional, MPBI menuntut 3 (tiga) tuntutan yakni : Hapus Outsourcing yang Tidak Sesuai Dengan UU No. 13/2003, Tolak Upah Murah dan Jalankan Jaminan Kesehatan Seluruh Rakyat pada 1 Januari 2014 bukan 2019, dan iuran buruh tetap dibayarkan oleh pengusaha.

Atas 3 tuntutan tersebut MPBI telah melakukan dialog dengan Menko Perekonomian dan Menakertrans. Hasil diskusi menyimpulkan bahwa :
1. MPBI masih tetap pada sikapnya bahwa Permenaker mengenai item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) harus diubah dari 60 item menjadi 84-122 item.
2. Mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Permenaker mengenai pelanggaran outsourcing diluar 5 jenis pekerjaan yang
diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yaitu : tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga catering, tenaga driver, dan jasa penunjang di perusahan pertambangan.
3. Mendesak pemerintah untuk memutksan bahwa iuran pekerja dalam jaminan kesehatan SJSN ditanggung oleh pengusaha sesuai dengan iuran jaminan kesehatan dalam program jamsostek saati, yaitu pengusaha pengusaha menanggung iurang 3% untuk pekerja lajang dan 6% untuk pekerja yang berkeluarga.
4. Menko Perekonomian dan Menakertrans berjanji akan melakukan perubahan terhdap aturan outsourcing hanya saja Menko Perekonomian dan Menakertrans belum mau membicarakan lebih lanjut masalah kebijakan pengupahan dan jaminan kesehatan karena bukan ada didalam kewenangan Menko Perekonomian tetapi kewenangan Menko Kesra

Berdasarkan hasil dialog tersebut, MPBI tetap melakukan aksi mogok kerja nasional agar semua pihak mau memenuhi tuntutan MPBI. Dan MPBI menjamin bahwa aksi mogok kerja nasional ini berlangsung damai, tidak anarkis dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Ttd

PRESIDIUM MAJELIS PEKERJA BURUH INDONESIA (MPBI)

Presidium :
AndiGani Nena Wea (Presiden KSPSI), Ir Said Iqbal ME (PresidenKSPI), Mudhofir (Presiden KSBSI)

Jakarta, 3 Oktober 2012
Kontak Person media :

Subiyanto (0852 1625 267), Muhamad Rusdi (0812 8904 1000), Togar Marbun (0813 1149 8737), Roni : (0818 965 660)

KOMITE AKSI BURUH TANGERANG UNTUK MOGOK NASIONAL 3 OKTOBER 2012

KSPI (FSPMI, FSP-FARKES R),KSPSI (FSP-KEP), KSBSI,
KASBI (FSBN, SBJR, SPCI), GSBI, SBJ, SBB, FSBI.
Siaran Pers :
AKSI MOGOK NASIONAL
MENUNTUT : PENGHAPUSAN SISTEM KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING,
TOLAK POLITIK UPAH MURAH

Ketika Negara Republik Indonesia di dirikan oleh para pejuang Kemerdekaan, tujuan besarnya adalah bercita-cita untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan, segala bentuk penghisapan atas satu manusia terhadap manusia yang lainnya. Selain itu berkehendak membentuk Pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian cita-cita mulia tersebut di amanatkan dalam UUD'1945 dan Pancasila. Namun apakah cita-cita para pendiri Republik saat ini terpenuhi? Ternyata TIDAK. Kami Serikat Buruh/Serikat Pekerja menilai system kerja kontrak dan outsourcing dalam berbagai bentuknya merupakan musuh utama yang pertama kali harus dihancurkan.

System kerja kontrak dan outsourcing menyebabkan rakyat kehilangan kepastian kerja, dan hak atas pekerjaan yang layak bagi rakyat menjadi jauh dari kenyataan. Disamping itu berdampingan pula ancaman Politik Upah Murah (yang merupakan warisan ORDE BARU) oleh pemerintah dan kaum pemodal yang di jadikan dagangan pemerintah SBY terhadap investor. Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing maupun Politik Upah Murah adalah bentuk baru dari PERBUDAKAN MODERN, karena kaum buruh di hisap darah dan keringatnya untuk keuntungan kaum pengusaha. Bagi kaum buruh tidak ada pilihan lain selain menerima dengan terpaksa keinginan majikan tersebut, jika mereka masih menginginkan dapur keluarga tetap berasap, demi perut anak dan isteri. Dan system Outsourcing juga menutup masa depan buruh, tak ada jenjang kenaikan pangkat atau jabatan yang membuat kebanggaan seorang buruh dalam berprestasi. Selesai kontrak kemudian buat kontrak baru dan mulai lagi dengan gaji awal, begitu seterusnya

bertahun-tahun sampai tak terasa umur sudah tua dan tak bertenaga lagi. Outsourcing tidak memandang sisi keadilan sosial dan kesejahteraan buruh pada umumnya. Buruh di peras tenaganya, seperti ampas jeruk yang di buang begitu saja ke keranjang sampah setelah intisarinya di hisap.

Praktek Perbudakan Modern semakin menyengsarakan kaum buruh ketika di praktek-kan dalam bentuk outsourcing dan sistem kerja kontrak yang dibarengi dengan politik upah murah. Outsourcing dan sistem kerja kontrak semakin merajalela dan semakin jauh dari batasan yang ada. Cilakanya, praktek-praktek ini dipelopori dan merajalela di perusahaan-perusahaan milik Negara, seperti PERTAMINA, PLN, PERKEBUNAN PTPN, BANK, KERETA API, PERTAMBANGAN dan lain-lain. Menjadi wajar kemudian jika ternyata Pemerintah tidak sanggup menegakkan pengawasan terhadap praktek menyimpang dari outsourcing dan sistem kerja kontrak, karena PEMERINTAH sendiri juga merupakan pelaku dari perbudakan modern tersebut.
Kami berpendapat bahwa tidak ada jalan lain selain menggemakan dan mewujudkan Gerakan Bersama untuk berjuang :
MENGHAPUSKAN Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing
dan mewujudkan upah layak yang adil. Kini saatnya bagi seluruh kaum buruh dan rakyat terhisap lainnya untuk mengibarkan panji-panji dan terompet perang terhadap PERBUDAKAN MODERN. Kita, kaum buruh yang hanya menjual tenaga kerjanya di sebut "Pekerja", atau Klas buruh" tanpa memandang asal usul dan keyakinannya adalah senasib.

Persamaan senasib adalah bagian tak terpisahkan dalam
gerakan buruh. Tentu harus bahu membahu dalam berjuang melawan untuk MENGHANCURKAN PERBUDAKAN MODERN adalah kewajiban bagi semua bagian dari gerakan buruh Indonesia. Maka ketika tersiar kabar bahwa Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan melakukan pemogokan umum secara nasional, Kami Kaum Buruh/Pekerja di Tangerang Kota, Kabupaten dan Tangerang Selatan sebagai bagian dari Gerakan Buruh INDONESIA sangat bergembira dan menyambut dengan suka cita mendukung rencana Pemogokan Umum Nasional yang akan di mulai pada tanggal 3 Oktober 2012 s.d selesai.

Oleh karena itu, Kami Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang tergabung dalam Komite Aksi Buruh Tangerang menyerukan kepada seluruh elemen buruh dan rakyat kecil di Seluruh Tangerang Raya “Mari kita menggalang solidaritas dan berjuang bersama-sama dengan melakukan Aksi Mogok Nasional Serentak yang akan di mulai : tanggal 3 Oktober 2012 di semua kawasan Industri Tangerang Raya, Menuntut : Penghapusan Sistem Kerja Kontrak-Outsourcing dan Tolak Politik Upah Murah ! Pada Aksi Mogok Nasional ini di Wilayah Tangerang Raya akan di ikuti sedikitnya : 100.000
(seratus ribu) buruh dengan mengambil di 27 Titik Aksi Pemogokan sebagai berikut :

1.Kawasan Industri Jl.Daan Mogot Kebon Besar,
3.Jl.Pembangunan Batuceper,
4.Poris Plawad,
5.Pasar Baru,
6.Kawasan Benua,

7.Kawasan KM,
8. Cikokol,
9.Karawaci,
10.Serpong,
11.Ciputat,
12.Cimone,
13.Jatake,
14.Manis,
15.Dumpit,
16.Jatiuwung,
17.Gelam,
18.Bunder,
19.Bitung,
20.Pasar Kemis,
21.Curug,
22.Legok,
23.Kedaton,
24.Cikupa,
25.Milenium Tiga Raksa,
26.Oleg,
27.Balaraja.

Selain itu Aksi Mogok ini juga akan di dukung oleh buruh/pekerja dari Wilayah Jakarta Barat Kali Deres-Cengkareng-Kapuk-Pesing dan sekitarnya.
Demikian siaran Pers ini kami sampaikan, dan melalui siaran Pers ini kami meminta Ma'af kepada Warga Masyarakat pengguna Jalan, dan juga Masyarakat yang tinggal di sekitar Titik Wilayah Aksi Pemogokan karena aktivitasnya terganggu.
Dan kami juga meminta dukungan sepenuhnya kepada kawan-kawan Pekerja Media dan seluruh kaum buruh Tangerang Raya untuk mengabarkan dan menciptakan perubahan system yang lebih baik bagi kehidupan kaum buruh dan Rakyat Indonesia.
Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukunganya.

Buruh Bersatu Tak Dapat Di Kalahkan !
Hidup Buruh !
Hidup Rakyat Indonesia !
Tangerang, 1 Oktober 2012
Hormat Kami PERWAKILAN SB/SP :

1. FSPMI- KSPI (Riden Hatam.A : 08128618364).
2. FSBN-KASBI (Maman Nuriman : 08121375189).
3. FSP KEP-KSPSI (Afif J : 082113988088).
4. SP FARKES R (Sasmita : 081310134084).
5. GSBI (Amin : 085781179068).
6. KSBSI (Tri : 081218551442).
7. SBJ (Sulistyowati : 08521780584).
8. SBB (Fahrudin : 081382217930).
9. SBJR (Sudirman : 082110338613).

10. FSBI (Suprayitno : 081311681561).
11. FKBL Legok (Tommy : 02134246269)

STATEMENT 3 OKTOBER 2012 PEMOGOKAN UMUM NASIONAL, GERAKAN TIGA OKTOBER – MOGOK UMUM NASIONAL (GETOK MONAS) : HAPUS SISTEM KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING HAPUS POLITIK UPAH MURAH: UPAH LAYAK SEKARANG JUGA

Pergulatan panjang gerakan buruh Indonesia menjadi pelajaran penting dari waktu-kewaktu. Ketidak berpihakan Negara dalam hal ini pemerintah terhadap perbaikan kesejahterahan buruh, semakin membuat kaum buruh sadar bahwa jalan satu-satunya adalah berjuang menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Kaum buruh menginginkan jati diri sebagai manusia yang bermartabat kembali digenggam. Bermartabat artinya hidupnya terbebas dan merdeka dari belenggu penindasan kapitalis. Bermartabat artinya mendapatkan keadilan dari hasil kerjanya. Bermartabat artinya tidak diperlakukan seperti budak karena system kerja kontrak dan outsourcing adalah perbudakan modern. Bermartabat artinya kita terbebas dari penjajahan gaya baru.

Pada hari ini 3 (tiga) oktober 2012 kaum buruh Indonesia secara sadar bersatu padu dalam gelombang besar pemogokan umum nasional. Gerakan tiga oktober mogok umum nasional (GETOK-MONAS) menjadi awal bagi kami gerakan buruh dalam merobohkan setan kapitalisme yang berpuluh tahun mengangkangi martabat kemanusian kaum buruh Indonesia. Terbunuh, terpenjara, diseret dan dipukuli dan bermacam kekerasan dari Negara sang penjaga kepentingan pengusaha. MARSINAH dan korban kekerasan dari kaum buruh Indonesia ketika memperjuangkan perbaikan nasib. Kami semakin sadar alat perjuangan harus efektif dalam melawan kapitalisme bersama anteknya. YA, DAN PEMOGOKAN UMUM NASIONAL adalah alat yang efektif agar kemenangan tuntutan kaum buruh Indonesia segera diraih.

Penghapusan system kerja kontrak dan outsourcing serta politik upah murah adalah tuntutan utama yang harus dipenuhi. karena System kerja kontrak dan outsourcing membuat kami seperti binatang yang diperas tenaga untuk menghasilkan keuntungan bagi majikan tetapi masa depan kami kaum buruh sangat sengsara dalam ketidak pastian kerja. Model hubungan kerja kontrak dan outsourcing sebagai bentuk baru dari system perbudakan modern adalah cara kaum majikan membelenggu rasa kemanusiaan dan keadilan. Buruh kontrak dan outsourcing mengalami ketidak adilan upah, karena upah yang diterima sangat murah dan sangat jauh dari untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarga.

Kinilah saatnya bagi kita, seluruh kaum buruh dan rakyat terhisap lainnya untuk mengibarkan panji-panji dan terompet perang terhadap PERBUDAKAN MODERN. Satu Tekad, Satu Sikap, Satu Tindakan untuk berjuang bersama-sama HANCURKAN PERBUDAKAN MODERN.

Konfederasi KASBI menuntut dan menghendaki:

1. **Penghapusan system kerja kontrak dan outsourcing**
2. **Revisi Peraturan Komponen KHL secara menyeluruh dengan membuat ketentuan mengenai Kebijakan Pengupahan yang melindungi buruh dan menjamin upah layak yang dibuat dengan proses yang transparan, terbuka serta melibatkan semua konstituen buruh.**
3. **Reformasi kelembagaan Tripartit (Nasional dan Daerah) dan Dewan Pengupahan dengan prinsip keterwakilan, terbuka, dan partisipatif serta bertanggung-jawab secara berkala kepada kaum buruh.**
4. **Bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Penghapusan Outsourcing dan Sistem Kerja Kontrak.**

Pemerintahan SBY-BUDIONO yang menghamba pada PENJAJAHAN GAYA BARU pasti tidak akan sanggup memenuhi tuntutan di atas. Hanya ketika kaum buruh berkuasa dan menerapkan sistem ekonomi yang menghamba pada KESEJAHTERAAN RAKYAT (***welfare state)*** sajalah yang dapat memenuhi tuntutan di atas.

Kita, kaum buruh yang hanya menjual tenaga kerjanya disebut ”Pekerja”, atau Klas buruh” tanpa memandang asal usul dan kenyakinannya adalah senasib. Persamaan senasib adalah bagian tak terpisahkan dalam gerakan buruh. Tentu bahu membahu dalam berjuang melawan untuk MENGHANCURKAN PERBUDAKAN MODERN adalah kewajiban bagi semua bagian dari gerakan buruh Indonesia.

Konfederasi KASBI menyerukan kepada seluruh elemen rakyat, mari bersama-sama untuk menggalang solidaritas dan membagun persatuan untuk melawan dan menghancurkan PENJAJAHAN GAYA BARU (NEO-LIBERALISME). Hanya dengan menghancurkan neo-liberalisme-lah, maka kemakmuran dan keadilan rakyat dapat terwujud

Satu Tekad, Satu Sikap, Satu Tindakan :
HANCURKAN PERBUDAKAN MODERN

KASBI : Muda, Berani, Militan

Jakarta, 3 Oktober 2012
Pengurus Pusat
Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia

Ketua Umum	**Sekretaris Jenderal**
(NINING ELITOS)	**(ABDUL RACHMAN**